Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya 2023 - 2028







Disusun Oleh:

Pokja PKP Kota Tasikmalaya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arahan kebijakan pembangunan sanitasi yang meliputi sektor air limbah domestik dan persampahan.

SSK Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2028 merupakan pemutakhiran dokumen SSK Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021, yang telah disesuaikan dengan isu strategi dan potensi daerah saat ini. Dokumen ini, dilengkapi indikasi program/kegiatan pembangunan sanitasi dari berbagai sumber pendanaan. Implementasi SSK Kota Tasikmalaya, diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek (RKPD) dan jangka menengah (RPJMD).

Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Tasikmalaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak serta komponen masyarakat yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen SSK Kota Tasikmalaya.

Segala upaya telah dilakukan untuk penyusunan SSK Kota Tasikmalaya ini, walaupun masih dirasakan terdapat kekurangan. Kami sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak untuk dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga Dokumen SSK ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Sanitasi di Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Desember 2023

Pj. Wali Kota Tasikmalaya

Dr. CHEKA VIRGOWANSYAH, S.STP., ME.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Metodologi Penyusunan I-3
1.3. Dasar Hukum I-5
1.4. Sistematika Penulisan I-13

BAB II PROFIL SANITASI KOTA TASIKMALAYA II-1
2.1 Gambaran Wilayah II-1
2.1.1 Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota II-1
2.1.2 Topografi II-3
2.1.3 Geologi II-6
2.1.4 Hidrologi dan Hidrogeologi II-6
2.1.5 Tata Ruang Wilayah II-10
2.2 Profil Sanitasi Saat Ini II-17
2.2.1 Air Limbah Domestik II-17
2.2.2 Pengelolaan Sampah II-59
2.2.3 Drainase Lingkungan II-99
2.3 Area berisiko dan Permasalahan Sanitasi II-103
2.3.1 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik II-103
2.3.2 Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan II-107

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI II-1
3.1 Visi dan Misi Sanitasi III-1
3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi III-2
3.2.1.Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi III-2
3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi III-9
3.2.3. Skenario pencapaian sasaran III-17
3.2.4. Kemampuan pendanaan sanitasi daerah III-18

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI IV-1
4.1 Air Limbah Domestik (ALD) IV-1
4.2 Pengelolahan Persampahan IV-6

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI V-1
5.1. Ringkasan V-1
5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah V-2
5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah IV-4

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA V-1
6.1. Monitoring Dan Evaluasi Capaian Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya II-3
Tabel 2.2 Rata-rata suhu dan kelembaban udara Tahun 2021 ..... II-7
Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota ... II-8
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan II-9
Tabel 2.5 Capaian Akses Air Limbah Domestik II-17
Tabel 2.6 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat II-18
Tabel 2.7 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat) ... II-19
Tabel 2.8. Sub Sistem Layanan dan Pengolahan SPAL-D Terpusat II-22
Tabel 2.9 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024 ..... II-39
Tabel 2.10 Analisis Keberfungsian II-40
Tabel 2.11 Kelembagaan Air Limbah Domestik II-41
Tabel 2.12. Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik II-44
Tabel 2.13 Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Tahun 2023 ..... II-47
Tabel 2.14 Pemetaan Kelembagaan Non Pemerintah II-52
Tabel 2.15 Pemetaan Kontribusi Kelembagaan Non Pemerintah II-53
Tabel 2.16 Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik II-54
Tabel 2.17. Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygine dan Sanitasi terkait Air Limbah II-56
Tabel 2.18. Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Air Limbah II-58
Tabel 2.19. Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan II-59
Tabel 2.20. Timbulan Sampah II-59
Tabel 2.21 Pengumpulan Sampah II-60
Tabel 2.22 Penampungan Sementara dan Pengangkutan II-61
Tabel 2.23 Pengolahan Sampah II-63
Tabel 2.24 Pemrosesan Akhir Sampah II-64

Tabel 2.25. Pengurangan Sampah II-66
Tabel 2.26. Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan..... II-83
Tabel 2.27 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah terkait Persampahan II-85
Tabel 2.28 Pemetaan Tugas dan Fungsi terkait Persampahan..... II-86
Tabel 2.29 Data Lembaga Pengelola/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan II-89
Tabel 2.30 Pemetaan Kepentingan di luar Pemerintah Daerah..... II-93
Tabel 2.31 Pemetaan Kontribusi Kepentingan di luar Pemerintah Daerah II-94
Tabel 2.32 Regulasi Pengelolahan Sampah II-95
Tabel 2.33 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygine dan Sanitasi terkait Persampahan II-97
Tabel 2.34 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Persampahan..... II-98
Tabel 2.35 Wilayah genangan air di Kota Tasikmalaya..... II-99
Tabel 2.36 Kondisi sarana dan prasarana drainase lingkungan di Kabupaten/Kota..... II-102
Tabel 2.37 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik..... II-104
Tabel 2.38 Permasalahan Air Limbah Domestik II-107
Tabel 2.39 Area Berisiko Sanitasi Persampahan II-108
Tabel 2.40 Permasalahan Persampahan..... II-111
Tabel 2.41 Area Berisiko Sanitasi Drainase Lingkungan..... II-112
Tabel 2.42 Permasalahan Drainase..... II-115
Tabel 3. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kota III-1
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Data Dasar Air Limbah Domestik Kota Tasikmalaya III-5
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Data Dasar Persampahan III-8
Tabel 3. 4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik III-10
Tabel 3. 5 Tahapan Pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan III-13
Tabel 3. 6 Skenario Pencapaian Sasaran..... III-17

Tabel 3. 7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Sanitasi III-19
Tabel 3. 8 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan III-20
Tabel 3. 9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi III-20
Tabel 3. 10 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun III-21
Tabel 3. 11 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK III-22
Tabel 4.1 Strategi Penangangan Air Limbah IV-2
Tabel 4.2 Matrik Kerangka Logis Pengelolaan Air Limbah IV-3
Tabel 4.3 Strategi Pengelolaan Persampahan IV-6
Tabel 4.3 Matrik Kerangka Logis Pengelolaan Persampahan IV-7
Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun V-1
Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun V-1
Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran V-2
Tabel 5.4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kota Tasikmalaya V-3
Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi V-3
Tabel 5.6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN V-4
Tabel 5.7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK V-4
Tabel 5.8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR V-5
Tabel 5.9 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat V-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Posisi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Kota (SSK) dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah I-2
Gambar 1. 2 Amanat Penyusunan Dokumen SSK I-6
Gambar 2.1 Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah di Kota Tasikmalaya II-2
Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Tasikmalaya..... II-4
Gambar 2.3 Peta Morfologi Kota Tasikmalaya II-5
Gambar 2.4 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Tasikmalaya..... II-12
Gambar 2.5 Peta Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya II-14
Gambar 2.6 Peta Kawasan Strategis Kota Tasikmalaya II-15
Gambar 2.7. Sarana Pengangkutan Air Limbah II-19
Gambar 2.8 Situasi Sarana Pengolahan Air Limbah II-20
Gambar 2.9 Kondisi Sarana Pengolahan Air Limbah II-20
Gambar 2.10 Suasana lingkungan di area IPLT Singkup..... II-21
Gambar 2.11. Kondisi IPAL..... II-37
Gambar 2.12 Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik II-38
Gambar 2.13 Analisis Rantai Layanan ALD II-40
Gambar 2.14 Motor Roda Tiga II-60
Gambar 2.15 Dump Truck II-60
Gambar 2.16. Kondisi Container Baik II-62
Gambar 2.17 Kontainer kurang Baik II-62
Gambar 2.18 Kondisi dan situasi TPA Ciangir II-65
Gambar 2.19 Bank Sampah..... II-80
Gambar 2.20 Peta Cakupan Pengurangan Sampah II-81
Gambar 2.21 Peta Cakupan Penanganan Sampah II-82
Gambar 2.22 Rantai Layanan Sanitasi Kota Tasikmalaya II-84
Gambar 2.23 Peta Lokasi Genangan II-101
Gambar 2.24 Peta Area Berisiko Sanitasi Air Limbah II-106
Gambar 2.25 Peta Peta Area Berisiko Sanitasi Persampahan..... II-110

Gambar 2.26 Peta Area Beresiko Drainase Lingkungan II-114
Gambar 3.1 Peta Zonasi Pengembangan Sistem ALD III-12
Gambar 3.2 Peta Rencana Pengembangan Penanganan Sampah III-15
Gambar 3.3 Peta Rencana Pengembangan Pengurangan Sampah ... III-16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sanitasi merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena menyentuh langsung dalam kehidupan sehari-hari. Buruknya kondisi sanitasi suatu wilayah akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, yang selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Dampak negatif pada aspek kehidupan masyarakat dapat berupa terjadinya pencemaran sumber air minum bagi masyarakat, timbulnya berbagai macam penyakit, meningkatnya jumlah kejadian diare, hingga menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya perekonomian. Dengan kata lain kondisi sanitasi suatu wilayah akan menjadi indikator kesehatan masyarakat, karena semakin buruk kondisi sanitasi maka angka kesakitan akan meningkat, yang pada akhirnya akan mengganggu secara ekonomis.

Dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan dan target RPJMN 2020-2024 dan SDGs 2030, yaitu memenuhi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak 90% (termasuk 15% aman), dan buang air besar sembarangan (BABS) 0% serta perlunya penanganan sampah sebesar 80% dan 20% pengurangan maka diperlukan pembangunan sanitasi melalui pendekatan multi aspek. Pendekatan multi aspek tersebut salah satunya adalah pemetaan dan analisis rekomendasi regulasi dalam penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). Pentingnya regulasi dalam urusan persampahan dan air limbah domestik di Kota Tasikmalaya akan menjadi rujukan dan dasar dalam menyusun rencana dan penetapan anggaran implementasi secara berkelanjutan dan menjadi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban terkait urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar sehingga mendorong partisipasi keterlibatan dan menggalang sumber daya para pihak secara bersama menuntaskan urusan sanitasi (Sampah dan Air Limbah Domestik/ALD).

Selain itu pendekatan lain seperti aspek teknis, aspek pendanaan

aspek kelembagaan dan aspek masyarakat tentunya juga sangat berperan penting dalam menjawab bagaimana Strategi Multi Aspek ini dapat tercapai Sanitasi Aman di tahun 2030 nanti. Target SDGs 6.1 dan 6.2 jelas sekali mengatakan bahwa pada tahun 2030 akan mencapai akses universal air minum yang merata, aman dan terjangkau untuk semua. Akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua dan menghentikan praktik buang air besar ditempat terbuka dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Target 6.3 dikatakan meningkatkan kualitas air melalui pengurangan polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan produksi limbah berbahaya, mengurangi setengah porsi air limbah yang tidak terolah, meningkatkan daur ulang (recycle) serta penggunaan kembali (reuse) barang daur ulang. Terutama pada target 11.6, sangat diharapkan pad tahun 2030 bisa mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.



Gambar 1. 1 Posisi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Kota (SSK) dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Terkait kedudukan SSK dalam dokumen perencanaan pembangunan dapat di lihat pada gambar 1.1 diatas. Hubungan Dokumen SSK yang telah dimutakhirkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya 2023-2026 sesuai Peraturan Walikota

Nomor 13 tahun 2022 dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya tahun 2011-2031 yang di atur dalam Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentunya saling berintegrasi dan diakomodasi secara formal dalam perencanaan daerah. Dokumen SSK ini akan menjadi dasar bagi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi.

Sebelumnya Kota Tasikmalaya sudah dua kali menyusun dokumen SSK sebagai gambaran arah kebijakan terkait Pembangunan sanitasi, sehingga pembangunan sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat sudah terlihat jelas, namun saat ini dibutuhkan pemutakhiran kembali. Karena dokumen sanitasi yang memuat informasi beserta strategi sanitasi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi serta permasalahan sanitasi di Kota Tasikmalaya saat ini. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SSK Kota Tasikmalaya untuk jangka waktu 5 tahun kedepan yaitu tahun 2023-2028.

1.2. Metodologi Penyusunan

Secara metodologi proses penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) untuk Kota Tasikmalaya meliputi:

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer ini dilakukan pada tahun 2022 oleh Dinas Kesehatan dengan teknik survey lapangan, meliputi: wawancara terstruktur, *depth interview* (wawancara mendalam), pengamatan langsung di lapangan (observasi), diskusi terfokus, dimana fokus sasarannya adalah masyarakat secara umum, tokoh, organisasi, pihak swasta atau pengiat sanitasi, LSM, pemerintah, dan media baik cetak atau elektronik.

- Studi EHRA

Data yang dikumpulkan melaui pelaksanaan Studi *Environmental Health Risk Assesment* (EHRA) atau penilaian risiko kesehatan lingkungan adalah survei yang dimaksudkan untuk mengetahui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan sarana sanitasi yang dimiliki rumah tangga.

- Studi Non EHRA

Studi komunikasi dan pemetaan media, adalah studi yang dimaksudkan untuk mengetahui potensi dan peluang pelaksanaan kegiatan komunikasi kebijakan dan pembangunan sanitasi.

Studi penyedia layanan sanitasi/*Sanitation Supply Assessment* (SSA) dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan produk dan layanan sanitasi.

Studi kondisi sanitasi pada sekolah dasar di Kota Tasikmalaya untuk mengetahui sejauh mana terlayaninya kebutuhan sanitasi para murid sekolah dasar beserta para gurunya.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder sektor sanitasi digunakan sebagai dasar untuk membuat pemetaan kondisi sanitasi secara aktual, serta memotret kebutuhan akan layanan sanitasi yang baik, sesuai standar kebutuhan minimal pembangunan sanitasi. Tidak hanya sekedar kompilasi, tetapi juga dilakukan proses seleksi dan verifikasi data.

Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan pertemuan rutin dengan anggota tim Pokja PKP, kunjungan lapangan, diskusi yang bersifat teknis dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi.

Adapun data sekunder yang dipakai antara lain:

- Data Umum Kabupaten/Kota
  Kode BPS Kabupaten/Kota
  Profil kapasitas fiscal kabupaten/kota
  Target pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota
- Data Administrasi per Kelurahan/Desa
  Kode BPS desa/kelurahan
  Jumlah penduduk dan rumah tangga (laki-laki dan perempuan)
  Karakteristik perdesaan/perkotaan (berdasarkan BPS)
  Monev STBM Pilar Stop BABS
  Rumah Tangga MBR
- Data Penentuan Area Beresiko

IRS hasil studi EHRA

Persepsi Perangkat Daerah

- Data dan Keberfungsian Infrastruktur

Air Limbah domestic (IPLT, IPALD, Truk Tinja)

Sampah perkotaan (TPA, TPST, TPS 3R, Bank Sampah, Sektor Informasi, alat pengumpulan dan pengangkutan)

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan untuk menganalisa atau mengkaji beberapa data dan informasi yang didapatkan baik berdasarkan desk study atau kajian lapangan dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Tasikmalaya tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- ✓ Melakukan review terhadap dokumen terkait pada tahun-tahun sebelumnya.
- ✓ Memetakan kembali kondisi sanitasi Kota Tasikmalaya dengan melihat keadaan eksisting yang terjadi saat ini.
- ✓ Memanfaatkan instrumen sanitasi SSK.
- ✓ Penetapan visi dan misi Sanitasi Kota Tasikmalaya yang mengacu pada Visi dan Misi Kota Tasikmalaya (RPD 2023-2026), sebagai acuan untuk pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahun).
- ✓ Menetapkan rencana sistem sanitasi jangka panjang (10-15 tahun) yang memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), proyeksi kepadatan penduduk dan kondisi lingkungan.
- ✓ Mengkaji zona sistem sanitasi yang sudah ada apakah sudah sesuai dengan harapan pada Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebelumnya.
- ✓ Menetapkan tahapan pengembangan sanitasi kota yang dibagi sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya.
- ✓ Analisis kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan sanitasi.
- ✓ Perumusan Strategi Pembangunan Sanitasi dengan menggunakan Kerangka Kerja Logis (KKL)

- ✓ Perumusan Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Konsolidasi dan penyepakatan oleh pokja PKP Kota Tasikmalaya dengan pokja sanitasi/AMPL Provinsi Jawa Barat dan pusat.
- ✓ Proses Finalisasi melalui kegiatan pengawalan penganggaran dan advokasi ke Kepala Daerah (Walikota).

1.3. Dasar Hukum

Ditegaskan kembali pada pertemuan awal tahun, bahwa dasar hukum sistem layanan sanitasi berkelanjutan yang diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) diterjemahkan menjadi 5 arah kebijakan dan strategi (Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024). Dan amanatnya untuk penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) sangat jelas tergambarkan dibawah ini.

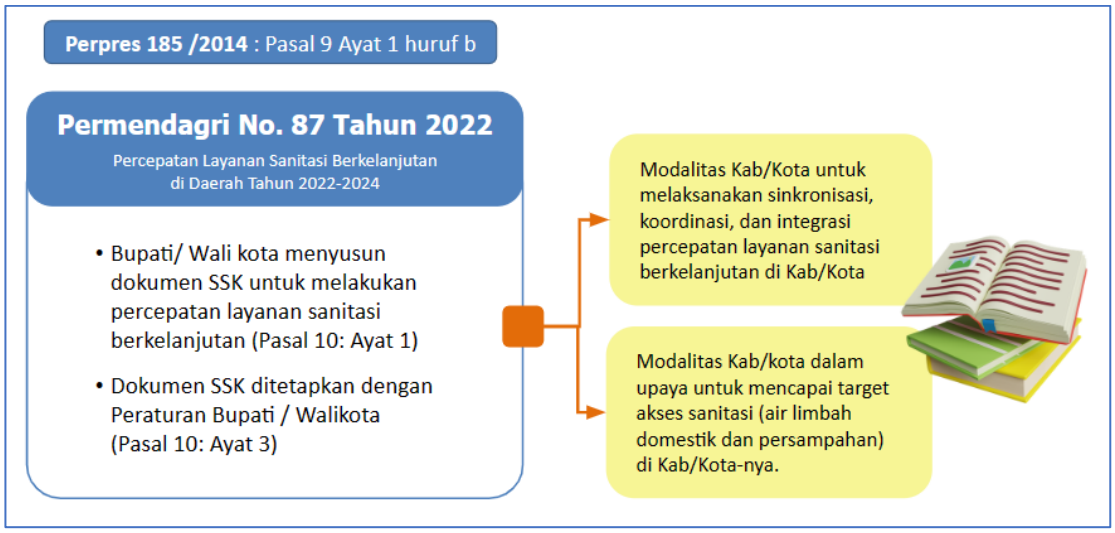

Gambar 1. 2 Amanat Penyusunan Dokumen SSK

Sumber: Permendagri Nomor 87 Tahun 2022

Sebagai acuan dalam melengkapi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK) Kota Tasikmalaya maka terdapat peraturan-peraturan yang berlaku (nasional, provinsi, dan daerah) dan menjadi dasar, seperti Undang-Undang, PP, Permen, Perda, dan/atau Perwali adalah sebagai berikut:

a. Undang - Undang

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman;
15) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan;
16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU no 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2014;
17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

b. Peraturan Pemerintah

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3;
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
15) Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;

16) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
18) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan DAS;
20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah tangga;
23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
26) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

c. Peraturan Presiden
1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
3) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

d. Peraturan Menteri

1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air;
2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum;
3) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Air Minum;
4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan strategi Nasional pengembangan sistem Pengelolaan Persampahan;
8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan SPAM;
9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/ Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Wajib Dilengkapi Dengan UPL dan UKL;

12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15) Permen PU No14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
17) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
18) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/Per/VI/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedomaan Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air;
20) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489);
21) Peraturan Menteri LH No 16 Tahun 2011Tentang Pedoman Materi Muatan Ranperda Pengelolaan Sampah RT;
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1018/Menkes/Per/V/2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim;
24) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;

25) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah;
26) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan SPAM;
27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan TPA;
28) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
29) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Jakstra Air Minum;
30) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
31) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
32) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12 Tahun 2014, Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
33) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
34) Peraturan Menteri kesehatan No 82 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
36) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

37) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
38) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
39) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
40) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
41) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024.

e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat;
2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sungai;
3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

f. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya

1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya;
3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah;

g. Peraturan Walikota Tasikmalaya

1) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
2) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan;
3) Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya tahun 2011-2031;
4) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
5) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya;
6) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya;
7) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya;

8) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Tasikmalaya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
10) Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2028, terdiri dari 6 Bab dengan isi sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, metodologi, dasar hukum dan sistematika penulisan.

Bab 2 Profil Sanitasi Saat Ini, terdiri dari Gambaran Umum wilayah, Kemajuan Pelaksanaan SSK, Profil Sanitasi saat ini, Area Beresiko dan Permasalahanan Mendesak Sanitasi.

Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi, terdiri dari Visi dan Misi Sanitasi, Pentahapan Pengembangan Sanitasi, Kemampuan Pendanaan Daerah

Bab 4 Strategi Pengembangan Sanitasi, terdiri dari Strategi pengembangan sanitasi sektor penanganan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase permukiman

Bab 5 Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Sanitasi, terdiri dari Ringkasan Kebutuhan Biaya Pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, Kebutuhan Biaya Pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah dan antisipasi funding gap

Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK, terdiri dari penjelasan mekanisme monitoring dan evaluasi kemajuan implementasi SSK 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup modul data teknis, modul program dan pendanaan serta modul sarana dan prasarana.

Lampiran, berisi hasil kajian yang dilaksanakan dalam penyusunan SSK baik EHRA maupun Kajian Lainnya serta ringkasan eksekutifnya, serta program, kegiatan dan indikasi pendanaan, deskripsi program/kegiatan, daftar perusahaan CSR yang potensial, kesiapan implementasi (readiness criteria) dan rencana kerja tahunan. Lampiran 1: Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA; Lampiran 2: Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah; Lampiran 3: Peta Rencana Pengembangan berdasarkan Rencana Induk; Lampiran 4: Lembar Analisis Area Beresiko menggunakan Instrumen SSK; Lampiran 5: Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan.

BAB II
PROFIL SANITASI KOTA TASIKMALAYA SAAT INI

2.1 Gambaran Wilayah

2.1.1 Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Kota Tasikmalaya terletak antara 108008'38" BT-108024'02" BT dan antara 7010' LS-7026'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pasal 6 ayat (1) bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah :

- ✓ Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- ✓ Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
- ✓ Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang seluas 17.156,20 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

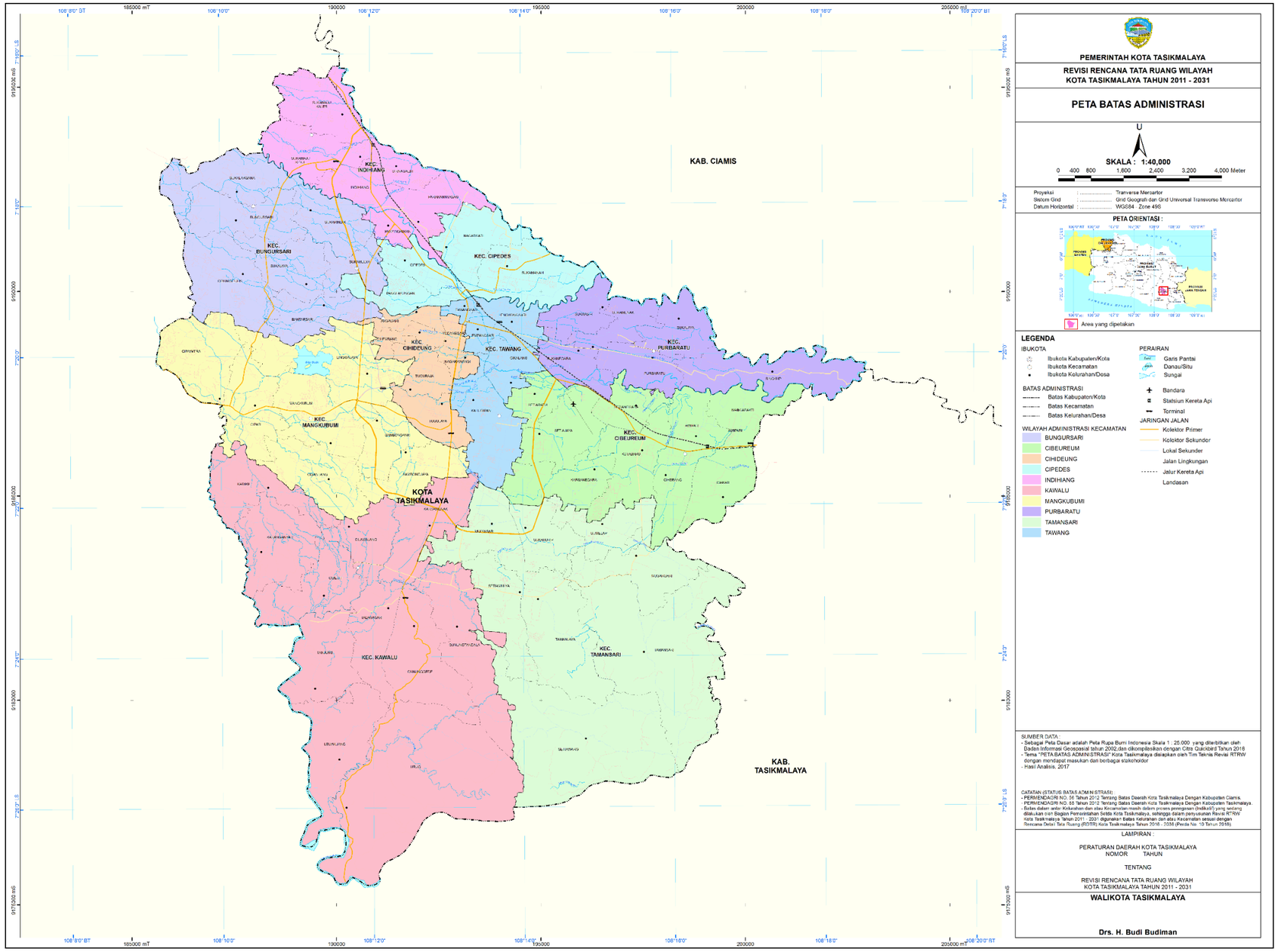

Gambar 2.1 Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah di Kota Tasikmalaya

Sumber : Data BIG (diolah), 2017

2.1.2 Topografi

Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl. Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran. Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota Tasikmalaya.

Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.1 memperlihatkan kondisi kemiringan lahan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2. 1 Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

Kelas Lereng	Luas (Hektar)	% Luas
0 – 2 %	5.372,15	29,16
2 – 5 %	4.574,18	24,83
5 – 15 %	4.882,58	26,50
15 – 25 %	1.543,24	8,38
25 -40 %	1.799,53	9,77
>40 %	250,36	1,36
Total	18.422,04	100,00

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026

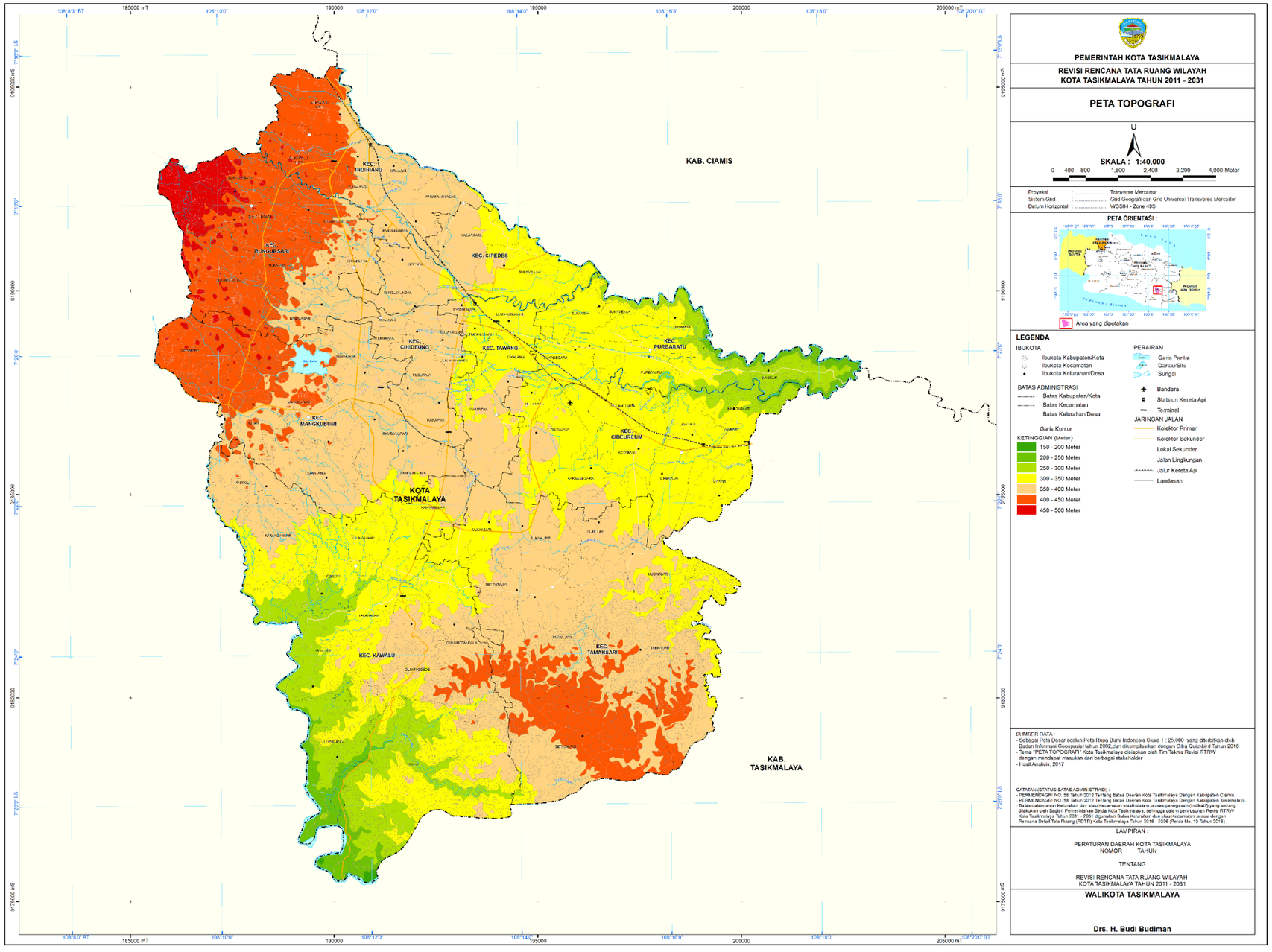

Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Tasikmalaya
Sumber : Data BIG (diolah), 2017

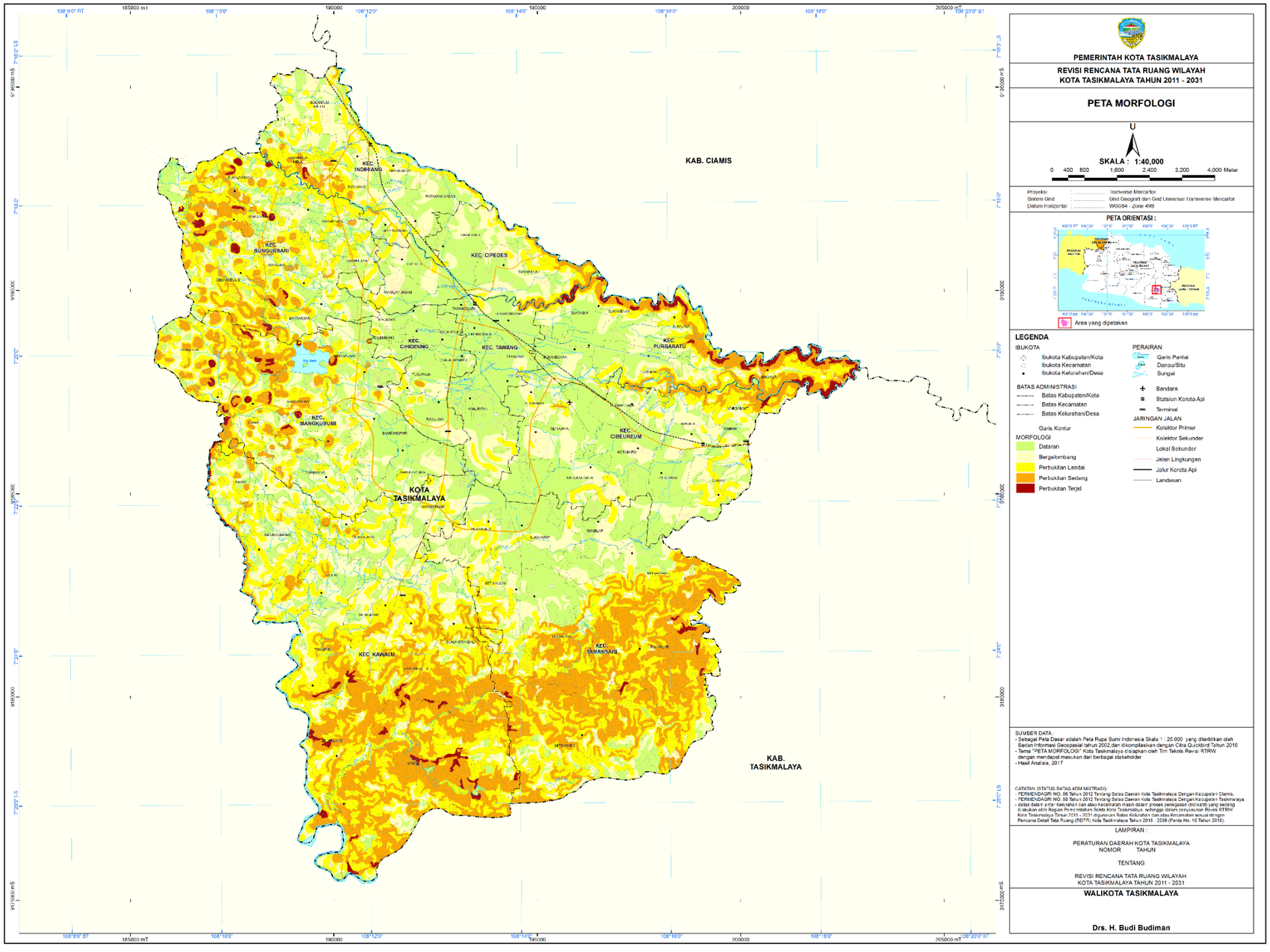

Gambar 2.3 Peta Morfologi Kota Tasikmalaya
Sumber : Data BIG (diolah), 2017

2.1.3 Geologi

Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisna, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin.

Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlapisan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan.

2.1.4 Hidrologi dan Hidrogeologi

Potensi sumber daya air dari air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ). Di wilayah Kota Tasikmalaya mengalir 51 Daerah Irigasi yang termasuk dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai ratarata bulanan sebesar 17 m^3/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m^3/detik, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m^3/detik. Jumlah kedua limpasan adalah 1.658.880 m^3/hari.

Waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar 1.646.750 m^3. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi (6.000 m^3/detik), Situ Cibeureum, Situ Cibanjaran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari (6.000

m^3/detik).

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00-10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50-7,00 m. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, Kawalu dan Tamansari.

Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik, sistem akuifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping.

Pada tahun 2021 suhu udara rata-rata di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 24,9°C. dengan suhu terendah sebesar 17,4°C yang terjadi pada bulan Januari dan tertinggi sebesar 17,4°C terjadi pada bulan Maret dan April sebesar 33,00°C dengan kelembaban udara rata-rata 84,1% pada bulan April. Rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Rata-rata suhu dan kelembaban udara Tahun 2021

Bulan (Month)	**Suhu / *Temperature (°C)***			**Kelembaban / *Humidity (%)***		
	Minimum	**Rata-rata**	**Maksimum**	**Minimum**	**Rata-rata**	**Maksimum**
Januari	17,4	24,9		32,0	62	
Februari	20,4	24,3		32,8	63	
Maret	20,4	25,3		33,0	61	
April	20,4	25,5		33,0	60	
Mei	19,0	25,4		32,2	64	
Juni	20,4	25,2		32,6	65	
Juli	19,0	25,1		32,0	65	
Agustus	19,0	24,4		31,6	71	
September	19,4	24,4		31,4	70	
Oktober	20,0	24,9		31,6	72	
November	20,0	24,7		31,6	78	
Desember	20,0	25,1		32,0	73	

Bulan (Month)	Suhu / *Temperature (°C)*			Kelembaban / *Humidity (%)*		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Rata-rata	19,6	24,9	32,2	67,1	84,1	92,5

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026

Curah hujan paling tinggi selama tahun 2021 terjadi pada bulan November yaitu 32 mm^3 dan paling rendah terjadi pada bulan April, Mei, Juli yaitu 1 mm^3. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 24 hari. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Bulan (*Month*)	Jumlah Curah Hujan *Number of Precipitation* (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) *Number of Rainy Days (day)*
Januari	8	22
Februari	2	17
Maret	5	22
April	1	12
Mei	1	9
Juni	3	12
Juli	1	8
Agustus	-	-
September	2	20
Oktober	2	10
November	4	27
Desember	4	19
Rata-rata	3	14,83

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ desa		Luas Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan Terbangun (jiwa/ha)
		Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
1	KAWALU	0	10	307,62	0	101289	0	25325	329,27
2	TAMANSARI	0	8	255,38	0	81310	0	20331	318,39
3	CIBEUREUM	0	9	280,26	0	71974	0	17998	256,81
4	PURBARATU	0	6	149,89	0	46261	0	11568	308,63
5	TAWANG	0	5	258,28	0	64222	0	16057	248,65
6	CIHIDEUNG	0	6	286,66	0	73991	0	18500	258,11
7	MANGKUBUMI	0	8	322,61	0	100621	0	25158	311,90
8	INDIHIANG	0	6	186,71	0	60332	0	15085	323,13
9	BUNGURSARI	0	7	194,72	0	62957	0	15741	323,32
10	CIPEDES	0	4	269,1	0	83753	0	20940	311,23
		0	**69**	**2511,23**	**0**	**746.710**	**0**	**186.703**	**2.989,44**

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

2.1.5 Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Tasikmalaya. Tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya dirancang untuk mendukung pencapaian visi Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan industri yang maju di Jawa Barat serta perannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priangan Timur-Pangandaran, dengan memanfaatkan keunggulan dan kekhasan yang telah ada sejak lama diantara daerah-daerah lain.

Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Adapun kebijakan tata ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

a. kebijakan pengembangan struktur ruang;
b. kebijakan pengembangan pola ruang; dan
c. kebijakan pengembangan kawasan strategis.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

a. pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
    1) menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
    2) mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala regional.
b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan;
    1) meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan;
    2) mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) dan jalan lingkar luar (*outer ring road*);
    3) meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan;
    4) mengembangkan sistem transportasi massal;
    5) meningkatkan fungsi terminal angkutan umum; dan
    6) meningkatkan integrasi sistem antar moda transportasi.
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum.

1) mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
2) mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
3) mengembangkan prasarana sumber daya air;
4) meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
5) meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
6) mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

Sistem pusat pelayanan Wilayah Kota meliputi:

a. PPK merupakan pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala kota dan regional yang terletak di Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Cipedes.
b. SPK pusat pelayanan umum, perdagangan, dan jasa skala SWK, meliputi:
    1) SPK Cibeureum, terletak di Kelurahan Ciherang, melayani wilayah-wilayah sebagian Kecamatan Purbaratu, sebagian Kecamatan Cibeureum, dan sebagian Kecamatan Tamansari;
    2) SPK Mugarsari, terletak di Kelurahan Mugarsari, melayani sebagian wilayah Kecamatan Tamansari;
    3) SPK Kersamenak, terletak di Kelurahan Kersamenak, melayani wilayah-wilayah sebagian Kecamatan Tamansari dan sebagian Kecamatan Kawalu;
    4) SPK Mangkubumi, terletak di Kelurahan Mangkubumi, melayani wilayah-wilayah sebagian Kecamatan Mangkubumi, sebagian Kecamatan Bungursari, dan sebagian Kecamatan Kawalu; dan
    5) SPK Indihiang, terletak di Kelurahan Sukamaju Kidul, melayani wilayah-wilayah sebagian Kecamatan Bungursari, sebagian Kecamatan Cipedes, dan sebagian Kecamatan Indihiang.
c. PL merupakan pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala lingkungan yang berada di 27 lokasi.

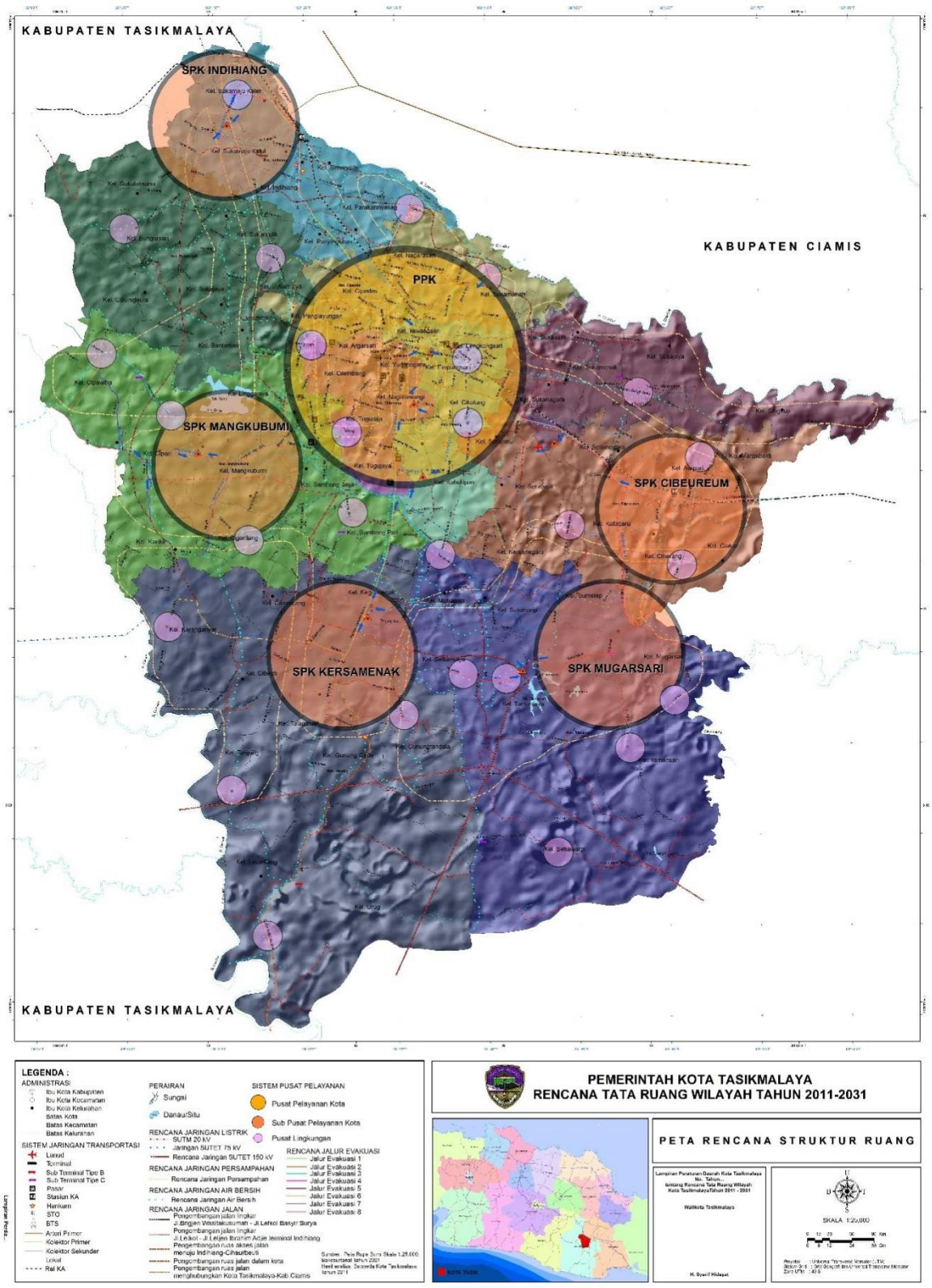

Gambar 2.4 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Tasikmalaya

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

a. kebijakan pengelolaan kawasan lindung; dan

b. kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Kebijakan pengelolaan kawasan lindung meliputi:

a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
   1) menetapkan kawasan yang berfungsi lindung;
   2) mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun; dan
   3) meningkatkan konservasi kawasan yang berfungsi lindung.

b. pelestarian kawasan cagar budaya; dan
   1) menetapkan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai kawasan cagar budaya; dan
   2) memelihara kelestarian kawasan cagar budaya.

c. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota.
   1) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang telah ada;
   2) menetapkan persyaratan penyediaan RTH pada setiap fungsi kegiatan;
   3) mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; dan
   4) mengembangkan pola-pola kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:

a. pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
   1) mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan pinggiran pusat kota; dan
   2) mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota

b. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien.
   1) mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
   2) menerapkan insentif dan disinsentif.

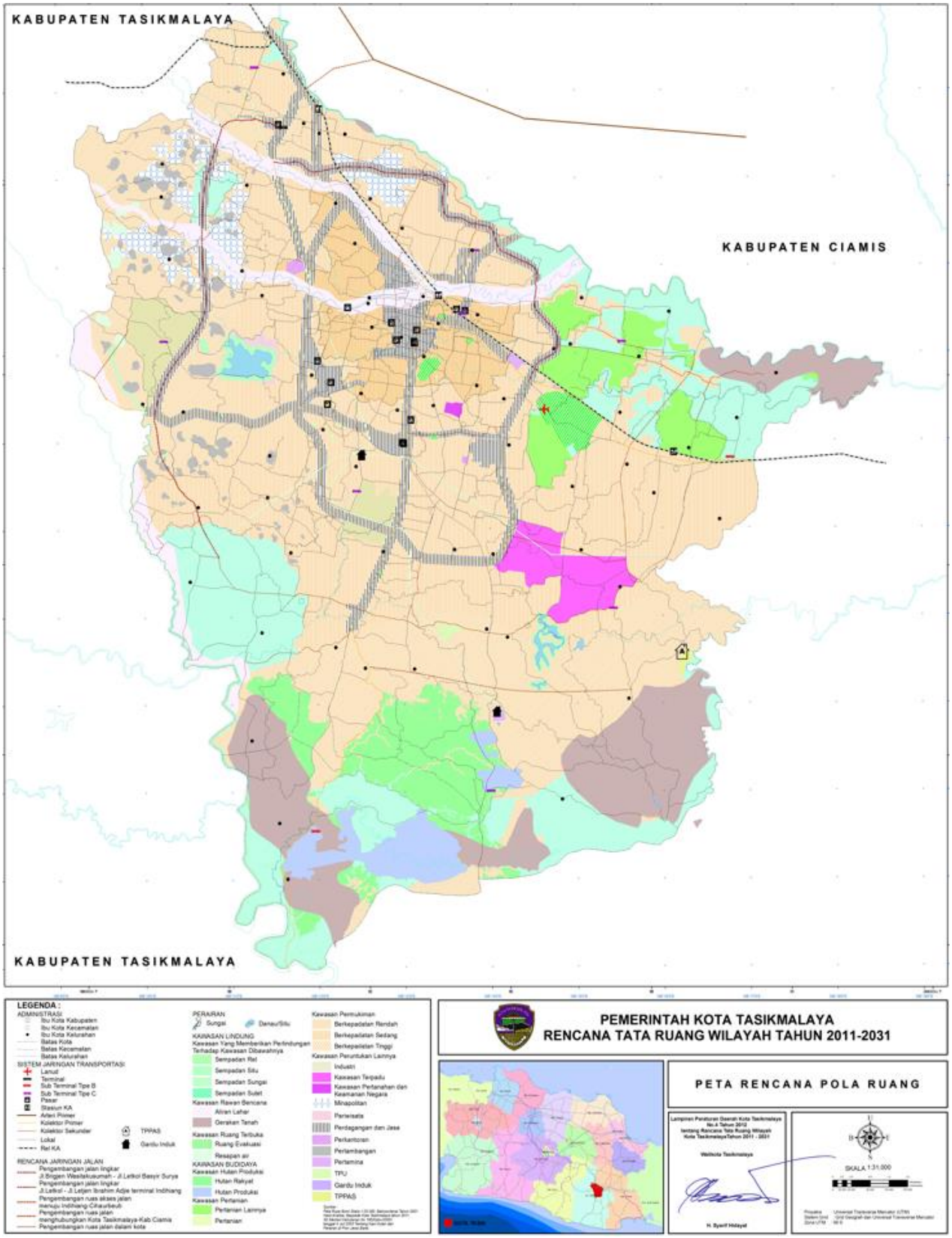

Gambar 2.5 Peta Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

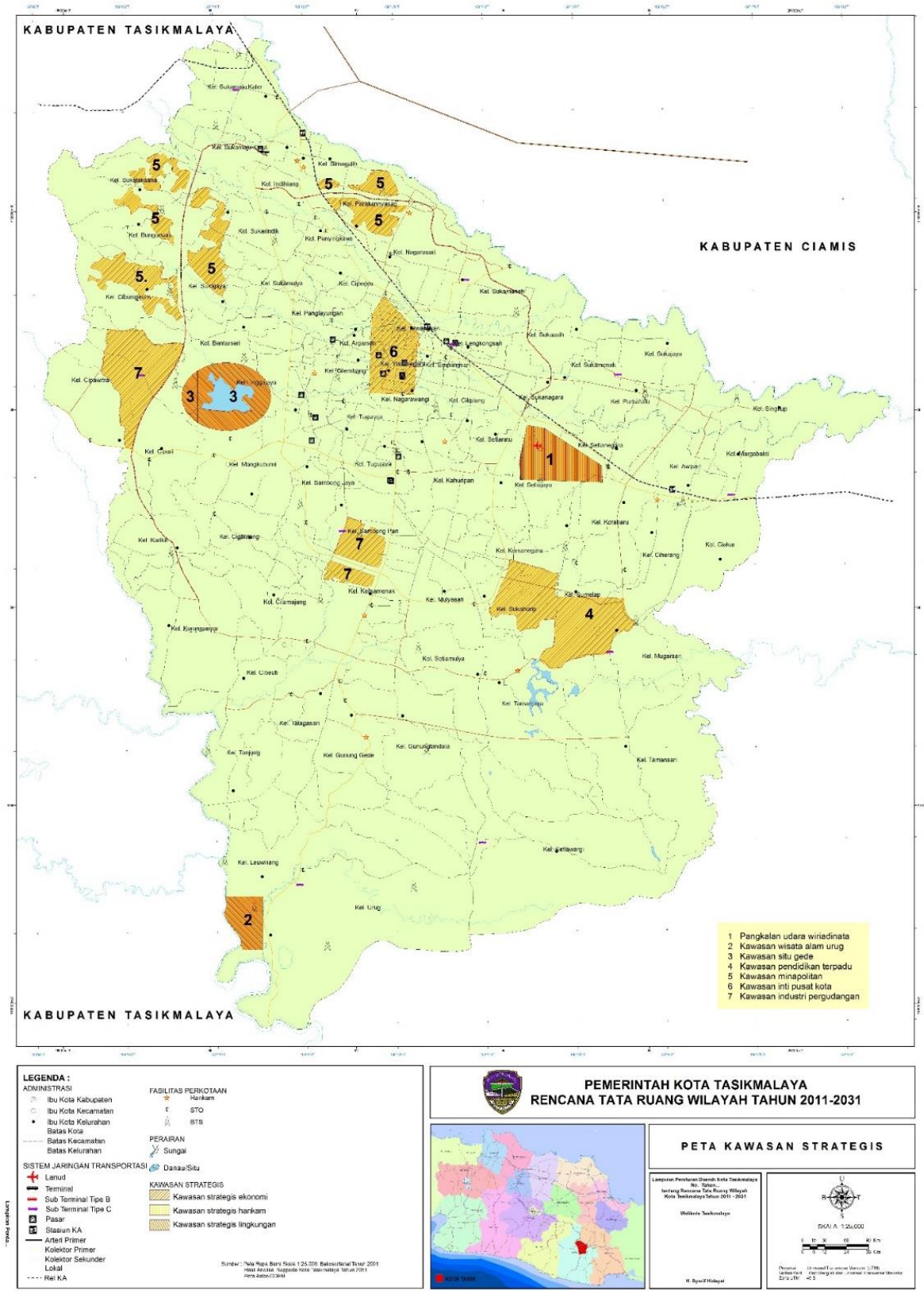

Gambar 2.6 Peta Kawasan Strategis Kota Tasikmalaya

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Kebijakan pengembangan kawasan strategis:

a. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
   1) menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa skala regional;
   2) pengembangan kawasan industri dan pergudangan skala regional;
   3) pengembangan sentra bisnis baru; dan
   4) pengembangan dan penataan sentra-sentra produksi pertanian dan industri kecil dan menegah.

b. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup;
   1) mengatur pemanfaatan kawasan konservasi dengan memadukan perlindungan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan; dan
   2) mengintegrasikan fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan fungsi-fungsi lainnya tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.

c. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
   1) menetapkan kawasan strategis pendidikan; dan
   2) mengintegrasikan kegiatan sosial budaya dengan fungsi-fungsi penunjangnya dan/atau fungsi-fungsi lain yang terkait.

d. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
   1) menata kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
   2) mengoptimalkan fungsi kawasan dengan mengintegrasikan fungsi pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi komersial tanpa mengganggu fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Kawasan strategis di Kota Tasikmalaya terbagi menjadi 3 yaitu Kawasan strategis ekonomi, Kawasan strategis pertahanan dan keamanan, dan Kawasan strategis lingkungan seperti terlihat pada gambar 2.6 diatas.

2.2 Profil Sanitasi Saat Ini

2.2.1 Air Limbah Domestik

(1) Sistem dan infrastruktur

Capaian akses air limbah domestik meliputi, wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, dengan rincian akses air limbah domestik yaitu, akses aman, akses layak, akses layak individu, akses layak bersama, akses khusus perdesaan, akses belum layak BABS tertutup, dan BABS di tempat terbuka. Berikut capaian akses air limbah domestik Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Deskripsi	Capaian	Jumlah (RT)
	Wilayah Perkotaan		
A	**Akses aman**	**4,7%**	**8.822**
B	**Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)**	**27,8%**	**51.816**
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	14,6%	27.300
	Akses Layak Bersama	8,4%	15.694
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,0%	-
C	**Akses Belum Layak**	**37,7%**	**70.357**
D	**BABS Tertutup**	**0,0%**	**-**
E	**BABS di Tempat Terbuka**	**34,1%**	**63.680**

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Dapat terlihat dari tabel diatas bahwa angka BABS 34,1% untuk menjadi prioritas ditangani. Tingginya angka BABS menjadi prioritas dalam penanganan untuk penyelesaian sanitasi buruk di Kota Tasikmalaya. Untuk akses aman masih 4,7%, peningkatan akses aman dapat didorong dengan memanfaatkan idle kapasitas Truk Tinja, IPLT, dan IPAL. Angka capaian akses belum layak 37,7% menggambarkan penduduk yang belum memiliki infrastruktur user interface dan pengolahan yang layak. Ini dapat menjadi potensi sasaran penduduk untuk pembangunan infastruktur SPALD dan SPALDT tanpa perlu didahului dengan pemicuan.

Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat meliputi, pemerintah daerah dan swasta, dengan rincian jumlah truk tinja, status asset, kapasitas, jumlah, volume dan rata-rata truk tinja yang dibuang ke IPLT. Berikut Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat Kota Tasikmalaya,

yang dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	Pemerintah Daerah		
1	Jumlah truk tinja	Unit	3
	Kondisi	operasional	
2	Status aset	Sudah serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD)	
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	M3	3
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	18
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	18
6	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	4
	Swasta		
1	Jumlah truk tinja	Unit	0
2	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	M3	0
3	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	0
4	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	0
5	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	0

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Kondisi sarana pengangkutan air limbah seperti pada gambar dibawah ini menunjukkan ada tersedia truk tinja namun dalam opersionalnya dibutuhkan pemeliharaan.



Gambar 2.7. Sarana Pengangkutan Air Limbah

Sumber: Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, 2023

Sub-Sistem Pengolahan Lupur Tinja (SPALD-Setempat) meliputi, nama IPLT, status asset, kapasitas IPLT, tahun pembangunan, tahun rehabilitasi, wilayah layanan terdekat serta terjauh, sistem yang digunakan, kondisi IPLT, kualitas effluent, fasilittas pendukung, serta kondisi jalan akses. Berikut Sub-Sistem Pengolahan Lupur Tinja (SPALD-Setempat) Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	Satuan	IPLT
	SPALD-S		
1	Sebutkan Nama IPLT	IPLT Singkup	
2	Status aset (pilih)	Sudah terima asset	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	38
4	Tahun pembangunan	2014	
5	Tahun rehabilitasi	2014	
	Wilayah Cakupan Pelayanan		
6	Wilayah layanan terdekat	km	1
7	Wilayah layanan terjauh	km	25
	Deskripsi IPLT		
8	Sistem yang digunakan	Bak penerima-saringan+grease trap - Anaerobic digester - Kolam anaerob-kolam fakultatif-kolam maturasi - Anaerobic digester-sludge drying bed-	

No	Deskripsi	Satuan	IPLT
		pengomposan-pemanfaatan padatan	
9	Kondisi IPLT	Bangunan Baik	
10	Kualitas Effluen	1	
11	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
12	Kondisi jalan akses	Aspal	

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023



Gambar 2.8 Situasi Sarana Pengolahan Air Limbah
Sumber: Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, 2023



Gambar 2.9 Kondisi Sarana Pengolahan Air Limbah
Sumber: Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, 2023

IPLT Singkup berada di Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Lokasi IPLT dilihat dari Citra pada gambar 2.10.



Gambar 2.10 Suasana lingkungan di area IPLT Singkup
Sumber: Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, 2023

Untuk infrastruktur IPALD yang terdata ada 86 (delapan puluh enam) yang terbangun dan tersebar di beberapa kelurahan. Kondisi bangunan saat ini baik, namun dalam pengoperasiannya masih belum semuanya optimal.

Tabel 2.8. Sub Sistem Layanan dan Pengolahan SPAL-D Terpusat

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
1	IPAL Awipari	Kelurahan Awipari	2015	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
2	IPAL Cisalak	Kelurahan Sukamanah	2013	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
3	IPAL Margalaksana/ Nyantong	Kelurahan Kahuripan	2011	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
4	IPAL Paseh	Kelurahan Tuguraja	2016	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
5	IPAL Pesantren Al-Hidayah Kp. Cianjur Kulon	Kelurahan Gunung Tandala	2016	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
6	IPAL Kp. Leuwianyar	Kelurahan Sukamanah	2008	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
7	IPAL Kp. Sengkol	Kelurahan Karsamenak	2009	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
8	IPAL Kp. Cihbihbul	Kelurahan Talagasari	2010	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
9	IPAL Kp. Cisengkol	Kelurahan Tamanjaya	2010	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
10	IPAL Kp. Tarik Kolot Citamiang	Kelurahan Tanjung	2011	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
11	IPAL Kp. Depok	Kelurahan Sukamenak	2011	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
12	IPAL Kp. Paseh	Kelurahan Tuguraja	2012	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
13	IPAL Kp. Selaawi	Kelurahan Tuguraja	2012	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
14	IPAL Kp. Pelang	Kelurahan Sukamanah	2012	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
15	IPAL Kp. Panglayungan	Kelurahan Panglayungan	2013	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
16	IPAL Kp. Sambonghilir	Kelurahan Sambongpari	2013	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
17	IPAL Kp. Sukahurip	Kelurahan Gunung Tandala	2013	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
18	IPAL Kp. Bebedahan	Kelurahan Lengkongsari	2013	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
19	IPAL Kp. Panututan	Kelurahan Tugujaya	2013	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
20	IPAL Kp. Bugelan	Kelurahan Gunung Tandala	2014	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
21	IPAL Kp. Cukang	Kelurahan Tanjung	2014	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
22	IPAL Kp. Rancabendeum	Kelurahan Sukalaksana	2014	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
23	IPAL Kp. Cihideung	Kelurahan Ciakar	2014	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
24	IPAL Kp. Karanganyar	Kelurahan Mugarsari	2014	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
25	IPAL Kp. Urug Lapang	Kelurahan Urug	2015	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
26	IPAL Kp. Cibeuti	Kelurahan Cibeuti	2015	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
27	IPAL Kp. Lewosari	Kelurahan Bantarsari	2015	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
28	IPAL Kp. Tanjungsari	Kelurahan Mulyasari	2015	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
29	IPAL Kp. Gunung Tujuh	Kelurahan Sukarindik	2015	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
30	IPAL Kp. Karoeng	Kelurahan Empangsari	2016	10	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
31	IPAL Kp. Perbu	Kelurahan Mangkubumi	2016	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
32	IPAL Kp. Pamipiran/ Cukang	Kelurahan Tanjung	2016	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
33	IPAL Kp. Sindangresik	Kelurahan Awipari	2016	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
34	IPAL Komunal Kombinasi MCK Kp. Sirah Ranca	Kelurahan Tamansari	2017	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
35	IPAL Komunal Kombinasi MCK Kp. Cisugih	Kelurahan Setiawargi	2017	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
36	IPAL Komunal Kombinasi MCK Kp. Sukasari	Kelurahan Gunung Tandala	2017	6	6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
37	IPAL Komunal Kombinasi MCK Kp. Sukajaya	Kelurahan Urug	2017	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
38	IPAL Komunal Kombinasi MCK Kp. Ciseureuh/ Urug Babakan	Kelurahan Urug	2017	6	6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
39	IPAL Komunal Kombinasi MCK Kp. Rancabungur	Kelurahan Karanganyar	2017	10	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
40	IPAL Komunal Kombinasi MCK Kp. Babakan Cikawung	Kelurahan Margabakti	2017	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
41	IPAL Komunal Kombinasi MCK Kp. Bantargedang	Kelurahan Kersanegara	2017	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
42	IPAL Komunal Kombinasi MCK Kp. Cibeas	Kelurahan Ciherang	2017	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
43	IPAL Komunal Kombinasi MCK Pesantren Al Munawar Jarnauziyyah	Kelurahan Cipawitra	2017	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
44	IPAL Komunal Kombinasi MCK Kp. Gunung Ranji	Kelurahan Karsamenak	2018	12	12	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
45	IPAL Komunal Kombinasi MCK Kp. Ciharashas	Kelurahan Sumelap	2018	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
46	IPAL Komunal Kombinasi MCK Pesantren Bahrul Ulum	Kelurahan Awipari	2018	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
47	IPAL Komunal Kombinasi MCK Pesantren Al Mubarok	Kelurahan Awipari	2018	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
48	IPAL Komunal Kombinasi MCK Pesantren Miftahul Yaqinil Huda	Kelurahan Parakannyasag	2019	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
49	IPAL Komunal Kombinasi MCK Pesantren Miftahul Anwar	Kelurahan Tamansari	2019	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
50	IPAL Komunal Kombinasi MCK Pesantren An Nur Nauziyah	Kelurahan Sukamanah	2019	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
51	IPAL Komunal Kombinasi MCK Pesantren Dawaul Munawar	Kelurahan Tuguraja	2019	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
52	IPAL Komunal Kombinasi MCK Pesantren Darul Ulum	Kelurahan Setiawargi	2019	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
53	IPAL Skala Permukiman Kp. Ciwasmandi	Kelurahan Singkup	2022	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
54	IPAL Skala Permukiman Kp. Panca Tengah	Kelurahan Karikil	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
55	IPAL Skala Permukiman Kp. Bojong Tritura	Kelurahan Panglayungan	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
56	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Cimanggala	Kelurahan Gunung Tandala	2021	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
57	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Ciatal	Kelurahan Tamansari	2021	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
58	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Cibungur	Kelurahan Setiawargi	2021	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
59	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Sindangsono	Kelurahan Setiamulya	2021	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
60	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Sindangsari	Kelurahan Setiamulya	2021	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
61	IPAL Skala Permukiman	Kelurahan Sukamanah	2021	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
	Kombinasi MCK Leuwianyar					pengendapan kedua		Masyarakat (KSM)		
62	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Peundeuy	Kelurahan Linggajaya	2021	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
63	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Bantarsari	Kelurahan Bantarsari	2021	8	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
64	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Awipari Tengah	Kelurahan Awipari	2022	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
65	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Sindangsuka	Kelurahan Gunung Gede	2022	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
66	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Pagaden	Kelurahan Gunung Tandala	2022	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
67	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Pangkalan	Kelurahan Karsamenak	2022	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
68	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Perum Kotabaru Kencana	KelurahanKotabaru	2022	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
69	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Cinagrak	Kelurahan Setiawargi	2022	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
70	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Cibogor Hilir	Kelurahan Sukamanah	2022	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
71	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Rancabeureum	Kelurahan Talagasari	2022	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
72	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Anaka	Kelurahan Urug	2022	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
73	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Bojonggaok	Kelurahan Karanganyar	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
74	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Cicondong	Kelurahan Cibeuti	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
75	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Ciwangsa	Kelurahan Tanjung	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
76	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Cipanengah	Kelurahan Gunung Tandala	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
77	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Sukajaya	Kelurahan Urug	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
78	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Babakanpala	Kelurahan Karsamenak	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
79	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Nagarakasih	Kelurahan Kersanagara	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
80	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Cisengkol	Kelurahan Setiamulya	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
81	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Nagarasari	Kelurahan Tamanjaya	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

No	Nama IPALD	Kelurahan/ Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
82	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Cidolog	Kelurahan Tamansari	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
83	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Nyantong	Kelurahan Mugarsari	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
84	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Ciburuyan	Kelurahan Mulyasari	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
85	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Leuwianyar	Kelurahan Sukamanah	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
86	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kp. Maniis	Kelurahan Linggajaya	2023	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023



Gambar 2.11. Kondisi IPAL

Sumber: Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, 2023

Gambar di atas menunjukkan proses pembangunan IPAL pada tahun 2022 di Kelurahan Empangsari dan Awipari, Kota Tasikmalaya.

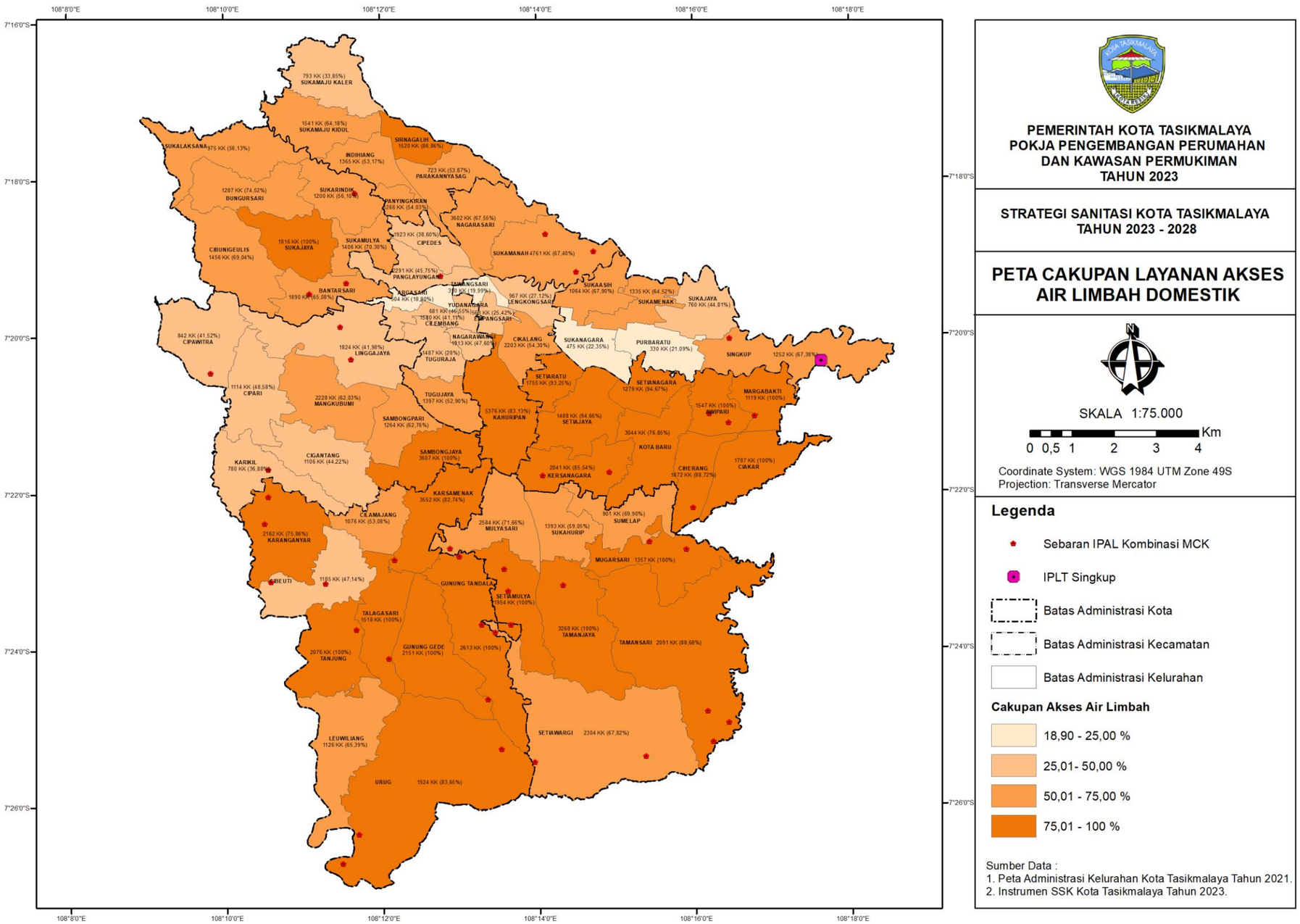

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2028

PETA CAKUPAN LAYANAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK

N

SKALA 1:75.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator

Legenda

- Sebaran IPAL Kombinasi MCK
- IPLT Singkup
- Batas Administrasi Kota
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan

Cakupan Akses Air Limbah

- 18,90 - 25,00 %
- 25,01- 50,00 %
- 50,01 - 75,00 %
- 75,01 - 100 %

Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kelurahan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
2. Instrumen SSK Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Gambar 2.12 Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Tabel 2.9 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2028(%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2023	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya			
1	**Akses Aman**	15 %	20 %	24 %	5,1 %	4,7 %	19,3 %	0,4 %
2	**Akses Layak**	90 %	90 %	100 %	38,8 %	27,8 %	72,2 %	11,0 %
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%	0%	52,3 %	22,2 %	14,6 %	37,7 %	7,5 %
	Akses Layak Bersama	0%	0%	23,7 %	11,5 %	8,4 %	15,3 %	3,1 %
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%	0%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
3	**Akses Belum Layak***	0%	0 %	0 %	61,2 %	37,7 %	-37,7 %	23,5 %
4	**BABS Tertutup**							
5	**BABS di Tempat Terbuka**	0%	0 %	0 %	0.0%	34,1 %	-34,1 %	-34,1 %

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Tabel 2.10 Analisis Keberfungsian

Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	31,58 %
Kapasitas penggunaan truk	33,33 %
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	47,37 %
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	17,97 %
Kapasitas IPLT terhadap total RT	8,51 %
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	100 %
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	-
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	-

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan hasil analisis keberfungsian, untuk infrastruktur SPALD-S, prosentasenya masih dibawah 50%, dan SPALD-T permukiman mencapai 100%. Hal ini terlihat pada hasil analisis gambar Rantai Layanan ALD yang menunjukkan bahwa yang harus ditangani oleh Dinas Kesehatan (STBM) adalah akses belum layak yang mencapai 37,7%,dan BABS yang masih 34,1%.

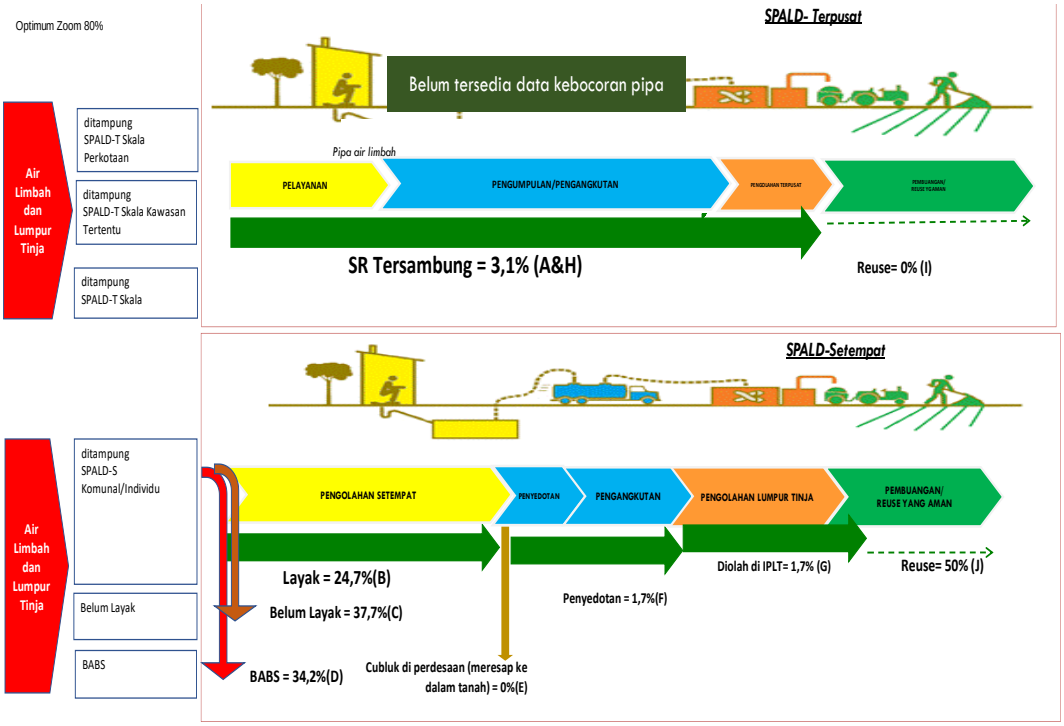

Gambar 2.13 Analisis Rantai Layanan ALD

Keterangan:

A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PU	3,1%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	Dinas PU	3,1%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	0%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PU	27,7%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	37,7%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	0%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas LH	1,7%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT	Dinas LH	1,7%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UPT	50%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	34,2%

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

(2) Kelembagaan dan Kebijakan / Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Aspek kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik, peran pemerintah masih sangat dominan. Beberapa perangkat daerah berkolaborasi dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Tasikmalaya. Secara kelembagaan dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, SKPD terkait pengelolaan air limbah domestik adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11 Kelembagaan Air Limbah Domestik

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bidang Permukiman	**Perwalkot Tasikmalaya no 58 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya** Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kebijakan bidang permukiman meliputi pengembangan permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	penyediaan air minum serta pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan.
	Rincian Tugas Bidang Permukiman : a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Permukiman; b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum serta pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan; c. menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman; d. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; e. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; f. menyelenggarakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan; g. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum serta pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dengan Perangkat Daerah dan unit kerja terkait; h. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum serta pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan; i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Permukiman; j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
UPTD SPALD	**Perwalkot Tasikmalaya no 43 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya UPTD SPALD mempunyai tugas pokok sebagian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan SPALD kepada masyarakat dan mempunyai wilayah kerja di Kota Tasikmalaya UPTD SPALD dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 7 menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan air limbah domestik; b. pengendalian pencemaran air limbah domestik di lingkungan UPTD SPALD c. penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi UPTD d. pemeliharaan sarana prasarana yang berada di lingkungan UPTD SPALD; e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat	**Perwalkot Tasikmalaya no 57 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya** a. menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan b. menyelenggarakan penyusunan bahan kajian, informasi dan media untuk upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya penyelenggaraan gerakan masyarakat hidup sehat; c. mengoordinasikan pegawasan, pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan kesehatan masyarakat; d. menyelenggarakan kerjasama atau kemitraan dalam upaya kesehatan masyarakat;
Dinas Pendidikan	**Perwalkot Tasikmalaya no 72 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya** a. Membuat kebijakan kurikulum terkait perilaku hidup bersih dan sehat khususnya air limbah domestik. b. Menyediakan sarana sanitasi yang sesuai dengan standar.
Dinas LH	**Perwalkot Tasikmalaya no 85 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Lingkungan Hidup**

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	Kota Tasikmalaya a. merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Daerah; b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
Bappelitbangda	**Perwalkot Tasikmalaya no 74 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya** a. menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah b. merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah c. mengarahkan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah d. melaksanaakan koordinasi dengan perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Masing-masing kelembagaan pengelolaan air limbah domestik memilki tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan. Pemetaan tugas dan fungsi pengelolaan air limbah domestik untuk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12. Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	- Bidang Permukiman, DPUTR - Bidang PIK, Bappelitbangda - Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes		
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target	Permukiman		
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Permukiman	UPTD SPALD	

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PENGADAAN SARANA			
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Permukiman	UPTD SPALD	
Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	Permukiman		
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Permukiman		
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	Permukiman		
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Permukiman		
PENGELOLAAN			
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja		UPTD SPALD	
Mengelola IPLT dan atau IPAL		UPTD SPALD	
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja		UPTD SPALD	
Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik		UPTD SPALD	
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB		UPTD SPALD	
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Permukiman	UPTD SPALD	
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	Permukiman	UPTD SPALD	
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestik	Permukiman	UPTD SPALD	
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	Permukiman		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Permukiman	UPTD SPALD	
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	Permukiman	UPTD SPALD	

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	Permukiman	UPTD SPALD	

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

b. Kelembagaan Masyarakat

Peran serta kelembagaan masyarakat mempunyai lingkup dan tingkatannya sendiri, tergantung dari sudut pandang dan harapan yang ada mengenai peran serta yang dikehendaki, peran serta dapat bersifat semu, parsial, dan lengkap. Peran serta semu adalah bentuk peran serta yang bersifat sementara dan sangat jauh dari yang diharapkan atau tidak disertai dengan kesediaan yang sesungguhnya. Peran serta disebut parsial bila perilaku yang ditampilkan hanya sebagian saja dari sesungguhnya yang diharapkan, tetapi dapat juga menjadi lengkap bila sesuai atau mendekati yang diharapkan. Dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Tasikmalaya saat ini yang terdata ada 18 lembaga atau pemerhati yang mengelolah infrastruktur yang tersedia di kelurahan mereka. Beberapa kelompok masyarakat yang belum terdata, karena sebagian merupakan keinginan secara sukarela atau karena banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Berikut ini adalah tabel data lembaga pengelola/kelompok masyarakat yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan air limbah.

Tabel 2.13 Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Tahun 2023

No	Fasilitas Yang Dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok & Tahun Pendirian	Bentuk Lembaga/ Kelompok & Dasar Pembentukan	Jumah anggota/ pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana oprasional	Asset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Kel. Bantarsari Kec. Bungursari	Ksm Al-khoiriyah Bantar	SK Lurah No.440/Kep.16 Kel.2021	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 005 RW.005 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
2	IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Kel. Tamansari Kec. Tamansari	Ksm Cempaka	SK lurah No.18 Kel.Tmsr.2021	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 002 RW.011 Kel.Tamansari Kec. Tamansari	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
3	IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Kel. Setiawargi Kec. Tamansari	Ksm El-Hajj	SK Lurah No. 470/84/pem /2021	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 002 RW 010 Kel. Setiawargi Kec. Tamansari	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
4	IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Kel. Sukamanah Kec. Cipedes	Ksm Istiqomah	SK Lurah No. 006/SK.SKM/2021	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 003 RW 026 Kel.Sukamanah Kec. Cipedes	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif

No	Fasilitas Yang Dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok & Tahun Pendirian	Bentuk Lembaga/ Kelompok & Dasar Pembentukan	Jumah anggota/ pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana oprasional	Asset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
5	IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	Ksm Manba'ul Huda	SK Lurah No. 0475.01-Kel-SK/2021	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 001 RW.010 Kel. Lingga Jaya Kec. Mangkubumi	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
6	Pembangunan IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Kel. Setiamulya Kec. Tamansari	Ksm Mikdar	SK Lurah No. 800/08/IV/Kel Stmly/2021	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 003 RW.006 Kel. Setiamulya Kec.Tamansari	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
7	IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Kel. Gunung Tandala Kec. Kawalu	Ksm Muqita	SK Lurah No. 221/43/kel/2021	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 003 RW.012 Kel. Gunung Tandala Kec. Kawalu	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
8	IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Kel. Setiamulya Kec. Tamansari	Ksm Ngahiji	SK Lurah No. 800/29/Kel-Stmly/2021	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 002/RW.005 Kel. Setiamulya Kec. Tamansari	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif

No	Fasilitas Yang Dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok & Tahun Pendirian	Bentuk Lembaga/ Kelompok & Dasar Pembentukan	Jumah anggota/ pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana oprasional	Asset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
9	IPAL skala permukiman kombinasi MCK Kel. Talagasari Kec. Kawalu	Ksm Al-Barkah	SK Lurah No. 400/Kep.006/Kesra/2022	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 003 RW 001 Kel. Talagasari Kec. Kawalu	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
10	IPAL skala permukiman kombinasi MCK Kel. Urug Kec. Kawalu	Ksm Angkasa	SK Lurah No. 412.6/003/Kel-Urug/2022	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 001 RW 008 Kel. Urug Kec. Kawalu	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
11	IPAL skala permukiman Kel. Singkup Kec. Purbaratu	Ksm Cipancur	SK Lurah No. 440/08/Kel/2022	50 KK	Kebutuhan Ipal warga	RT 004 RW 008 Kel.Singkup Kec. Purbaratu	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
12	IPAL skala permukiman kombinasi MCK Kel. Awipari Kec. Cibeureum	Ksm Hidayatul Ulum	SK Lurah No. 400/07/Kep. Awp/2022	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 001 RW 003 Kel. Awipari Kec.Cibeureum	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif

No	Fasilitas Yang Dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok & Tahun Pendirian	Bentuk Lembaga/ Kelompok & Dasar Pembentukan	Jumah anggota/ pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana oprasional	Asset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
13	IPAL skala permukiman kombinasi MCK Kel. Gunung Gede Kec. Kawalu	Ksm Lestari	SK Lurah No. 22/Kep.13/2022	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 001 RW 009 Kel.Gunungge de Kec. Kawalu	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
14	IPAL skala permukiman kombinasi MCK Kel. Karsamenak Kec. Kawalu	Ksm Mandiri	SK Lurah No. 149/07/Kesra/2022	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 004 RW 007 Kel.Karsamena k Kec. Kawalu	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
15	IPAL skala permukiman kombinasi MCK Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum	Ksm Maryamah	SK Lurah No. 100/011.Kel/2022	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 004 RW 014 Perum Kota Baru Kencana Kel.Kota Baru Kec. Cibeureum	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
16	IPAL skala permukiman kombinasi MCK Kel. Gunung Tandala Kec. Kawalu	Ksm Nurul Hikmah	SK Lurah No. 400/SK.001/IV/2022	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 004 RW 001 Kel. Gunung Tandala Kec. Kawalu	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif

No	Fasilitas Yang Dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok & Tahun Pendirian	Bentuk Lembaga/ Kelompok & Dasar Pembentukan	Jumah anggota/ pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana oprasional	Asset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
17	IPAL skala permukiman kombinasi MCK Kel. Sukamanah Kec. Cipedes	Ksm Pusaka	SK Lurah No. 19/03/pem/2022	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 004 RW 011 Kel. Sukamanah Kec. Cipedes	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif
18	IPAL skala permukiman kombinasi MCK Kel. Setiawargi Kec. Tamansari	Ksm Sadulur	SK Lurah No. 07/Kel.2022	50 KK	Kebutuhan Ipal, Mandi Cuci, Kakus warga	RT 002 RW 008 Kel. Setiawargi Kec. Tamansari	Iuran Warga	Jaringan Perpipaan dan Fasilitas Ipal dan MCK - Dinas PUTR (DAK Sanitasi)	Aktif

Sumber: Dinas PUTR, 2023

c. Pemetaan pemangku kepentingan diluar pemerintah daerah

Pemetaan pemangku kepentingan diluar pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dilakukan untuk mengetahui peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan air limbah domestik seperti peran swasta, BUMD/BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk konstribusinya yang telah ditetapkan secara legitimasi dengan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap peran mereka dalam pengelolaan Air Limbah. Berikut Pemetaan kelembagaan non pemerintah terkait dengan pengelolaan air limbah domestik dapat dilihat pada tabel 2.14

Tabel 2.14 Pemetaan Kelembagaan Non Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	• Legislasi • Penganggaran • Pengawasan	• Badan anggaran terkait Alokasi APBD • Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha/swasta CSR	• Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) • Mendapatkan PROPER	• Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah
Yayasan dan Lembaga lain • Baznas	Pengumpulan dana untuk Pembangunan sarana air minum dan sanitasi	Pemanfaatan dana untuk program air minum dan sanitasi
Yayasan dan Lembaga lain • Nawasena Berseka	Memfasilitasi pembiayaan alternatif sanitasi skala kecil	Permodalan untuk program sanitasi skala kecil
Yayasan dan Lembaga lain • SNV	Memfasilitasi pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan air limbah	Pelaksanaan Kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengelolaan air limbah

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Dalam mengelola air limbah di Kota Tasikmalaya, jika dilihat dari tabel diatas telah memiliki kekuatan dalam mengawal pengelolaan air limbah domestik hanya saja kontribusinya masih perlu di ingatkan lagi oleh OPD terkait dan

bisa di libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang membuat para pemangku kepentingan ini merasa bahwa pentingnya peran mereka dalam percepatan pembangunan sanitasi di daerah ini. Berikut ini adalah tabel keterlibatan dan kontribusinya:

Tabel 2.15 Pemetaan Kontribusi Kelembagaan Non Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya keterlibatan
Anggota Legislatif	• Badan anggaran terkait Alokasi APBD • Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Pengusaha/ swasta • CSR	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Rendah	Rendah	Tinggi
Yayasan dan Lembaga lain • Baznas	Pemanfaatan dana untuk program air minum dan sanitasi		Sedang	Sedang	Tinggi
Yayasan dan Lembaga lain • Nawasena Berseka	Permodalan untuk program sanitasi skala kecil		Sedang	Sedang	Tinggi

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

d. Regulasi

Regulasi berisi tabel yang memberikan penjelasan terkait peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait air limbah domestik yang ada di Kota Tasikmalaya. Adapun tabel pemetaan regulasi daerah terkait air limbah domestik dapat dilihat pada tabel 2.16

Tabel 2.16 Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

No	Pemetaan Regulasi Daerah		
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak ada
		√	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaran Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	√ Pasal 7	
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	√ Pasal 22	
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	√ Pasal 37 (kelembagaan) Pasal 42 (pembiayaan)	
d	Substansi pembinaan dan pengawasan	√ Pasal 44	
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		√	
6	Sebutkan semua turunan andate Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada		
	- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik - Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Ada	Belum Ada
		√	

Sumber: Perda Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah

(3) Komunikasi dan media

Komunikasi dan media berisi kegiatan komunikasi terkait dengan promosi hygine dan sanitasi, peta media komunikasi dan kerjasama terkait sanitasi di Kota Tasikmalaya. Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygine dan Sanitasi dapat dilihat pada tabel 2.17

Tabel 2.17. Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygine dan Sanitasi terkait Air Limbah

No.	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pemicuan STBM	2013-saat ini	Dinas Kesehatan	Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari hari	Masyarakat Kelurahan prioritas yang menurut kajian EHRA memiliki Indek Risiko Sanitasi Tertinggi	Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menjijikan, memalukan dan membuat sakit, karenanya perlu kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, Membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal
2	Germas (Gerakan Masyarakat Sehat)	2020-saat ini	Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat serta menumbuhkan budaya hidup sehat masyarakat	Masyarakat Kota Tasikmalaya	Membangun kesehatan masyarakat perlu seluruh stakeholder yang meliputi pemerintah, swasta, pendidikan termasuk media memegang peranan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Pelaksanaan upaya dan strategi germas secara efektif di masyarakat perlu diupayakan
3	Deklarasi ODF	2017-saat ini	Dinas Kesehatan	Mendorong kelurahan di Kota Tasikmalaya untuk segera menyatakan kelurahan sudah ODF	Kelurahan di Kota Tasikmalaya	motivasi masyarakat sehingga terwujud Kota Tasikmalaya sebagai Kota ODF/Stop BABS Tahun 2023 dan menjadi pendorong masyarakat untuk senantiasa berprilaku hidup bersih dan sehat.	rendahnya capaian ODF juga dapat menghambat keikutsertaan Kota Tasikmalaya dalam penilaian Kota Sehat karena salah satu persyaratan keikutsertaan Kota Sehat ialah capaian ODF sekurang-kurangnya 80 persen

No.	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
4	Kampanye Jahe Asik (Jamban Sehat)	2022-saat ini	Dinas PUTR	Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengggunakan sarana sanitasi yang sehat dan aman	Masyarakat Kota Tasikmalaya	Mengggunakan sarana sanitasi yang sehat dan aman khususnya dalam membuang limbah tinja sehingga diharapkan tidak ada lagi badan air ataupun saluran terbuka yang dijadikan tempat buangan air tinja	Masyarakat semakin sadar dengan bahaya buang air besar sembarangan, serta turut berperan aktif dengan secara sadar dan mandiri menyediakan sarana pembuangan tinja yang sehat dan aman
5	Sosialisasi layanan penyedotan lumpur tinja	2019-saat ini	Dinas PUTR	Mewujudkan lingkungan sehat sebagai upaya mengatasi persoalan sanitasi	Masyarakat Kota Tasikmalaya	Septik tank yang baik dan juga standart dilakukan penyedotan selama 4 tahun sekali untuk mencegah terjadinya pencemaran air	Masyarakat semakin sadar akan pentingnya penyedotan septik tank sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sanitasi
6	Jawara ODF	2019-saat ini	Dinas Kesehatan	Mendorong kelurahan di Kota Tasikmalaya untuk segera menyatakan kelurahan sudah ODF	Kelurahan di Kota Tasikmalaya	Motivasi masyarakat sehingga terwujud Kota Tasikmalaya sebagai Kota ODF/Stop BABS Tahun 2023 dan menjadi pendorong masyarakat untuk senantiasa berprilaku hidup bersih dan sehat.	Rendahnya capaian ODF juga dapat menghambat keikutsertaan Kota Tasikmalaya dalam penilaian Kota Sehat karena salah satu persyaratan keikutsertaan Kota Sehat ialah capaian ODF sekurang-kurangnya 80 persen
7	Hygine Sanitasi Sekolah	2017-saat ini	Dinas Kesehatan	Mendorong siswa untuk berperilaku bersih dan sehat	Siswa sekolah	Memberikan informasi pentingnya sanitasi dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku bersih dan sehat	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan semenarik mungkin untuk menarik minat siswa dan mengimplementasikan perilaku hidup bersih dan sehat

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Tabel 2.18. Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Air Limbah

No.	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	Radio	Masyarakat Umum Kota Tasikmalaya	Produksi dan penyiaran dari Radio, narasumber dan data informasi dari Pokja PKP	Keterlibatan Masyarakat untuk Hidup Sehat	Bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Responden masyarakat Mendengar informasi tentang Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2	Sosial media Instagram: @kominfo_pemkot_tasik @dinkes.kota.tasikmalaya @dputr_tasik	Masyarakat Umum Kota Tasikmalaya	Data dan informasi dari masing-masing Dinas	Mendorong perilaku bersih dan sehat dengan sanitasi yang sehat dan aman	Bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Responden masyarakat Mendengar informasi tentang Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3	Televisi lokal (Radar TV)	Masyarakat Umum Kota Tasikmalaya	Data dan informasi dari masing-masing Dinas	Mendorong perilaku bersih dan sehat dengan sanitasi yang sehat dan aman	Bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Responden masyarakat Mendengar informasi tentang Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4	Koran Elektronik (Radar)	Masyarakat Umum Kota Tasikmalaya	Data dan informasi dari masing-masing Dinas	Mendorong perilaku bersih dan sehat dengan sanitasi yang sehat dan aman	Bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Responden masyarakat Mendengar informasi tentang Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

2.2.2 Pengelolaan Sampah

(1) Sistem dan Infrastruktur

Capaian akses layanan sampah perkotaan meliputi, pengurangan sampah, penanganan sampah dan sampah yang tidak dikelola. Berikut capaian akses layanan sampah perkotaan Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	16,5%
2	Penanganan Sampah	65,1%
3	Sampah Tidak Terkelola	18,4%
Total		100%

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Timbulan Sampah

Timbulan sampah meliputi, timbulan sampah rumah tangga, perkotaan dan pedesaan serta data komposisi sampah. Berikut timbulan sampah Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20. Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan Sampah Rumah Tangga	Ton/hari	560,04
	- Perkotaan	Ton/hari	560,04
	- Perdesaan	Ton/hari	-
	Data komposisi sampah (apabila ada)	% Organik	48
		% Anorganik	52
2	Timbulan Sampah Non Permukiman	Ton/hari	-

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan laporan akhir kajian timbulan sampah pada tahun 2017 untuk data timbulan sampah di daerah non permukiman diperoleh sampah organik sebesar 48% dan sampah anorganik 52%. Untuk tahun 2023 perkembangan terakhir sedang dalam kajian.



Gambar 2.14 Motor Roda Tiga

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023



Gambar 2.15 Dump Truck

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023

Pengumpulan

Pengumpulan meliputi, jumlah infrastruktur pengumpulan, kapasitas angkut dan ritasi. Berikut pengumpulan Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	Unit	100
	Gerobak Motor	Unit	28
	Pick Up	Unit	0
	Becak	Unit	0
2	Kapasitas angkut (total)		
	Gerobak	M3	150
	Gerobak Motor	M3	42
	Pick Up	M3	0

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	Becak	M3	0
3	Ritasi	Rit/hari	3

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Penampungan Sementara dan Pengangkutan

Penampungan sementara dan pengangkutan meliputi, jumlah TPS, kapasitas TPS, jumlah alat angkut, kapasitas alat angkut, ritasi pengangkutan. Berikut penampungan sementara dan pengangkutan Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	Unit	2
	TPS	Unit	22
	Kontainer	Unit	66
	Tong Sampah Pejalan Kaki	Unit	500
2	KapasitasTPS		
	Transfer depo	M3	6
	TPS	M3	4
	Kontainer	M3	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	M3	1
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truck	Unit	0
	Arm Roll Truck	Unit	12
	Dump Truck	Unit	27
	Pick Up	Unit	3
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truck	M3	0
	Arm Roll Truck	M3	72
	Dump Truck	M3	162
	Pick Up	M3	12
5	Ritasi pengangkutan	Rit/hari	3

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan data yang ada, untuk keberfungsian infrastruktur Sampah di setiap kecamatan Kota Tasikmalaya telah tersedia, namun sebagian perlu perawatan dan penanganan, karena kondisinya belum memenuhi standar pemeliharaan. Dan penempatannya masih berada di lingkungan yang

mengganggu lingkungan setempat karena tidak baik dilihat langsung dan merusak pemandanga/ view sekitarnya. Penanganan pengangkutan masih belum sesuai dengan jam pengoperasian. Sehingga saat jam kerja, masih terlihat adanya pengangkutan sampah dan pembuangan sampah tidak pada jam yang telah ditentukan. Masyarakat dalam membuang sampah belum memilah sesuai dengan jenis sampahnya.



Gambar 2.16. Kondisi Container Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023



Gambar 2.17 Kontainer kurang Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023

Pengolahan

Pengelolaan meliputi, jenis pengolahan (TPS3R/ bank sampah), lokasi, kodisi pengelolaan, tahun pembangunan, tahun optimalisasi, kegiatan pengurangan, jumlah sampah masuk, jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku/kompos, jumlah sampah residu yang dibawa ke TPA pengelola, status aset. Berikut pengelolaan Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Pengolahan Sampah

No.	
Pengolahan (Pusat Daur Ulang/ TPST/ Biodigester/ Insenerator)	Tidak ada TPST
Lokasi	-
Wilayah Cakupan Layanan	-
Kondisi Pengelolahan (Beroperasi/Tidak)	-
Tahun Pembangunan	-
Tahun Optimalisasi (jika ada)	-
Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/dll)	-
Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	-
Jumlah Sampah yang terolah menjadi bahan baku/kompos (ton/hari)	-
Jumlah Sampah Residu yang dibawah ke TPA	-
Pengolahan (KSM/Dinas/UPTD)	-
Status Aset	-

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Kota Tasikmalaya, saat ini untuk pengolahan TPST belum tersedia, yang ada hanyalah TPS 3R, Bank Sampah dan Sektor informal yang sudah bekerjasama dengan pemda dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.

Pemprosesan Akhir

Pemprosesan akhir meliputi nama dan lokasi TPA, wilayah pelayanan, tahun pembangunan, tahun optimalisasi, usia pakai TPA, luas lahan luas sel terbangun, sistem TPA, kondisi TPA, alat berat, ketersediaan jembatan

timbang, dan lainnya. Berikut pemprosesan akhir Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Pemrosesan Akhir Sampah

No	Deskripsi	Satuan	TPA
1	Nama dan Lokasi TPA	TPA Ciangir	Kecamatan Tamansari
	Wilayah Pelayanan		10 Kecamatan, 69 Kelurahan
2	Tahun pembangunan	2002	
	Tahun Optimalisasi	2012	
	Usia Pakai TPA (tahun)	25	
3	Status aset (pilih salah satu)	Sudah	
4	Luas lahan	Ha	11
5	Luas sel terbangun	Ha	8.8
6	Sistem TPA yang digunakan	Open Dumping	
7	Kondisi TPA	Beroperasi	
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Bulldozer: 1, Excavator: 1 (1 buah menyewa)
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	1 unit
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Aspal
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	253,18
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya: ….)	Ton/hari	100
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	Tidak ada
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secaraa rutin (3-6 bulan sekali)	0	Tidak Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	1
17	Umur Teknis TPA	tahun	8
18	Tinggi timbunan sampah eksisting	meter	5
19	Hari operasi	hari/tahun	360
20	Jenis TPA	(Regional/Kabupaten)	Kabupaten

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya



Gambar 2.18 Kondisi dan situasi TPA Ciangir

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023

Pengurangan sampah

Pengurangan sampah merupakan pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan pada sumbernya oleh masyarakat. Pengurangan sampah di Kota Tasikmalaya dilakukan melalui TPS3R, Bank Sampah, serta sektor informal yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Data pengurangan sampah meliputi, jenis pengolahan (TPS3R/ bank sampah), lokasi, kodisi pengelolaan, tahun pembangunan, tahun optimalisasi, kegiatan pengurangan, jumlah sampah masuk, jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku/kompos, jumlah sampah residu yang dibawa ke TPA pengelola, status aset. Berikut pengelolaan Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Tabel 2.25

Tabel 2.25. Pengurangan Sampah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	TPS 3R	RW. 01 Kel. Parakanyasag Kec. Indihiang	Beroperasi	2014	-	Pengomposan dan Daur Ulang	0.75	0.750	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
2	TPS 3R	Ciangir, Kecamatan Tamansari	Beroperasi	2021	-	Pengomposan dan Daur Ulang	0.57	0.500	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
3	Bank Sampah	Kel. Sukanagara, Kec. Purbaratu (Ucu S)	Beroperasi	2020	-	Tabungan Sampah	0.15	0.15	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
4	Bank Sampah	Kel. Sukanagara, Kec. Purbaratu (Nunung)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.29	0.29	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
5	Bank Sampah	Kel. Sukanagara, Kec. Purbaratu (Yana H)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.07	0.07	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
6	Bank Sampah	Kel. Sukamanah, Kec. Cipedes (Eti S)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.23	0.23	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
7	Bank Sampah	Kel. Sukamaju, Kel. Indihiang (Kadir)	Beroperasi	2020	-	Tabungan Sampah	0.45	0.45	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
8	Bank Sampah	Kel. Parakanyasag, Kec. Indihiang (Suparyono)	Beroperasi	2020	-	Tabungan Sampah	0.54	0.54	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
9	Bank Sampah	Kel. Panyingkiran, Kec. Indihiang (Yaya SS)	Beroperasi	2020	-	Tabungan Sampah	0.70	0.70	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
10	Bank Sampah	Kel. Tugujaya Kec. Cihideung	Beroperasi	2020	-	Tabungan Sampah	0.63	0.63	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
11	Bank Sampah	Kel. Margabakti, Kec. Cibeureum (Ade S)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.28	0.28	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
12	Bank Sampah	Kel. Setianagara, Kec. Cibeureum (Dodi, K)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.50	0.50	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
13	Bank Sampah	Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum (Asep E)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.50	0.50	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
14	Bank Sampah	Kel. Kotabaru, Kec. Cibeureum (Darman Y)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.10	0.10	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
15	Bank Sampah	Kel. Kotabaru, Kec. Cibeureum (Iri)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.28	0.28	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
16	Bank Sampah	Kel. Kota Baru, Kec. Cibeureum (Aldy J)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	2.26	2.26	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
17	Bank Sampah	Kel. Kersanagara, Kec. Cibeureum (Nandang)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.21	0.21	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
18	Bank Sampah	Kel. Ciherang, Kec. Cibeureum (Moch H. I)	Beroperasi	2020	-	Tabungan Sampah	0.60	0.60	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
20	Bank Sampah	Kel. Cikalang, Kec. Tawang (Agus S)	Beroperasi	2020	-	Tabungan Sampah	0.14	0.14	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
21	Bank Sampah	Kel. Kahuripan, Kec. Tawang (Angga J)	Beroperasi	2020	-	Tabungan Sampah	1.47	1.47	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
22	Bank Sampah	Kel. Kahuripan, Kec. Tawang (Anwar S)	Beroperasi	2020	-	Tabungan Sampah	0.28	0.28	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
23	Bank Sampah	Kel. Sambongpari, Kec. Mangkubumi (Nanang T)	Beroperasi	2020	-	Tabungan Sampah	0.25	0.25	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
24	Bank Sampah	Kel. Setiamulya, Kec. Tamansari (Al Imron)	Beroperasi	2020	-	Tabungan Sampah	0.30	0.30	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
25	Bank Sampah	Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu (Yuyu W)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.26	0.26	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
26	Bank Sampah	Kel. Setianagara, Kec. Cibeureum (Rifki M)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.33	0.33	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
27	Bank Sampah	Kel. Sukamaju Kaler, Kec. Indihiang (Mas Don)	Beroperasi	2022	-	Tabungan Sampah	0.48	0.48	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
28	Bank Sampah	Kel. Ciherang, Kec. Cibeureum (Dian)	Beroperasi	2022	-	Tabungan Sampah	0.23	0.23	0.002	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
29	Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup (Bank Sampah Induk)	Beroperasi	2021	-	Tabungan Sampah	0.20	0.20	0.00118	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
30	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Gub. Sewaka	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
31	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Ciranjang Benda	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
32	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Bebedahan 2	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
33	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Ir H. Juanda (H Ato)	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	4.94	4.94	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
34	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Belakang Terminal Indihiang	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
35	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Babakan Kaum RT.02/RW.02	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
36	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Ir. H Juanda	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	4.56	4.56	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
37	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	JL. Laswi	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
38	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Hj Oce Sukanagara Purbaratu	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
39	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Sambong Pari	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
40	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Kolonel Baasyir Surya	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
41	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Letnan Harun	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
42	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Sambong Pari kulon	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	17.23	17.23	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
43	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Letjen Mashudi	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
44	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Bantar	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
45	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Gub.Sewaka	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
46	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Cilembang	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
47	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Bebedilan Cilembang	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
48	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Bojong Tengah	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
49	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Paseh	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
50	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Gobras	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	11.53	11.53	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
51	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Cipedes 1	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
52	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. BKR	Beroperasi	2021	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
53	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. A.H Witono Cikurubuk	Beroperasi	2022	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
54	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Cigeureung	Beroperasi	2022	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
55	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Air Tanjung	Beroperasi	2022	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
56	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Mashudi	Beroperasi	2022	-	Pengepul Sampah	5.07	5.07	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
57	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl. Ciumbeng Indihiang	Beroperasi	2022	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Jl.Mangin		2022	-	Pengepul Sampah	5.00	5.00	0.00001	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya memiliki TPS untuk penempatan Kontainer Amroll, berikut ini terdapat dokumentasi terbaru dan kondisi dari sarana prasarana yang ada di 10 Kecamatan.



Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang



Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang



Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu

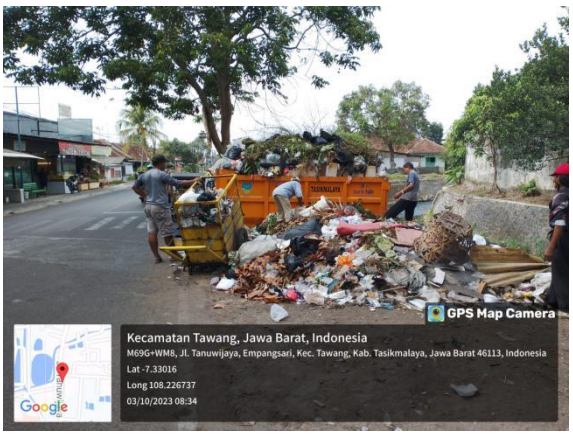

Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang



Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes

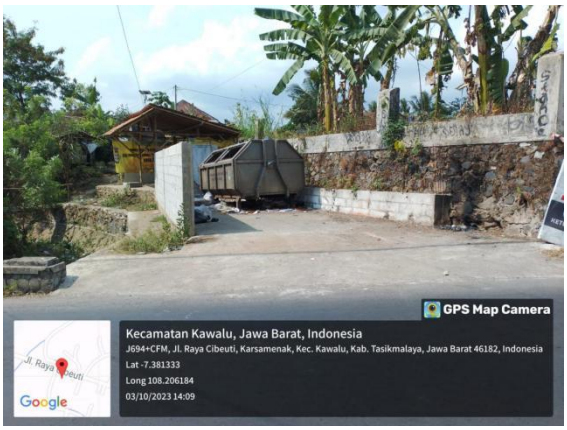

Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu

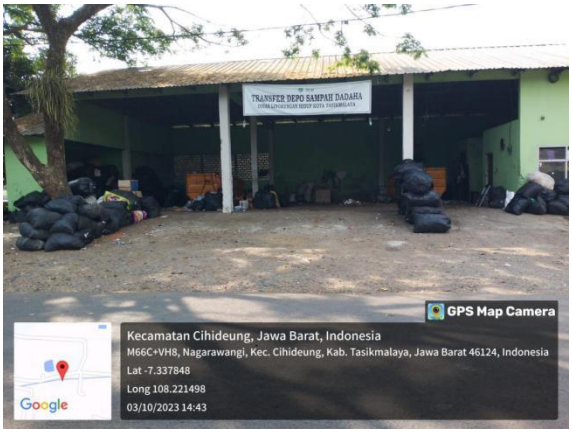

Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideung



Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari



Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang

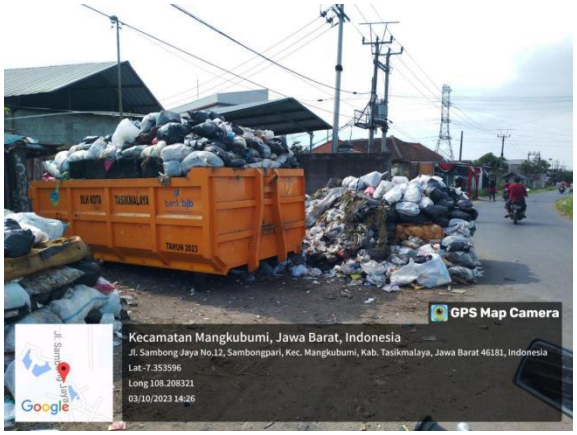

Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi

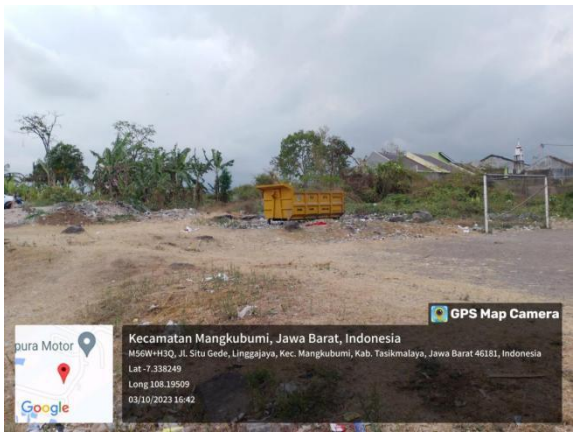

Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi



Kelurahan Panglayungan Kelurahan Cipedes



Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari



Kelurahan Cikurubuk, Kecamatan Mangkubumi



Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung



Kelurahan Linggarjaya, Kecamatan Mangkubumi

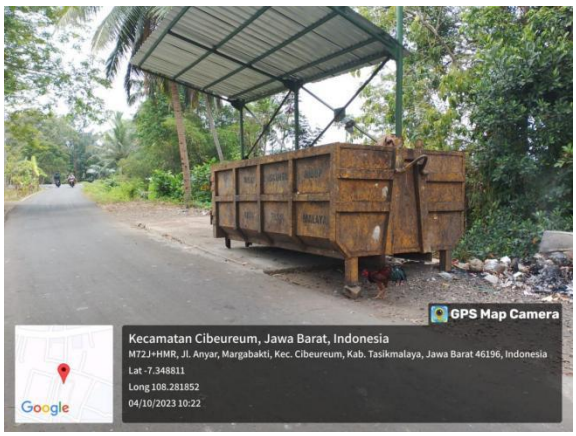

Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum



Kelurahan Yudanagara, Kecamatan Cihideung



Kelurahan Sukamajukidul, Kecamatan Indihiang



Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung



Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang



Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu





Gambar 2.19 Bank Sampah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kota Tasikmalaya, 2023

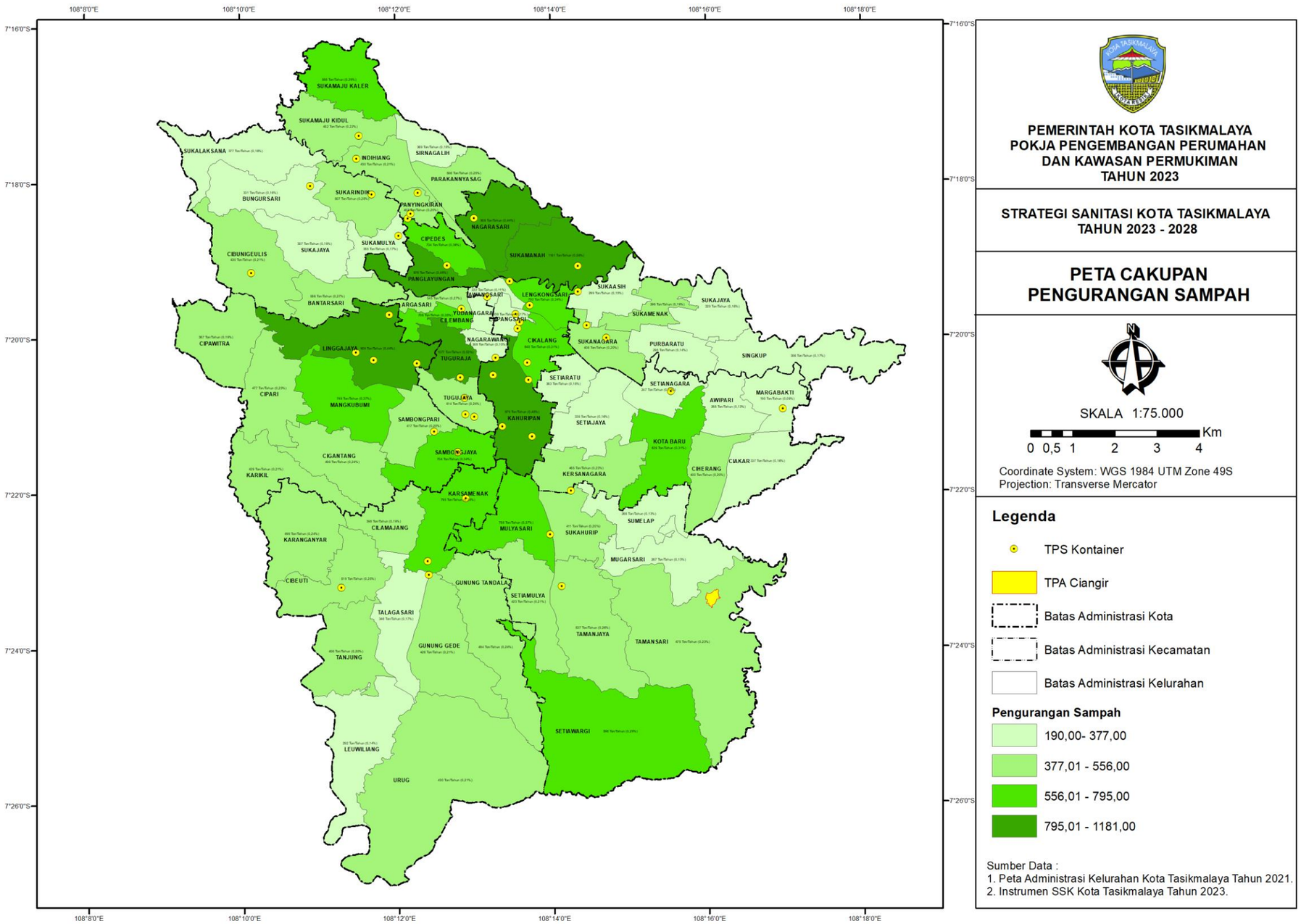

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2028

PETA CAKUPAN PENGURANGAN SAMPAH

N

SKALA 1:75.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator

Legenda

- TPS Kontainer
- TPA Ciangir
- Batas Administrasi Kota
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan

Pengurangan Sampah

- 190,00- 377,00
- 377,01 - 556,00
- 556,01 - 795,00
- 795,01 - 1181,00

Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kelurahan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
2. Instrumen SSK Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Gambar 2.20 Peta Cakupan Pengurangan Sampah

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

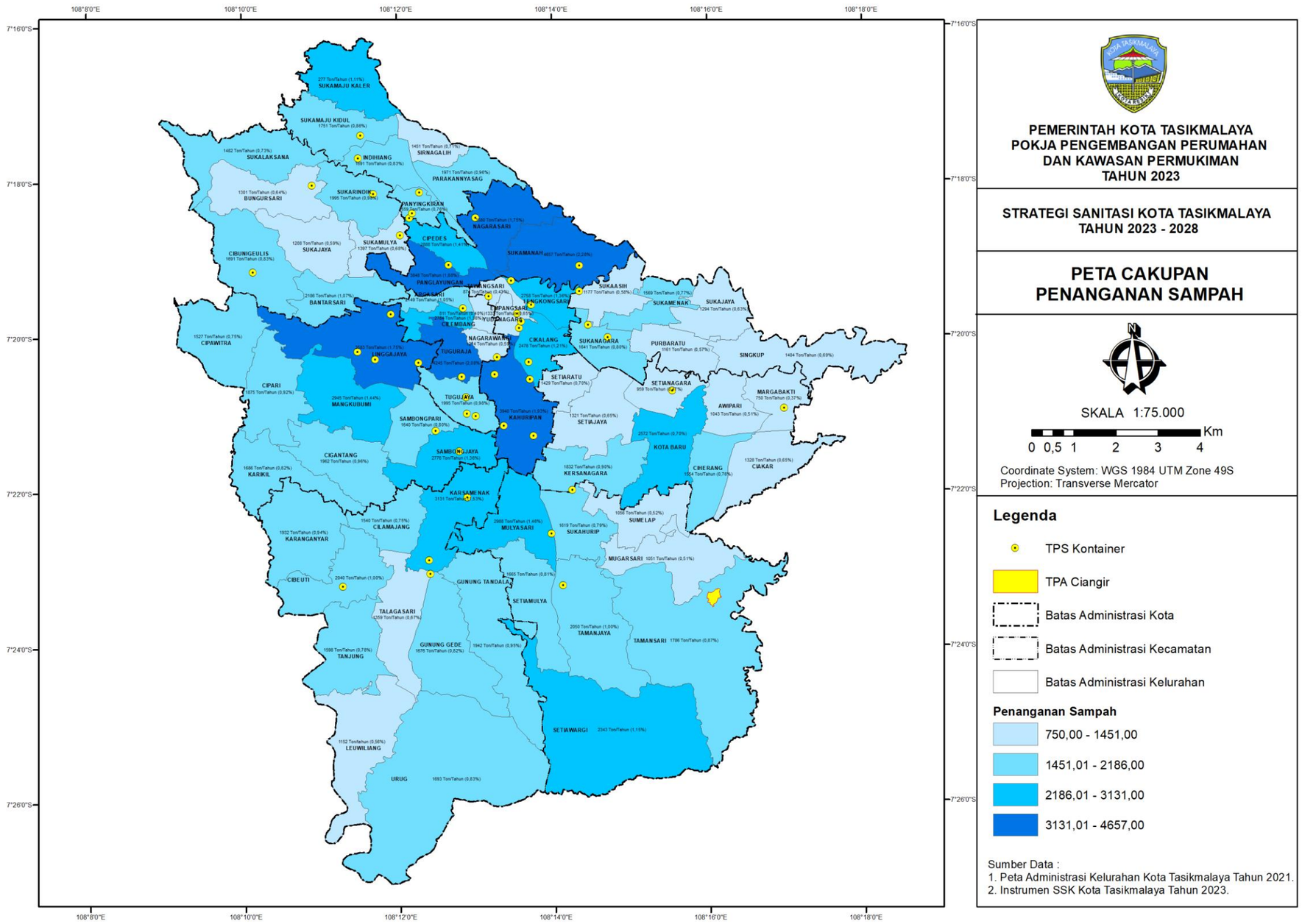

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2028

PETA CAKUPAN PENANGANAN SAMPAH

N

SKALA 1:75.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator

Legenda

- TPS Kontainer
- TPA Ciangir
- Batas Administrasi Kota
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan

Penanganan Sampah

- 750,00 - 1451,00
- 1451,01 - 2186,00
- 2186,01 - 3131,00
- 3131,01 - 4657,00

Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kelurahan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
2. Instrumen SSK Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Gambar 2.21 Peta Cakupan Penanganan Sampah

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2020-2024.

Analisis gap pencapaian akses sampah perkotaan meliputi, penanganan dan pengurangan sampah perkotaan. Berikut analisis gap pencapaian akses sampah perkotaan Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26. Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2028 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2023	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya			
1	**Penanganan Sampah Perkotaan**	**80%**	83.0%	70.0%	71.0%	65,1%	4,9%	5,9%
2	**Pengurangan Sampah Perkotaan**	**20%**	17.0%	30.0%	28.0%	16,5%	13,5%	11,5%

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Analisis Rantai Layanan Sanitasi:

Analisis rantai layanan sanitasi meliputi, penanganan dan pengurangan di wilayah perkotaan. Berikut analisis rantai layanan sanitasi Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Gambar 2.21.

Keterangan :

		Ton/tahun	Persentase (%)
A	Total Timbulan sampah perkotaan	204.411,86	100,00%
B	Jumlah Sampah Tereduksi di TPS 3R	446,02	0,22%
C	Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah	1.055,95	0,52%
D	Jumlah sampah terolah di TPST	-	0,00%
E	Jumlah sampah tereduksi di sektor informal	33.260,63	16,27%
F	Jumlah residu TPS 3R yang masuk dan diproses di TPA	470,74	0,23%
G	Jumlah residu TPST yang masuk dan diproses di TPA	-	0,00%
H	Jumlah sampah yang diproses di TPA dari Pengangkutan Langsung (Rumah - TPA) dan pengumpulan tidak langsung (Rumah - TPS - TPA)	132.653,95	64,90%
I	Jumlah residu TPS 3R yang tidak terkelola	-	0,00%
J	Jumlah residu TPST yang tidak terkelola	-	0,00%
K	Jumlah total sampah diproses di TPA	133.124,69	65,13%
L	Jumlah total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di tingkat rumah tangga)	69.785,20	34,14%

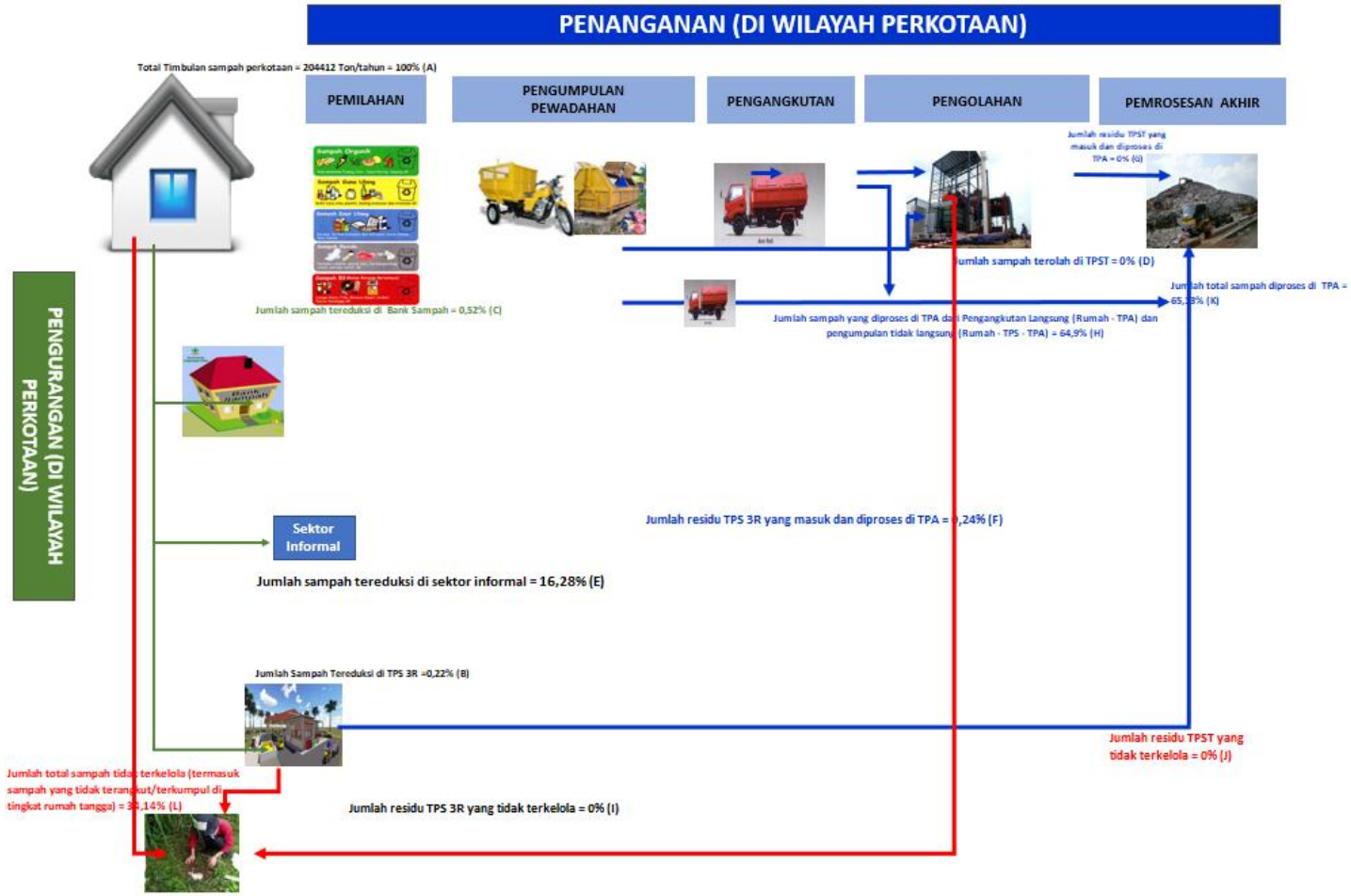

Gambar 2.22 Rantai Layanan Sanitasi Kota Tasikmalaya

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

(2) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Aspek kelembagaan dalam pengelolaan persampahan, peran pemerintah masih sangat dominan. Beberapa perangkat daerah berkolaborasi dalam pengelolaan persampahan di Kota Tasikmalaya. Secara kelembagaan dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, SKPD terkait pengelolaan persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah terkait Persampahan

Dinas/Badan/ Lembaga Daerah	Tugas dan Fungsi
Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	**Perwalkot Tasikmalaya no 85 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya** a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pengelolaan Sampah; b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan kemitraan lingkungan hidup; c. mengoordinasikan penyelenggaraan penanganan sampah dan pengurangan sampah; d. mengoordinasikan upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat serta kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengelolaan sampah; e. mengoordinasikan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan; f. mengoordinasikan fasilitasi dan pengawasan pemenuhan ketentuan dan kewajiban perizinan di bidang pengelolaan sampah; g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengelolaan Sampah; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
UPTD TPA Sampah Dinas Lingkungan	**Perwalkot Tasikmalaya no 26 Tahun 2018 Tentang Pembantukan** a. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD TPA; b. menyusun kebijakan teknis operasional UPTD TPA; c. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD TPA; d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan

Dinas/Badan/ Lembaga Daerah	Tugas dan Fungsi
	atau Unit Kerja lain; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD TPA;
Bappelitbangda	**Perwalkot Tasikmalaya no 74 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya** ✓ menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah ✓ merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah ✓ mengarahkan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah ✓ melaksanaakan koordinasi dengan perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Tabel 2.28 Pemetaan Tugas dan Fungsi terkait Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten/kota,	Bidang Pengelolaan Sampah DLH, Bappelitbangda		
• Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Membangun sarana TPA	Bidang Pengelolaan Sampah DLH	UPTD TPA	

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
• Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dll)	Bidang Pengelolaan Sampah DLH	UPTD TPA	
PENGELOLAAN			
• Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Mengelola sampah di TPS	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Mengelola TPA	Bidang Pengelolaan Sampah DLH	UPTD TPA	
• Melakukan pemilahan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Melakukan penarikan retribusi sampah	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

b. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat di bidang persampahan Kota Tasikmalaya mempunyai lingkup dan tingkatannya sendiri, tergantung dari sudut pandang dan harapan yang ada mengenai peran serta yang dikehendaki, peran serta dapat bersifat semu, parsial, dan lengkap. Berikut ini data yang diperoleh berdasarkan nama kelompok sebagai lembaga pengelola/kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Data ini belum semua yang di sampaikan, tapi mewakili lembaga atau kelompok yang saat ini masih aktif dan dalam pendampingan DLH. Berikut tabelnya.

Tabel 2.29 Data Lembaga Pengelola/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga /Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	Bank Sampah	Kembang Hurip	660.2/Kep.09/2019	51	Tabungan Sampah	Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
2	Bank Sampah	Puspasari	660.2/Kep.58/2017	95	Tabungan Sampah	Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
3	Bank Sampah	Saripin Bersinar	660.2/Kep.10/2022	23	Tabungan Sampah	Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
4	Bank Sampah	Dwi Mekar	660/SK-35/VII/KEL/2020	75	Tabungan Sampah	Kel. Sukamanah Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Tidak Aktif
5	Bank Sampah	Sabilulungan	800/ Kep. 023-pem/2018	150	Tabungan Sampah	Kel. Sukamaju Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Tidak Aktif
6	Bank Sampah	Asri Mandiri	658.1/Kep.006/Kec/ 2014	180	Tabungan Sampah	Kel. Parakanyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
7	Bank Sampah	Mandiri	658.1/SK. 42/KEL	232	Tabungan Sampah	Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalay0a	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga /Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
8	Bank Sampah	Tugu Harapan	660/Sk.18/Kel/2022	211	Tabungan Sampah	Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
9	Bank Sampah	Sobat Penyamar	648 / Kep. Iia /2021	92	Tabungan Sampah	Kel. Margabakti Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
10	Bank Sampah	Warga Peduli	660.2/6/Kel/2018	200	Tabungan Sampah	Kel. Setianagara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
11	Bank Sampah	Pasir Ipis Mandiri	147/Kep.40/Kel/2018	125	Tabungan Sampah	Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
12	Bank Sampah	Gunlip	38b/Kep/2018	7	Tabungan Sampah	Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Tidak Aktif
13	Bank Sampah	Kilat Buana	648/Kep.005/2021	93	Tabungan Sampah	Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
14	Bank Sampah	Sugema	658.1/SK.40/Kel.	752	Tabungan Sampah	Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
15	Bank Sampah	Sehat Mandiri	400/32/SK/Kel/2020	70	Tabungan Sampah	Kel. Kersanagara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga /Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
16	Bank Sampah	Ciherang Tunas Mulia	474/IX/Kel/2020	200	Tabungan Sampah	Kel. Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
17	Bank Sampah	Cikalang Mandiri	660.2/kep.24/kel.cklg/2021	47	Tabungan Sampah	Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
18	Bank Sampah	SI RESIK	660/2421-DLH/2019	489	Tabungan Sampah	Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
19	Bank Sampah	Galih Mandiri	400/32/SK/Kel/2022	93	Tabungan Sampah	Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
20	Bank Sampah	Ligar Sapari Mandiri	648/Kep.01/2022	84	Tabungan Sampah	Kel. Sambongpari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
21	Bank Sampah	Setia Mulya Bersih	648/Kep.11/Kel.Stmly/2021	100	Tabungan Sampah	Kel. Setiamulya Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga /Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
22	Bank Sampah	Cikal	658.1/001/viii/kel/2021	88	Tabungan Sampah	Kel. Karanganyar Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
23	Bank Sampah	Si Mekar	658.Kep.22/Kel.Stngr/XII/2022	110	Tabungan Sampah	Kel. Setianagara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
24	Bank Sampah	Rahayu Sukmajaya	149/SK.007/Kel.	161	Tabungan Sampah	Kel. Sukamaju kaler Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif
25	Bank Sampah	Ciherang Tunas Mulia #1112	660/74/Kel/II/2022	78	Tabungan Sampah	Kel. Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	BPRS/ Iuran	DLH/ Anggota Kelompok	Aktif

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kota Tasikmalaya, 2023

c. Pemetaan pemangku kepentingan diluar Pemerintah Daerah

Pemetaan pemangku kepentingan diluar pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dilakukan untuk mengetahui peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan persampahan seperti peran swasta, BUMD/BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk konstribusinya yang telah ditetapkan secara legitimasi dengan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap peran mereka dalam pengelolaan persampahan. Berikut pemetaan kelembagaan non pemerintah terkait dengan pengelolaan persampahan dapat dilihat pada tabel 2.14

Tabel 2.30 Pemetaan Kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	• Legislasi • Penganggaran • Pengawasan	• Badan anggaran terkait Alokasi APBD • Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan
Pengusaha/swasta CSR • Pertamina • Bank BJB	• Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) • Mendapatkan PROPER	• Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan persampahan
Yayasan dan Lembaga lain • Kopling • Green Community • Asosiasi Bank Sampah • Republik Air • RSBS (Rumah Sampah Berbasis Sekolah) • Komunitas Penggiat Maggot • Karangsari Pride • Komunitas Ecoenzyme • Sea Soldier • Lembaga Pengawas Lingkungan Hidup	• Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan	• Memberikan edukasi ke masyarakat luas terkait dengan pengelolaan sampah
Yayasan dan Lembaga lain • SNV	Memfasilitasi pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan	Pelaksanaan Kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengelolaan persampahan

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Tabel 2.31 Pemetaan Kontribusi Kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya keterlibatan
Anggota Legislatif	• Badan anggaran terkait Alokasi APBD • Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Pengusaha/ swasta CSR • Pertamina • Bank BJB	Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan persampahan	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Rendah	Rendah	Tinggi
Yayasan dan Lembaga lain • Kopling • Green Community • Asosiasi Bank Sampah • Republik Air • RSBS (Rumah Sampah Berbasis Sekolah • Komunitas Penggiat Maggot • Karangsari Pride • Komunitas Ecoenzyme • Sea Soldier • Lembaga Pengawas Lingkungan Hidup	Memberikan edukasi ke masyarakat luas terkait dengan pengelolaan sampah		Sedang	Sedang	Tinggi
Yayasan dan Lembaga lain • SNV	Pelaksanaan Kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengelolaan persampahan		Sedang	Sedang	Tinggi

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

d. Regulasi

Regulasi berisi tabel yang memberikan penjelasan terkait peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait persampahan yang ada di Kota Tasikmalaya. Adapun tabel pemetaan regulasi daerah terkait persampahan dapat dilihat pada tabel 2.32

Tabel 2.32 Regulasi Pengelolahan Sampah

Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan			
No			
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada	Tidak Ada
		√	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada
		Ada	
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	√ Pasal 7 dan 8	
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	√ Pasal 12	
c	Substansi pengaturan : Pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah)	√ Pasal 15	
d	Substansi pengaturan : Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah)	√ Pasal 16	
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaran pengelolaan sampah	√ Pasal 35	
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	√ Pasal 36	
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	√ Pasal 37	
h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketntuan teknis pengelolaan sampah	√ Pasal 38	
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	√ Pasal 39	
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	√ Pasal 40	
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		√	

Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan			
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.		
	• Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya • Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tasikmalaya dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		

Sumber: Perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

(3) Komunikasi dan Media

Komunikasi dan media berisi kegiatan komunikasi terkait dengan promosi hygine dan sanitasi, peta media komunikasi dan kerjasama terkait sanitasi di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.33 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygine dan Sanitasi terkait Persampahan

No.	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Sosialisasi Pengelolaan Sampah	Setiap Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan	Masyarakat di Kota Tasikmalaya di masing-masing kelurahan serta anggota komunitas lingkungan hidup	Sampah telah menjadi permasalahan utama sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat	Perlunya pendampingan secara intensif ke masyarakat agar pelaksanaan pengelolaan sampah di masyarakat berjalan efektif dan berkelanjutan
2	Gedong Resik Gerakan Donasi Sampah dan Jelantah Ngarah Resik	2022-saat ini	Dinas Lingkungan Hidup	Pengurangan sampah domestik berupa sampah anorganik dan minyak jelantah di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dengan Program Gedong Resik sebesar 0,5%.	Masyarakat Kota Tasikmalaya	Gerakan Donasi Sampah dan Jelantah Ngarah Resik Kota Tasikmalaya dilakukan dengan	berdonasi melalui sampah yang sudah terpilah dan jelantah dari sumbernya
3	GoSo Gerakan Olah Sampah Organilk	2022-saat ini	Dinas Lingkungan Hidup	Mengumpulkan sampah untuk diolah	Masyarakat Kota Tasikmalaya	pengurangan sampah organik di kota ini melalui pengurangan, pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah organik	sampah organik merupakan masalah lingkungan yang besar di kota ini dan menganggap pengurangan sampah organik sebagai solusi yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan
4	Satgas Tasik Resik	2022-2023	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan penertiban TPS Liar di seluruh Kota Tasikmalaya	56 TPS Liar di seluruh Kota Tasikmalaya	Penertiban TPS Liar dengan pembersihan yang dilakukan oleh Satgas Tasik Resik	Pembentukan satgas Tasik Resik merupakan kolaborasi dari pemerintah dan Masyarakat untuk turut membersihkan lingkungan

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Tabel 2.34 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Persampahan

No.	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	Radio	Masyarakat Umum	Produksi dan penyiaran dari Radio, narasumber dan data informasi dari Pokja PKP	Keterlibatan Masyarakat dalam Pengurangan sampah	Bersama-sama Mengurangi sampah	Responden masyarakat mendengar informasi tentang cara pengurangan sampah
2	Sosial Media Instagram: @kominfo_pemkot_tsm) @dlh_tasikkota Website Goso Youtube	Masyarakat Umum Kota Tasikmalaya	Data dan informasi dari masing-masing Dinas	Mendorong perilaku bersih dan sehat dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan baik	Bersama-sama Mengurangi sampah	Responden masyarakat mendengar informasi tentang cara pengurangan sampah
3	Televisi	Masyarakat Umum Kota Tasikmalaya	Data dan informasi dari masing-masing Dinas	Mendorong perilaku bersih dan sehat dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan baik	Bersama-sama Mengurangi sampah	Responden masyarakat mendengar informasi tentang cara pengurangan sampah
4	Koran Elektronik	Masyarakat Umum Kota Tasikmalaya	Data dan informasi dari masing-masing Dinas	Mendorong perilaku bersih dan sehat dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan baik	Bersama-sama Mengurangi sampah	Responden masyarakat mendengar informasi tentang cara pengurangan sampah

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

2.2.3 Drainase Lingkungan

Sistem jaringan drainase, yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro. Drainase berfungsi untuk mengalirkan air hujan ataupun kelebihan air di permukaan yang disebabkan luapan sungai yang masuk ke pemukiman, sehingga tidak menimbulkan genangan air di lingkungan. Drainase dikatakan berfungsi dengan baik jika kapasitas dari saluran drainase itu mencukupi kebutuhan untuk mengalirkan kelebihan air permukaan.

(1) Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan

Kelebihan air di permukaan dapat menimbulkan genangan yang dapat menimbulkan masalah seperti: kekumuhan lingkungan yang berdampak pada kondisi kesehatan dan kenyamanan hidup. Genangan yang menimbulkan masalah yaitu jika tinggi genangan tersebut minimal 30 cm, dan tidak segera surut dalam selama 2 jam, dan terjadi minimal 2 kali dalam setahun. Pada Kota Tasikmalaya, sesuai dengan data instrumen diperoleh wilayah area terbangun yang masih tergenang tersebar di 18 lokasi, dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.35 Wilayah genangan air di Kota Tasikmalaya

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (jam)	Frekuensi (kali/tahun)	Penyebab***
1	Karsamenak	0.497487		1-3		Hujan
2	Setimulya	1.1284		1-3		Hujan
3	Kersanagara	0.172805		1-3		Hujan
4	Kahuripan	1.43889		1-3		Hujan
5	Empangsari	0.122214		1-3		Hujan
6	Lengkongsari	0.591373		1-3		Hujan
7	Tugujaya	3.82915		1-3		Hujan
8	Nagarawangi	0.055727		1-3		Hujan
9	Cilembang	0.090644		1-3		Hujan
10	Argasari	0.091448		1-3		Hujan
11	Sambongjaya	0.487924		1-3		Hujan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (jam)	Frekuensi (kali/tahun)	Penyebab***
12	Linggajaya	0.466338		1-3		Hujan
13	Mangkubumi	0.116216		1-3		Hujan
14	Indihiang	1.01211		1-3		Hujan
15	Sukamulya	0.13882		1-3		Hujan
16	Cipedes	0.030233		1-3		Hujan
17	Nagarasari	0.974329		1-3		Hujan
18	Sukamanah	0.47905		1-3		Hujan

Sumber : Pokja PPKP Tasikmalaya, 2023

Jika melihat tabel diatas, genangan yang terjadi karena faktor hujan yang debitnya cukup deras dan sepanjang hari. Ketinggian dan frekwensinya sesuai dengan data dari EHRA, sangat bervariasi dan melihat kondisi musim yang berlaku setiap tahunnya.

(2) Peta lokasi genangan

Peta lokasi genangan menggambarkan titik-titik lokasi genangan yang terjadi di 18 titik di seluruh Kota Tasikmalaya.

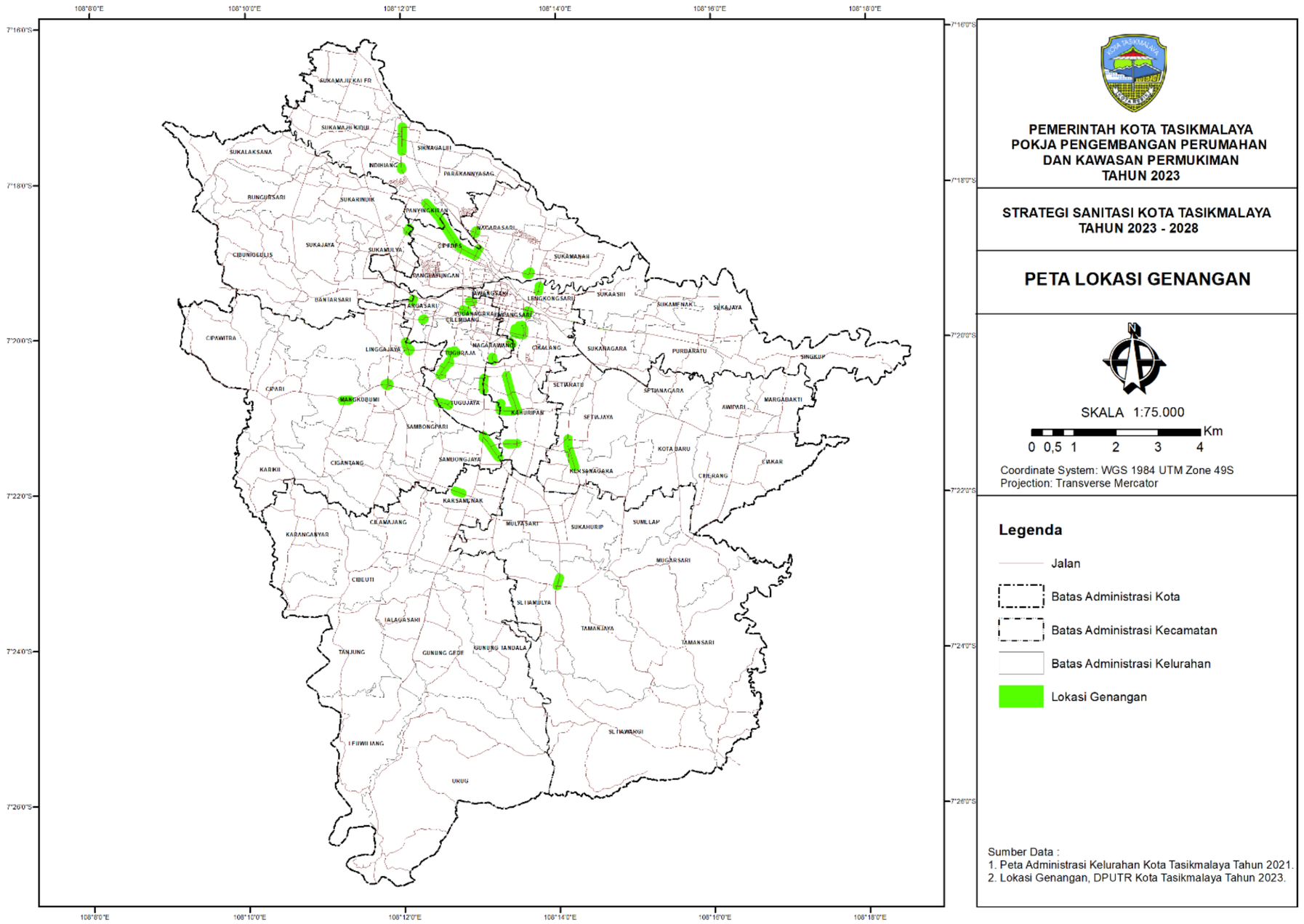

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2023

STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2023 - 2028

PETA LOKASI GENANGAN

Gambar 2.23 Peta Lokasi Genangan

Sumber : Pokja PPKP Tasikmalaya, 2023

(3) Sistem dan infrastruktur

Sistem dan infrastruktur di Kota Tasikmalaya saat ini sudah berjalan, hal ini terlihat dengan kondisi eksisting saat ini. Namun dalam pengisian jika disesuaikan dengan permintaan tabel dibawah ini, masih dibutuhkan waktu untuk melihat dokumen kajian dan pekerjaan yang sudah ada. Sehingga tabel masih dalam proses pengisian.

Tabel 2.36 Kondisi sarana dan prasarana drainase lingkungan di Kabupaten/Kota

No.	Jenis Prasarana/ Sarana	Satuan	Bentuk Penampang*)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B**)	H***)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
1	• Saluran Primer A	m	Segiempat/ Trapesium					
	• Saluran Sekunder A1	m						
	• Saluran Sekunder A2	m						
	Bangunan Pelengkap							
	• Rumah Pompa	unit						
	• Pintu Air	unit						
	• Kolam Retensi	unit						
	• Trash rack/ Saringan Sampah	unit						
2	• Saluran Primer A	m						
	• Saluran Sekunder A1	m						
	• Saluran Sekunder A2	m						
	Bangunan Pelengkap							
	• Rumah Pompa	unit						
	• Pintu Air	unit						
	• Kolam Retensi	unit						
	• Trash rack/ Saringan Sampah	unit						
3	• Saluran Primer C							
4	• Saluran Primer D							
	dst							

2.3 Area berisiko dan Permasalahan Sanitasi

Penentuan area risiko sanitasi di Kota Tasikmalaya dilakukan dengan cara pemberian skoring pada 69 kelurahan berdasarkan beberapa indikator yang berasal dari data sekunder, persepsi SKPD dan studi EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD.

Penentuan area berisiko berdasarkan Penilaian OPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kabupaten. Adapun kriteria dalam penilaian didasarkan pada; (1) kondisi wilayah, yang meliputi kepadatan penduduk, kondisi genangan air dan daerah terlewati sungai, (2) kondisi sosial, yang meliputi tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi dan kelembagaan, dan (3) kondisi layanan sanitasi, yang meliputi layanan air limbah domestik, persampahan dan drainase.

Penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan kondisi sumber air, pencemaran karena air limbah domestik, pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga, kondisi drainase lingkungan, dan aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penanganan air minum, buang air besar sembarangan).

2.3.1 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik atau berupa limbah cair rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik bisa berpotensi menyebabkan permasalahan kesehatan lingkungan.Limbah rumah tangga ini berupa air buangan dari cucian dapur, cucian pakaian, kamar mandi (tergolong *grey water*) dan limbah tinja manusia, urine, air gelontor, pembersih dan kertas pembersih (*black water*).Pola pembuangan limbah di masyarakat juga bermacam-macam, relatif sudah menggunakan tanki septik, tetapi masih banyakyang buang air besar di sungai, atau saluran terbuka atau saluran pembuangan jamban pribadinya ke sungai atau selokan.Kondisi perekonomian dan tingkat pendidikan punya peran dalam membentuk

perilaku masyarakat terhadap resiko kesehatan lingkungan.Tabel berikut ini disajikan wilayah – wilayah yang beresiko akan air limbah.

Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik yang tergolong ke dalam area beresiko sangat tinggi terdapat di 26 Kelurahan. Pada Gambar peta 2.24 Area Beresiko sangat tinggi digambarkan melalui warna Merah. Tingkat area beresiko Tinggi untuk air limbah domestik terdapat di 28 kelurahan. Pada gambar Peta 2.24 digambarkan melalui warna Kuning. Berikut area berisiko dan permasalahan air limbah domestik Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Gambar 2.24 dan Tabel 2.37.

Tabel 2.37 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Risiko 4: Sangat Tinggi	Kawalu	Karanganyar
		Tamansari	Setiawargi
		Cihideung	Tuguraja
		Cihideung	Cilembang
		Cihideung	Argasari
		Mangkubumi	Cigantang
		Mangkubumi	Mangkubumi
		Indihiang	Parakannyasag
		Indihiang	Sukamajukaler
		Cipedes	Panglayungan
		Cipedes	Cipedes
		Cipedes	Nagarasari
		Cipedes	Sukamanah
2	Risiko 3: Tinggi	Kawalu	Leuwiliang
		Kawalu	Urug
		Kawalu	Cibeuti
		Kawalu	Cilamajang
		Kawalu	Karsamenak
		Tamansari	Tamansari
		Tamansari	Mulyasari
		Tamansari	Sukahurip
		Tamansari	Sumelap
		Cibeureum	Ciherang
		Cibeureum	Kotabaru
		Cibeureum	Kersanagara
		Cibeureum	Setiajaya
		Purbaratu	Sukanagara
		Purbaratu	Sukamenak
		Purbaratu	Purbaratu
		Purbaratu	Sukaasih
		Purbaratu	Sukajaya

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
		Purbaratu	Singkup
		Tawang	Cikalang
		Tawang	Empangsari
		Tawang	Tawangsari
		Tawang	Lengkongsari
		Cihideung	Tugujaya
		Mangkubumi	Karikil
		Mangkubumi	Sambongpari
		Mangkubumi	Linggajaya
		Mangkubumi	Cipari
		Mangkubumi	Cipawitra
		Indihiang	Sirnagalih
		Indihiang	Sukamajukidul
		Bungursari	Sukamulya
		Bungursari	Sukarindik
		Bungursari	Bungursari
		Bungursari	Cibunigeulis
		Bungursari	Bantarsari
		Bungursari	Sukalaksana
3	Risiko 2: Rendah	Kawalu	Gunungtandala
		Kawalu	Tanjung
		Tamansari	Setiamulya
		Tamansari	Tamanjaya
		Cibeureum	Margabakti
		Cibeureum	Awipari
		Cibeureum	Setiaratu
		Cibeureum	Setianagara
		Tawang	Kahuripan
		Cihideung	Nagarawangi
		Cihideung	Yudanagara
		Indihiang	Panyingkiran
		Indihiang	Indihiang
4	Risiko 1: Sangat Rendah	Kawalu	Gununggede
		Kawalu	Talagasari
		Tamansari	Mugarsari
		Cibeureum	Ciakar
		Mangkubumi	Sambongjaya
		Bungursari	Sukajaya

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

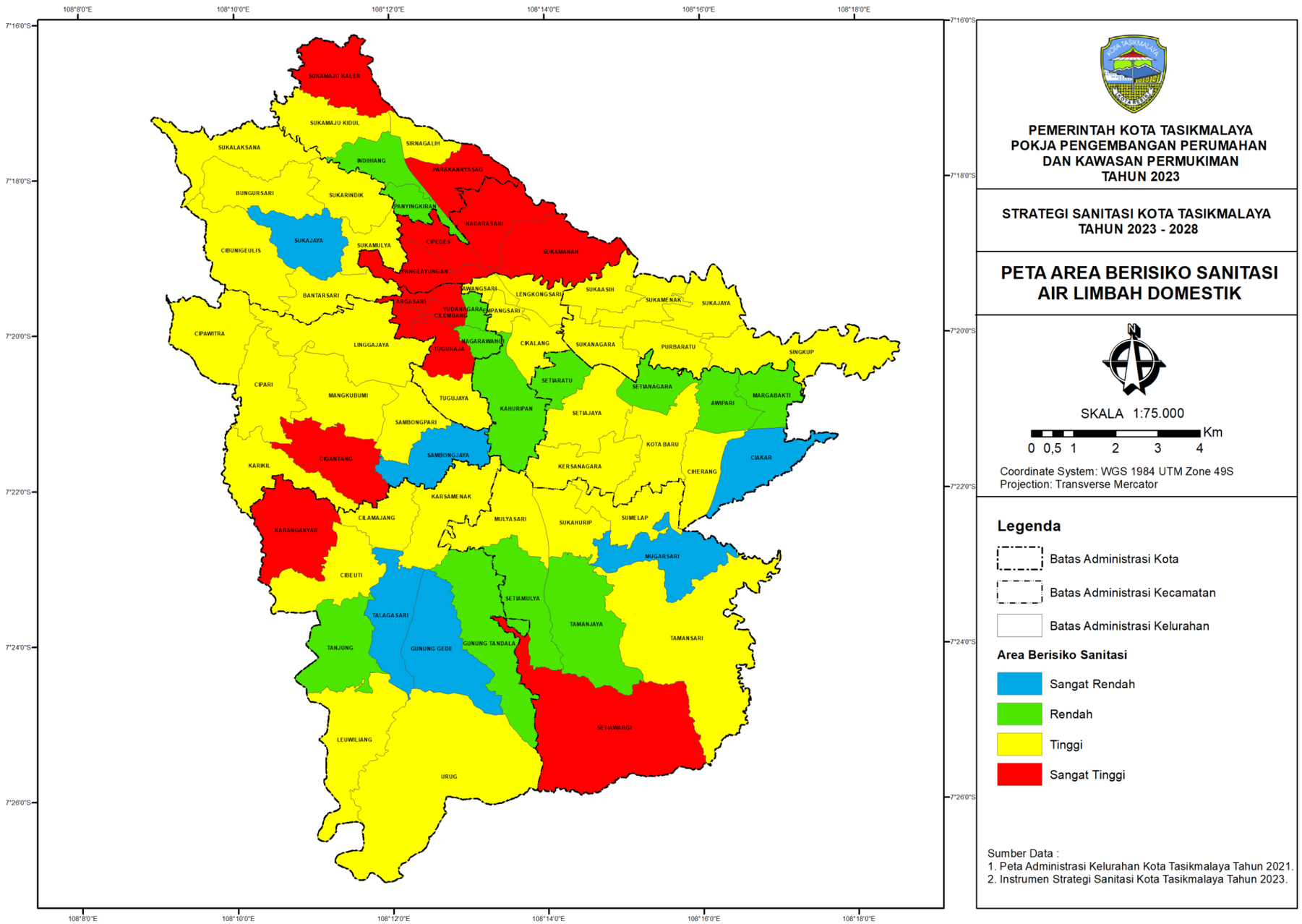

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2028

PETA AREA BERISIKO SANITASI AIR LIMBAH DOMESTIK

SKALA 1:75.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator

Legenda

- Batas Administrasi Kota
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan

Area Berisiko Sanitasi

- Sangat Rendah
- Rendah
- Tinggi
- Sangat Tinggi

Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kelurahan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
2. Instrumen Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Gambar 2.24 Peta Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Kota Tasikmalaya

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Tabel 2.38 Permasalahan Air Limbah Domestik

No.	Permasalahan
1.	**Aspek Teknis:** Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis
a	BABS : 34,1% (63.680 KK)
b	Akses terhadap jamban yang tidak layak: 37,7% (70.357 KK)
c	Sesuai data EHRA diperoleh tangki septik tidak aman diperoleh 90,4% dari 2.760 kuisioner yang dijalankan.
d	Akses layak 27,8% dan akses aman 4,7%
e	Kapasitas penggunaan IPLT baru sebesar 31,58%
f	Kapasitas angkut terhadap IPLT 43,37% Kapasitas penggunaan truk tinja 33,33% Kapasitas truk tinja terhadap total rumah tangga 8,51%
g	Sarana dan prasarana pendukung IPLT belum memadai
h	Terdapatnya sambungan rumah (SR) yang belum tersambung ke IPAL Komunal Skala Kawasan
i	Sulitnya mencari lahan untuk lokasi SPALD-T
j	Rusaknya beberapa bagian pada unit pengolah di beberapa IPAL eksisting
2.	**Aspek Non Teknis:** Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
a	Aspek Regulasi: • Pelaksanaan Perda belum optimal • Belum ada Perwali tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal. • Belum peraturan turunan belum ada
b	Aspek Kelembagaan: • Pengelolaan tangki septik komunal oleh KPP belum optimal karena belum ada kemandirian KPP. • Belum ada kerjasama dengan pihak swasta yang berusaha pada bidang penyedotan lumpur tinja.
c	Aspek Peran Serta Masyarakat: • Peran serta masyarakat dalam pengolahan air limbah pada SPALD terpusat belum optimal dan berkelanjutan. • Persepsi, perilaku, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik masih minim.
d	Aspek Pendanaan: • Dukungan anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik masih terbatas • Penarikan retribusi air limbah belum optimal

Sumber: Instrumen SSK dan Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

2.3.2 Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya dan laju pertumbuhan penduduk selalu dibarengi dengan meningkatkan volume sampah. Masalah persampahan selalu menjadi masalah yang klasik di setiap kota termasuk juga di Kota Tasikmalaya karena masalah sampah terkait banyak faktor

terutama kesadaran akan kebersihan dan pengelolaan sampah. Pola pengelolaan sampah di masyarakat berbeda-beda, seperti ada yang langsung membuang sampah di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi juga ada yang membuang sampah di saluran drainase, dan di pinggir-pinggir jalan. Sampah dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Area Beresiko Sanitasi persampahan yang tergolong ke dalam area beresiko sangat tinggi terdapat di 6 Kelurahan. Pada Gambar peta 2.39 digambarkan melalui warna Merah. Tingkat area beresiko Tinggi untuk persampahan terdapat di 14 Kelurahan. Pada gambar Peta 2.39 digambarkan melalui warna Kuning.

Berikut area berisiko dan permasalahan persampahan Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Gambar 2.25 dan Tabel 2.39.

Tabel 2.39 Area Berisiko Sanitasi Persampahan

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Risiko 4: Sangat Tinggi	Kawalu	Leuwiliang
		Kawalu	Urug
		Tamansari	Setiawargi
		Tamansari	Tamansari
		Tamansari	Sumelap
		Mangkubumi	Cipawitra
2	Risiko 3: Tinggi	Kawalu	Gununggede
		Kawalu	Talagasari
		Kawalu	Tanjung
		Kawalu	Karanganyar
		Tamansari	Setiamulya
		Tamansari	Tamanjaya
		Tamansari	Mugarsari
		Cibeureum	Ciherang
		Cibeureum	Ciakar
		Cihideung	Tuguraja
		Indihiang	Sukamajukidul
		Bungursari	Bungursari
		Bungursari	Sukajaya
		Bungursari	Sukalaksana
3	Risiko 2: Rendah	Kawalu	Gunungtandala
		Cibeureum	Kotabaru
		Cibeureum	Kersanagara
		Cibeureum	Setianagara
		Purbaratu	Purbaratu
		Purbaratu	Singkup

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
		Tawang	Kahuripan
		Tawang	Lengkongsari
		Cihideung	Cilembang
		Cihideung	Argasari
		Mangkubumi	Karikil
		Mangkubumi	Sambongjaya
		Mangkubumi	Linggajaya
		Indihiang	Sirnagalih
		Bungursari	Sukamulya
		Bungursari	Cibunigeulis
		Bungursari	Bantarsari
		Cipedes	Panglayungan
		Cipedes	Cipedes
		Cipedes	Nagarasari
		Cipedes	Sukamanah
4	Risiko 1: Sangat Rendah	Kawalu	Cibeuti
		Kawalu	Cilamajang
		Kawalu	Karsamenak
		Tamansari	Mulyasari
		Tamansari	Sukahurip
		Cibeureum	Margabakti
		Cibeureum	Awipari
		Cibeureum	Setiajaya
		Cibeureum	Setiaratu
		Purbaratu	Sukanagara
		Purbaratu	Sukamenak
		Purbaratu	Sukaasih
		Purbaratu	Sukajaya
		Tawang	Cikalang
		Tawang	Empangsari
		Tawang	Tawangsari
		Cihideung	Tugujaya
		Cihideung	Nagarawangi
		Cihideung	Yudanagara
		Mangkubumi	Cigantang
		Mangkubumi	Sambongpari
		Mangkubumi	Mangkubumi
		Mangkubumi	Cipari
		Indihiang	Panyingkiran
		Indihiang	Parakannyasag
		Indihiang	Indihiang
		Indihiang	Sukamajukaler
		Bungursari	Sukarindik

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

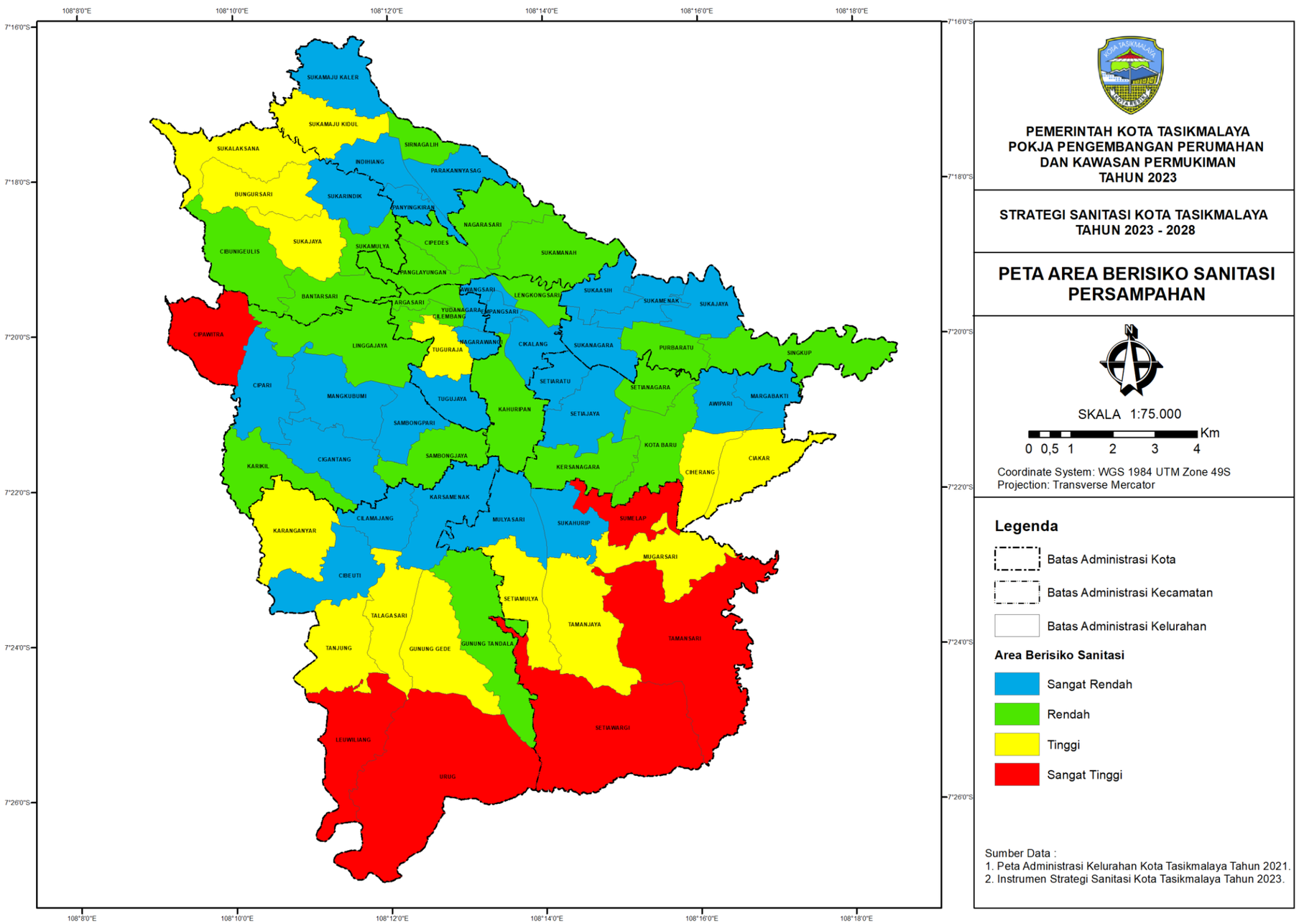

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2028

PETA AREA BERISIKO SANITASI PERSAMPAHAN

SKALA 1:75.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator

Legenda

- Batas Administrasi Kota
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan

Area Berisiko Sanitasi

- Sangat Rendah
- Rendah
- Tinggi
- Sangat Tinggi

Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kelurahan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
2. Instrumen Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Gambar 2.25 Peta Peta Area Berisiko Sanitasi Persampahan Kota Tasikmalaya
Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Tabel 2.40 Permasalahan Persampahan

No.	Perrmasalahan
1.	Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis
a	Pengurangan Sampah: • Angka pengurangan sampah 16,5% • Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah masih sedikit (0,52%) • Bank Sampah Unit seluruh kota sebanyak 24 unit • Jumlah TPS 3R masih terbatas (2 unit) • Masih terbatasnya tempat sampah terpilah • Belum terpenuhinya sarana prasarana Bank Sampah Induk • Sulitnya memasarkan hasil produk 3R
b	Penanganan sampah: • Armada pengangkut sampah masih kurang dan beberapa mengalami kerusakan • Alat berat untuk operasional TPA Ciangir masih kurang • TPA belum menerapkan *sanitary landfill* • Penerapan inovasi teknologi belum maksimal • Sisa umur TPA diperkirakan 3-5 tahun • Belum adanya TPST
2.	Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
a	Aspek Regulasi : • Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal • Pelaksanaan Perwalkot Nomor 22 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum optimal • Penerapan SOP belum optimal
b	Aspek Kelembagaan : • Pengelolaan TPS3R oleh KSM belum optimal karena belum ada kemandirian KSM • Belum optimalnya kerjasama dengan pihak swasta
c	Aspek Peran serta Masyarakat : • Masih ada sebagian masyarakat yang belum tertib dalam membuang sampah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan • Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah
d	Aspek Pendanaan : • Dukungan anggaran untuk pengelolaan persampahan masih terbatas • Penarikan retribusi persampahan belum optimal

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

2.3.3 Area Berisiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan

Permasalahan drainase di Kota Tasikmalaya saat ini cukup menjadi isu utama, karena saluran drainase dan sungai-sungai di saat musim kemarau yang panjang ini kondisinya sudah menjadi tempat pembuangan sampah dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan lokasi area beresiko yang telah di sesuaikan. Area Beresiko

Sanitasi drainase perkotaan yang tergolong ke dalam area beresiko sangat tinggi terdiri dari 4 Kelurahan. Pada Gambar peta 2.25 digambarkan melalui warna Merah. Tingkat area beresiko Tinggi untuk drainase perkotaan terdiri dari 7 Kelurahan. Pada gambar Peta 2.25 digambarkan melalui warna Kuning. Berikut area berisiko dan permasalahan drainase lingkungan Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Gambar 2.25 dan Tabel 2.41.

Tabel 2.41 Area Berisiko Sanitasi Drainase Lingkungan

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Risiko 4: Sangat Tinggi	Tawang	Kahuripan
		Cihideung	Tugujaya
		Mangkubumi	Mangkubumi
		Cipedes	Nagarasari
2	Risiko 3: Tinggi	Tamansari	Sumelap
		Cibeureum	Kersanagara
		Tawang	Cikalang
		Cihideung	Tuguraja
		Cihideung	Cilembang
		Indihiang	Panyingkiran
		Cipedes	Sukamanah
3	Risiko 2: Rendah	Kawalu	Karanganyar
		Tamansari	Setiawargi
		Tamansari	Tamanjaya
		Cibeureum	Setianagara
		Purbaratu	Sukamenak
		Purbaratu	Purbaratu
		Purbaratu	Sukajaya
		Mangkubumi	Linggajaya
4	Risiko 1: Sangat Rendah	Kawalu	Leuwiliang
		Kawalu	Urug
		Kawalu	Gunungtandala
		Kawalu	Gununggede
		Kawalu	Talagasari
		Kawalu	Tanjung
		Kawalu	Cibeuti
		Kawalu	Cilamajang
		Kawalu	Karsamenak
		Tamansari	Setiamulya
		Tamansari	Tamansari
		Tamansari	Mulyasari
		Tamansari	Sukahurip
		Tamansari	Mugarsari
		Cibeureum	Ciherang
		Cibeureum	Ciakar

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
		Cibeureum	Margabakti
		Cibeureum	Awipari
		Cibeureum	Kotabaru
		Cibeureum	Setiajaya
		Cibeureum	Setiaratu
		Purbaratu	Sukanagara
		Purbaratu	Sukaasih
		Purbaratu	Singkup
		Tawang	Empangsari
		Tawang	Tawangsari
		Tawang	Lengkongsari
		Cihideung	Nagarawangi
		Cihideung	Yudanagara
		Cihideung	Argasari
		Mangkubumi	Karikil
		Mangkubumi	Cigantang
		Mangkubumi	Sambongjaya
		Mangkubumi	Sambongpari
		Mangkubumi	Cipari
		Mangkubumi	Cipawitra
		Indihiang	Parakannyasag
		Indihiang	Sirnagalih
		Indihiang	Indihiang
		Indihiang	Sukamajukidul
		Indihiang	Sukamajukaler
		Bungursari	Sukamulya
		Bungursari	Sukarindik
		Bungursari	Bungursari
		Bungursari	Sukajaya
		Bungursari	Cibunigeulis
		Bungursari	Bantarsari
		Bungursari	Sukalaksana
		Cipedes	Panglayungan
		Cipedes	Cipedes

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

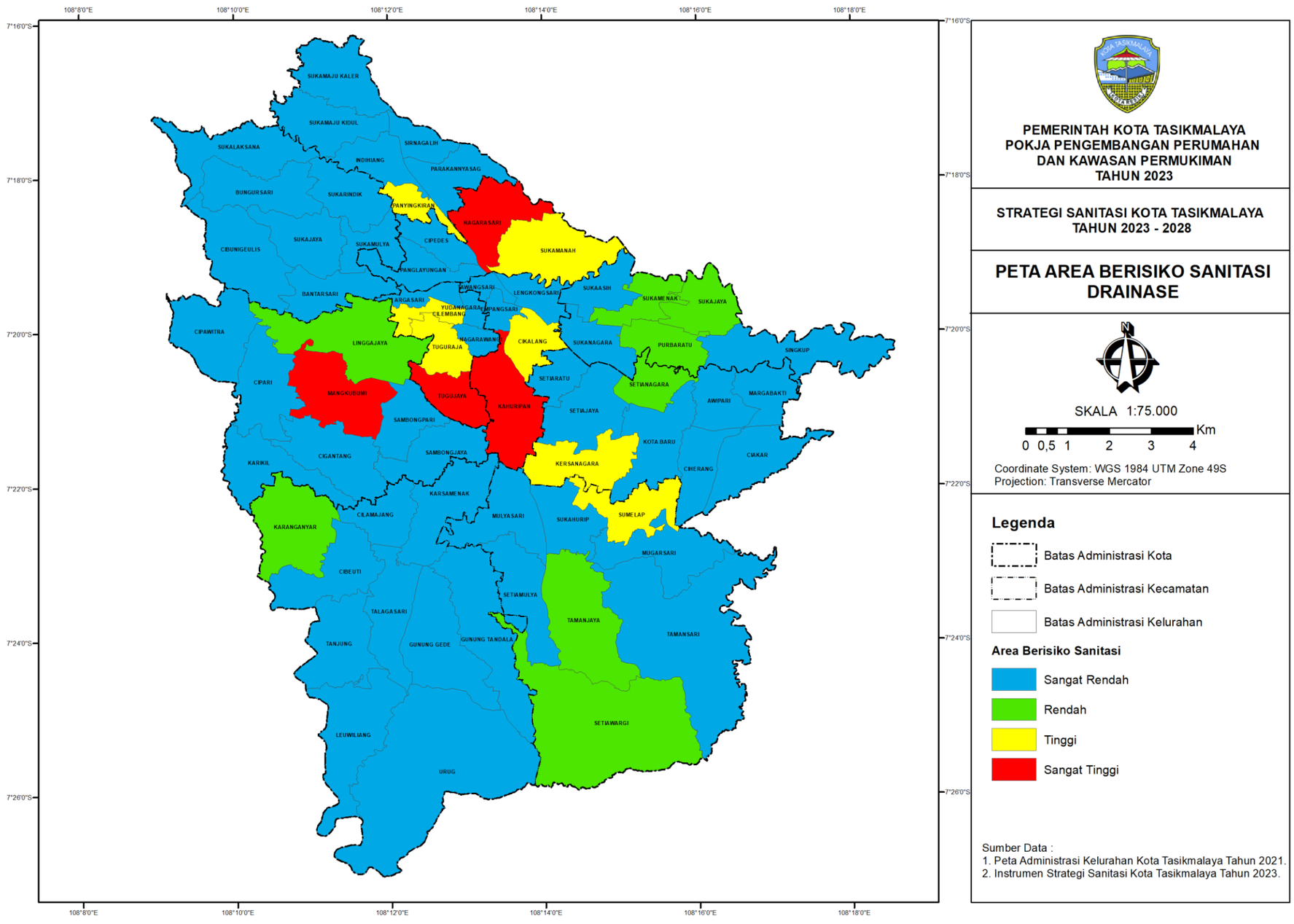

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2028

PETA AREA BERISIKO SANITASI DRAINASE

N

SKALA 1:75.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator

Legenda

- Batas Administrasi Kota
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan

Area Berisiko Sanitasi

- Sangat Rendah
- Rendah
- Tinggi
- Sangat Tinggi

Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kelurahan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
2. Instrumen Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Gambar 2.26 Peta Area Beresiko Drainase Lingkungan Kota Tasikmalaya

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Tabel 2.42 Permasalahan Drainase

No.	Perrmasalahan
1.	Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis
a	Terjadinya genangan di 18 titik akibat saluran drainase tidak mampu menampung *run off* dan terdapat banyak sampah
b	Penyelesaian genangan belum dapat diselesaikan dengan sistematis
c	Terdapat bangunan di atas saluran
d	Belum memiliki Dokumen Masterplan Drainase Perkotaan
e	Saluran drainase dengan saluran irigasi banyak yang memiliki fungsi yang sama
2.	Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
a	Alokasi anggaran untuk sektor drainase masih terbatas
b	Kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah ke saluran drainase masih rendah.
c	Belum adanya peraturan yang mengatur tentang bangunan diatas saluran drainase.

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP

BAB III
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1 Visi dan Misi Sanitasi

Visi dan misi sanitasi Kota Tasikmalaya dirumuskan selaras dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan yang diamanatkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, untuk dasar perencanaan pembangunan di masa transisi kekosongan kepala daerah. Oleh karena itu, dalam dalam RPD tidak tercantum visi misi. Akan tetapi, penentuan tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya berdasarkan pada RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025.

Keselarasan visi misi sanitasi Kota Tasikmalaya dengan RPJPD Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kota

Visi RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025	Misi RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025	Visi Sanitasi Kota Tasikmalaya 2023-2028	Misi Sanitasi Kota Tasikmalaya 2023-2028
"DENGAN IMAN DAN TAKWA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT". Visi tersebut mengandung makna : Visi Kota Tasikmalaya tersebut merupakan arah dan gambaran masa depan (2025) yang akan dituju oleh segenap masyarakat guna mensejahterakan dirinya melalui fungsi dan kegiatan-kegiatan perdagangan dan industry dengan	Misi dalam upaya pencapaian visi : **Mempertahankan** Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum. **Mempertahankan** Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global. **Menghasilkan** pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.	**"KOTA TASIKMALAYA LAYAK SANITASI TAHUN 2028"** Makna visi diatas adalah Gambaran harapan Kota Tasikmalaya di tahun 2028 dapat mewujudkan layanan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya.	**Misi Air Limbah Domestik** : Mewujudkan pengelolaan air limbah domestik sesuai standar teknis **Misi Persampahan :** Meningkatnya Pengelolaan Persampahan yang Berkelanjutan

Visi RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025	Misi RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025	Visi Sanitasi Kota Tasikmalaya 2023-2028	Misi Sanitasi Kota Tasikmalaya 2023-2028
modal nilai-nilai iman dan taqwa. Dipilihnya aktivitas perdagangan dan industri sebagai aktivitas utama Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai pedagang dan pelaku industri (khususnya perdagangan dan industri kecil) yang tangguh. Yang dimaksud dengan “pusat” pada pernyataan visi di atas adalah suatu kawasan yang melayani wilayah lain. “Termaju di Jawa Barat” pada pernyataaan visi di atas mengandung arti bahwa Kota Tasikmalaya termasuk salah satu kota/kabupaten termaju di Jawa Barat pada sektor perdagangan dan industri	**Menghasilkan** sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya. **Menciptakan dan memelihara** pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan pada prinsip government entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya. **Menciptakan** pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan. **Mewujudkan** Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.		

Sumber : RPJPD Tahun 2005-2025 dan Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi

3.2.1.Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu tahun 2023-2028. Rumusan

tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome dan impact program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dengan memperhatikan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual, tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kesejahteraan sosial, dengan 1 (satu) sasaran:

- ✓ Menurunnya Tingkat Kemiskinan;

b. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal, yang terdiri dari 5 (lima) sasaran:

- ✓ Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat;
- ✓ Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- ✓ Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;
- ✓ Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah;
- ✓ Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

c. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran:

- ✓ Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
- ✓ Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

d. Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang mendukung kota nyaman huni berwawasan lingkungan, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran:

- ✓ Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas;
- ✓ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

e. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi, yang terdiri dari 1 (satu) sasaran:

- ✓ Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi.

Strategi layanan sanitasi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Sanitasi kota. Kota Tasikmalaya merumuskan strategi layanan sanitasi didasarkan pada isu-isu utama/strategis yang dihadapi pada saat ini. Tujuan, sasaran dan strategi pengembangan sanitasi di Kota Tasikmalaya untuk perencanaan jangka menengah hingga tahun 2028 berdasarkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan, diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diterjemahkan menjadi 5 arah kebijakan dan strategi (Perpres 18/2020 tentang RPJMN) serta Permendagri No. 87 Tahun 2022. Adapun tujuan dan sasaran dari Pembangunan Sanitasi di Kota Tasikmalaya untuk tahun 2023-2028 di 2 (dua) sektor adalah :

A. Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Tasikmalaya memiliki beberapa permasalahan utama atau mendesak yaitu masih tingginya angka BABS di masyarakat ditempat terbuka masih 34,1% sehingga cakupan layanan akses sarana air limbah domestic masih sangat rendah (akses layak 27,8%, akses aman 2,7%), dan rendahnya kesadaran warga dalam berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah domestik karena belum maksimalnya lembaga pengelola pemerintah kota dalam pengelolaan limbah domestik. Hal ini merupakan bagian dari kelemahan dan ancaman yang mendasar dalam system air limbah domestik di Kota Tasikmalaya. Secara internal, dalam pengelolaan air limbah domestik sudah ada alokasi APBD untuk pembangunan sarana meskipun masih sangat kurang. Secara eksternal, Kota Tasikmalaya memiliki beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam pengelolaan air limbah domestik. Antara lain adanya program dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan donor mengenai air limbah, baik untuk sistem SPALD permukiman maupun untuk sistem SPALD perkotaan. Peluang lain yaitu sudah ada kerjasama dengan swasta untuk pengelolaan air limbah domestik di Kota Tasikmalaya. Saat ini, peluang

pendanaan CSR yang bersumber dari BUMN dan sektor swasta tergolong banyak, hanya belum dimanfaatkan dengan baik.

Jika melihat keberfungsian SPALDS Sub system pengangkutan dan pengolahan di Instrumen SSK, idle kapasitas IPLT sangat tinggi (68,42%), sedangkan saat ini baru 31,58% kapasitas IPLT yang dimanfaatkan. Truk tinja belum melakukan pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara optimal, karena utilitas masih 33,33%, jika truk tinja dimanfaatkan dengan optimal maka kapasitas IPLT sudah tercukupi. IPLT yang ada saat ini hanya memenuhi 17,73% dari potensi lumpur tinja di Kota Tasikmalaya.Jumlah truk tinja yang ada hanya memenuhi 8,40% dari kebutuhan total (potensi) pengangkutan lumpur tinja.

Untuk SPALDT terdapat 86 unit IPAL Permukiman berbasis masyarakat, dengan kapasitas operasional seluruh IPAL berkisar 94,13%. Jadi terdapat potensi pemanfaatan idle capacity dari IPAL untuk meningkatkan akses aman.

Arahan RPJMN 2020-2024 diharapkan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi untuk air limbah domestik 90% layak, dan termasuk 15% aman; dan rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka 0%. Kota Tasikmalaya untuk memenuhi target nasional di tahun 2024 masih belum dapat dilakukan. Dari hasil analisis potensi yang dimiliki Kota Tasikmalaya, tujuan dan sasaran pembangunan sektor air limbah domestik tahun 2023-2028 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Data Dasar Air Limbah Domestik Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Terwujudnya akses Layak dan aman disektor air limbah domestik Kota Tasikmalaya	- Meningkatnya akses Layak air limbah domestik sebesar 100% dan akses aman air limbah domestik sebesar 24% pada Tahun 2028 - Meningkatnya kelurahan ODF 100% pada Tahun 2028	**Aspek Teknis** *SPALD Setempat* - Angka BABs 34,1% - Akses Belum Layak 37,7% - Akses Layak 27,8% - Akses Aman 4,7% - Kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan baru 31,58%, Idle kapasitas IPLT masih sangat tinggi (68,42%).

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
		- Truk tinja belum melakukan pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara optimal, kapasitas penggunaan truk tinja baru 33,33%. - Kapasitas angkut terhadap kapasitas desain IPLT baru mencapai 47,37%. - IPLT yang ada saat ini hanya memenuhi 17,97% dari potensi lumpur tinja di seluruh kab/kota. - Jumlah truk tinja yang ada saat ini hanya memenuhi 8,51% dari kebutuhan total (potensi) pengangkutan lumpur tinja. *SPALD Terpusat* - Terdapatnya sambungan rumah (SR) yang belum tersambung ke IPAL Komunal Skala Kawasan - Sulitnya mencari lahan untuk lokasi SPALD-T - Rusaknya beberapa bagian pada unit pengolah di beberapa IPAL eksisting ***Aspek Regulasi :*** - Pelaksanaan Perda belum optimal - Belum ada Perwali tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal. - Belum peraturan turunan belum ada **Aspek Kelembagaan :** - Pengelolaan tangki septik komunal oleh KPP belum optimal karena belum ada kemandirian KPP. - Belum ada kerjasama dengan pihak swasta yang berusaha pada bidang penyedotan lumpur tinja. ***Aspek Peran serta Masyarakat :*** - Peran serta masyarakat dalam pengolahan air limbah pada SPALD terpusat belum optimal dan berkelanjutan. Persepsi, perilaku, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik masih minim.

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
		Aspek Pendanaan : - Dukungan anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik masih terbatas - Penarikan retribusi air limbah belum optimal (Instrumen SSK dan Dinkes, 2023)

Sumber : Instrumen SSK dan Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

B. Sampah Perkotaan

Hasil analisis pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya dalam upaya menciptakan 100% pengelolaan sampah di perkotaan sesuai amanat RPJMN 2020-2024. Angka pengelolaan sampah ini secara umum terbagi atas 80% penanganan/pengangkutan dan 20% pengurangan. Meskipun secara umum pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya sudah didukung oleh sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang cukup memadai Bank Sampah, TPS 3R dan sektor informal yang terlibat, namun belum memiliki TPST. Adanya OPD (Dinas Lingkungan Hidup) pengelolaan persampahan di Kota Tasikmalaya menjadi kekuatan, meskipun masih ditangani Bidang Pengelolaan Sampah dan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA). Adapun yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan persampahan di Kota Tasikmalaya yaitu anggaran APBD yang sangat rendah, tingkat pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah yang masih rendah, dan TPA yang beroperasi sudah overload dan dioperasikan secara open dumping.

Secara eksternal, pengelolaan persampahan di Kota Tasikmalaya memiliki beberapa peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dimiliki Kota Tasikmalaya antara lain adanya program pusat dan Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan sampah sehingga memungkinkan untuk memperoleh sumber pembiayaan di luar APBD Kota Tasikmalaya,. Sedangkan tantangan yang dihadapi antara lain Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumbernya sangat rendah. Tantangan lainnya adalah kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi pengelolaan sampah.

Dari hasil analisis potensi yang dimiliki Kota Tasikmalaya, tujuan dan sasaran pembangunan sektor persampahan tahun 2023-2028 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Data Dasar Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Terwujudnya lingkungan bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan	- Meningkatnya pengurangan sampah 30% pada Tahun 2028 - Optimalisasi penanganan sampah 70% pada Tahun 2028	***Aspek Teknis :*** *Pengurangan Sampah* - pengurangan sampah 16,5% - Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah masih sedikit (0,52%) - Bank Sampah Unit seluruh kota sebanyak 24 unit - Jumlah TPS 3R masih terbatas (2 unit) - Masih terbatasnya tempat sampah terpilah Belum terpenuhinya sarana prasarana Bank Sampah Induk Sulitnya memasarkan hasil produk 3R *Penanganan Sampah* - Penanganan Sampah sebesar 65,1% - Armada pengangkut sampah masih kurang dan beberapa mengalami kerusakan - Alat berat untuk operasional TPA Ciangir masih kurang - TPA belum menerapkan sanitary landfill - Penerapan inovasi teknologi belum maksimal - Sisa umur TPA diperkirakan 3-5 tahun - Belum adanya TPST ***Aspek Regulasi :*** - Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal - Pelaksanaan Perwalkot Nomor 22 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum optimal - Penerapan SOP belum optimal **Aspek Kelembagaan :**

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
		- Pengelolaan TPS3R oleh KSM belum optimal karena belum ada kemandirian KSM - Belum optimalnya kerjasama dengan pihak swasta ***Aspek Peran serta Masyarakat :*** - Masih ada sebagian masyarakat yang belum tertib dalam membuang sampah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah ***Aspek Pendanaan :*** - Dukungan anggaran untuk pengelolaan persampahan masih terbatas - Penarikan retribusi persampahan belum optimal

Sumber : Instrumen SSK dan Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Rencana pentahapan pembangunan sanitasi dibagi menjadi 2 tahapan yaitu: tahapan jangka pendek (dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2)) dan tahapan jangka menengah (dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+5)). Tahapan jangka menengah dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil analisis zonasi pada Instrumen SSK.

a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tasikmalaya

Tahapan pengembangan air limbah domestik Kota Tasikmalaya jangka pendek dan jangka menengah, mengacu pada target RPJMN di Tahun 2024 untuk BABs mencapai 0% yang disitribusikan ke Provinsi kemudian didistribusikan kembali ke kabupaten/kota. Distribusi target Provinsi Jawa Barat ke Kota Tasikmalaya untuk akses aman sebesar 24% dan akses layak sebesar 100%. Dengan demikian, pengembangan layanan air limbah domestik Kota Tasikmalaya diarahkan untuk peningkatan akses aman dan akses layak perkotaan.

Kota Tasikmalaya mengalami perubahan klasifikasi perkotaan/perdesaan pada tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaaan di Indonesia 2020, beberapa kelurahan yang masuk klasifikasi perdesaan berubah menjadi perkotaan sehingga seluruh Kota Tasikmalaya masuk klasifikasi perkotaan. Perubahan klasifikasi tersebut, mendorong Kota Tasikmalaya untuk memenuhi layanan air limbah domestik sesuai dengan standar perkotaan. Akses Layak Kota Tasikmalaya yang sebelumnya terdiri dari akses aman, akses layak individu, akses layak bersama dan akses layak khusus perdesaan (Leher Angsa - Cubluk), untuk akses layak khusus perdesaan (Leher Angsa - Cubluk) tidak dihitung dalam akses layak tetapi masuk dalam akses belum layak. Berikut tahapan target cakupan layanan air limbah domestik Kota Tasikmalaya.

Tabel 3. 4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tasikmalaya

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting	Target Cakupan	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
Perkotaan				
A	BABS di Tempat Terbuka	34,1 %	0%	0%
B	BABS di Tempat Tertutup	0%	0%	0%
C	Akses Belum Layak	37,7%	61,23%	0%
D	Akses Layak	27,8 %	38,8%	100%
E	Akses Aman	4,7%	5,1%	24%

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Instrumen SSK Kota Tasikmalaya Tahun 2023 menghasilkan rekomendasi pengelolaan air limbah domestik dengan 3 alternatif tipe sistem, yaitu :

- SPALDT Perkotaan;
- SPALDT Permukiman;
- SPALDS

Akan tetapi dengan kapasitas fiskal Kota Tasikmalaya, tipe sistem yang dapat digunakan adalah SPALDS. Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini, dimana sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di Kota

Tasikmalaya masih dilakukan dengan sistem SPALD-S. Pada sistem ini, pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara setempat dengan fasilitas instalasi pengolahan yang berlokasi dekat dengan jamban keluarga atau MCK. Fasilitas pengumpulan/penampungan/ pengolahan awal yang ideal digunakan dalam sistem on-site yaitu tanki septik. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem SPALD-S, dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu sistem individual dan sistem komunal. Pembedaan ini didasarkan pada kelompok pengguna fasilitas pengelolaan air limbah domestik tersebut. Pada sistem SPALD-S individual, cakupan pelayanan fasilitas pengelola air limbah domestik umumnya melayani satu keluarga. Pada sistem SPALD-S komunal, cakupan pelayanan fasilitas pengelola air limbah domestik melayani lebih dari satu rumah tangga melalui mekanisme sharing dalam penggunaan fasilitas MCK.

Peta zonasi pengembangan pengelolaan air limbah domestik, dengan pertimbangkan relevansi, masih mempergunakan peta zonasi pada dokumen Review Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sebagaimana gambar dibawah ini.

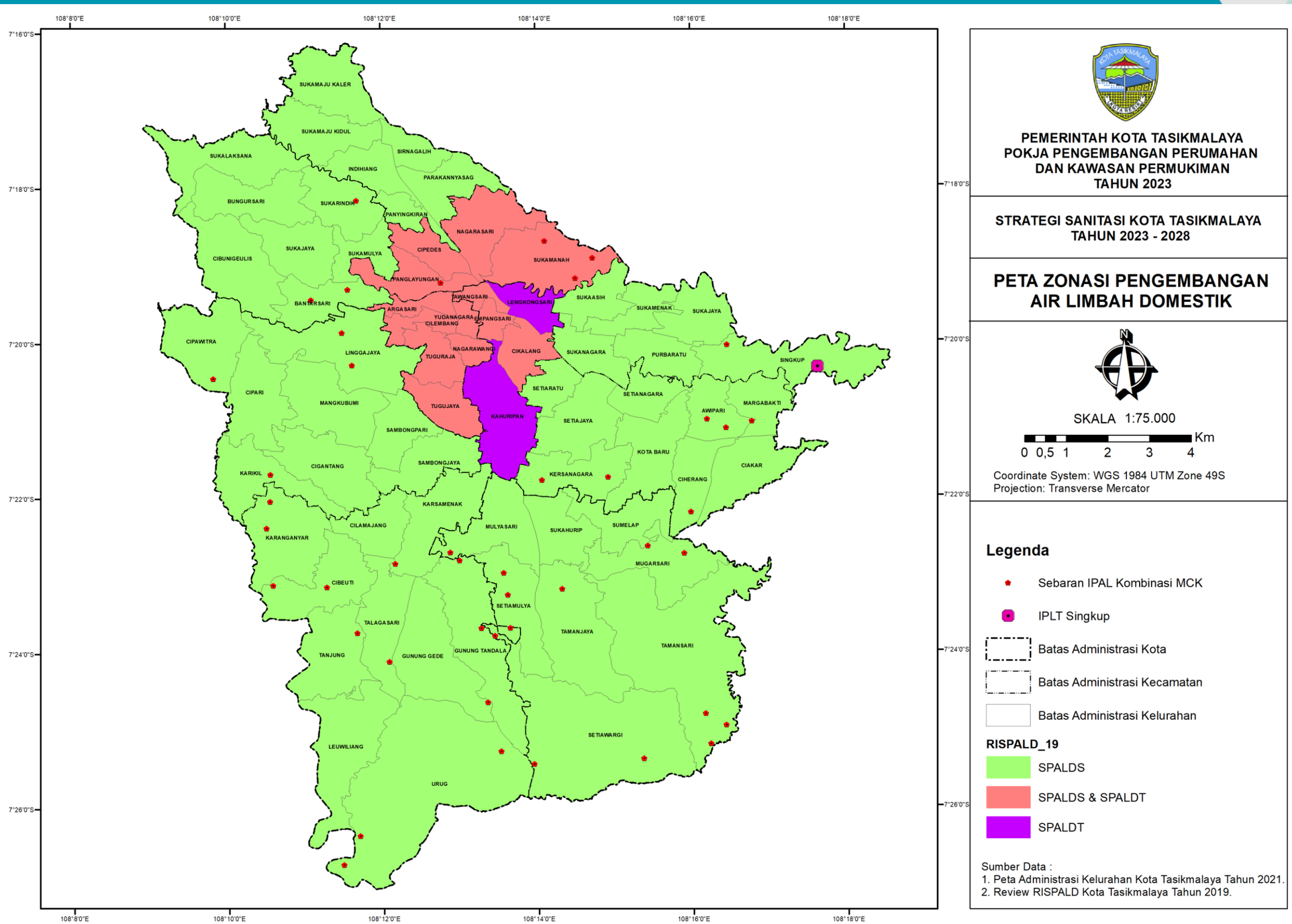

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2028

PETA ZONASI PENGEMBANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SKALA 1:75.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator

Legenda

- Sebaran IPAL Kombinasi MCK
- IPLT Singkup
- Batas Administrasi Kota
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan

RISPALD_19

- SPALDS
- SPALDS & SPALDT
- SPALDT

Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kelurahan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
2. Review RISPALD Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

Gambar 3. 1 Peta Zonasi Pengembangan Sistem ALD

Sumber: Dokumen RISPALD Kota Tasikmalaya Tahun 2019, diolah.

b. Tahapan Pengembangan Pengelolaan Persampahan Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, sistem pengelolaan persampahan terbagi atas upaya pengurangan dan penanganan. Perhitungan persentase capaian eksisting pengelolaan sampah Kota Tasikmalaya terdiri dari pengurangan sampah sebesar 16,5%, penanganan sampah sebesar 65,1% dan sampah tidak terkelola sebesar 18,4%. Penentuan pentahapan pengembangan pengelolaan sampah Kota Tasikmalaya, menggunakan bantuan Instrumen SSK Tahun 2023 meliputi, pengurangan dan penanganan sampah.

Berikut tahapan pengembangan pengelolaan persampahan Kota Tasikmalaya jangka pendek dan menengah, dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Tahapan Pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting	Target Cakupan	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wilayah Perkotaan				
1	Pengurangan Sampah	16,5%	28%	30%
2	Penanganan Sampah	65,1%	71%	70%
3	Sampah Tidak Terkelola	18,4%	1%	0%
Total		100%		

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya

Target penanganan sampah di kelurahan dalam hitungan ton pertahun. Pada Peta Rencana Pengembangan Penanganan Sampah Kota Tasikmalaya, terlihat penyebaran penanganan terbesar ada di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari, lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.2. di bawah ini.

Pada peta target pengurangan sampah di Kota Tasikmalaya, pengurangan terbesar tersebar di beberapa kelurahan di Kecamatan Kawalu, Kecamatan

Tamansari dan Kecamatan Cibeureum. Namun kelurahan tertinggi pengurangannya adalah Karsamenak Kecamatan Kawalu dan Mulyasari Kecamatan Tamansari. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.3. dibawah ini.

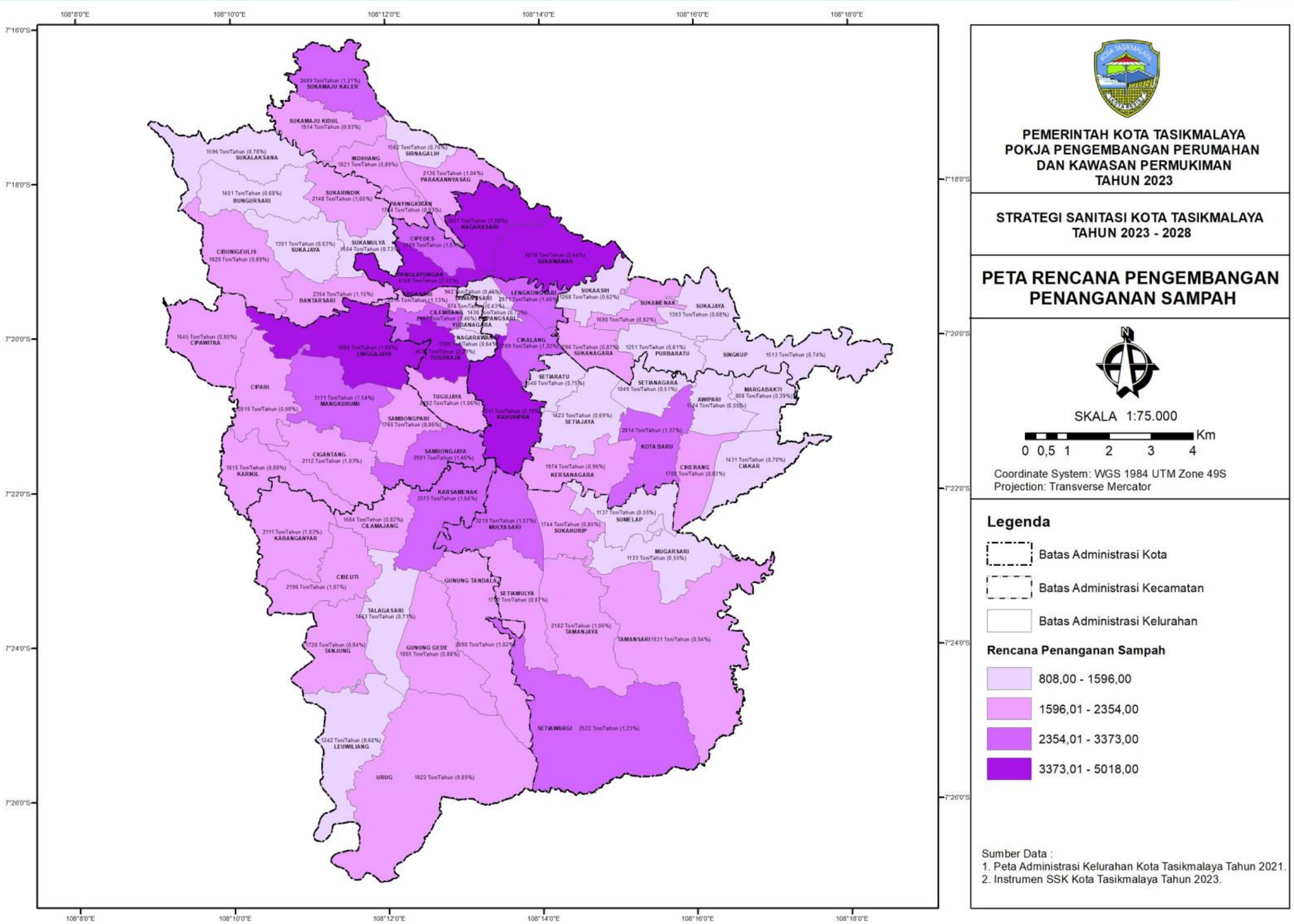

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2028

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PENANGANAN SAMPAH

SKALA 1:75.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator

Legenda

- Batas Administrasi Kota
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan

Rencana Penanganan Sampah

- 808,00 - 1596,00
- 1596,01 - 2354,00
- 2354,01 - 3373,00
- 3373,01 - 5018,00

Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kelurahan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
2. Instrumen SSK Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Gambar 3.2 Peta Rencana Pengembangan Penanganan Sampah di Kota Tasikmalaya

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

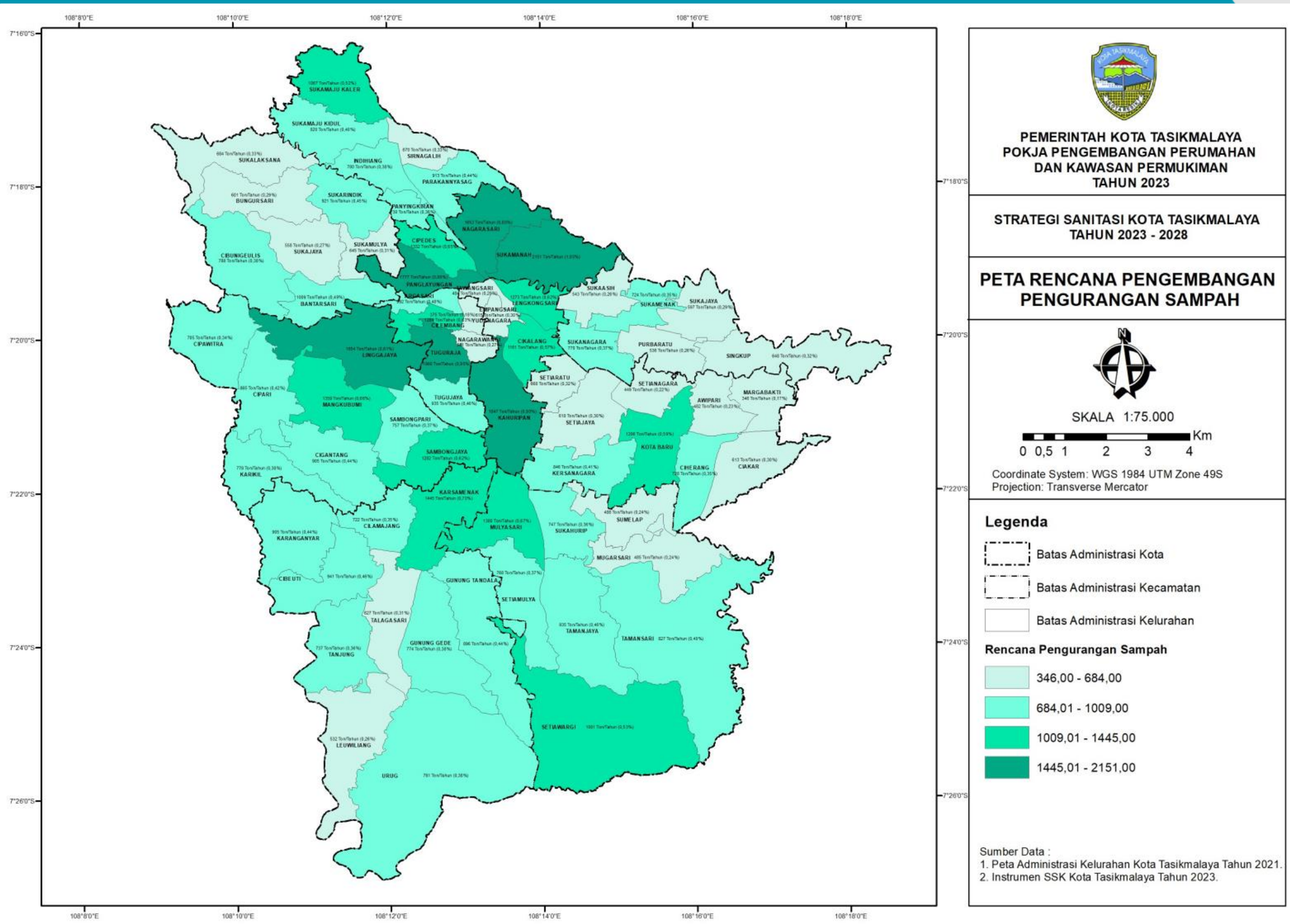

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2028

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PENGURANGAN SAMPAH

SKALA 1:75.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator

Legenda

- Batas Administrasi Kota
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan

Rencana Pengurangan Sampah

- 346,00 - 684,00
- 684,01 - 1009,00
- 1009,01 - 1445,00
- 1445,01 - 2151,00

Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kelurahan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
2. Instrumen SSK Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Gambar 3.3 Peta Rencana Pengembangan Pengurangan Sampah di Kota Tasikmalaya

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

3.2.3. Skenario pencapaian sasaran

Skenario pencapaian sasaran meliputi, air limbah demestik dan persampahan. Berikut skenario pencapaian sasaran Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Skenario Pencapaian Sasaran

Komponen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Air Limbah Domestik						
Akses Aman	4,7%	5,1%	9,9%	14,6%	19,3%	24,0%
Akses Layak	27,8%	38,8%	54,1%	69,4%	84,7%	100,0%
Akses Layak Perdesaan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Akses Belum Layak	37,7%	57,4%	43,1%	28,7%	14,4%	0,0%
BABS Tertutup	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
BABS Terbuka	34,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Persampahan						
Penanganan	65,1%	66,0%	67,0%	68,0%	69,0%	70,0%
Pengurangan	16,6%	19,3%	21,9%	24,6%	2730,0%	30,0%
Sampah Tidak Terkelola	18,0%	14,4%	10,8%	7,2%	3,6%	0,0%

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya,2023

Dari tabel 3.6 dapat diketahui bahwa target pengelolaan air limbah domestik di Kota Tasimalaya pada Tahun 2028 adalah tercapainya akses layak 100% termasuk didalamnya adalah akses aman 24% dan angka BABS 0%. Untuk mencapai target BABS 0% Pemerintah Kota Tasikmalaya akan lebih mengoptimalkan peran sanitarian melalui Program STBM untuk terus melaksanakan pemicuan berupa sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya perilaku higiene dan sanitasi yang baik kepada masyarakat. Khusus untuk MBR dan masyarakat yang bermukim daerah kumuh diupayakan bisa dibantu dalam hal penyediaan prasarana jamban sehat. Sedangkan untuk mencapai Akses Aman seperti yang ditargetkan akan lebih ditingkatkan lagi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik baik SPALD-Setempat maupun SPALD-Terpusat baik skala individual maupun skala komunal.

Untuk pengelolaan sampah direncanakan sampah tertangani sebesar 70% pada Tahun 2028 dan pengurangan sampah sebesar 30%. Pemerintah Kota Tasikmalaya akan berupaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah demi mencapai target 5 (lima) tahun kedepan diantaranya dengan memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui TPST, TPS3R, Bank Sampah Unit dengan didukung peran Pemerintah dalam penanganan sampah berupa penyediaan sarana-prasarana, penguatan kebijakan dan regulasi, serta bagaimana mengoptimalkan lembaga masyarakat yang sudah berperan terlebih dalam meningkatkan dan memperkuat kapasitas fiskal untuk pengelolaan sampah.

3.2.4. Kemampuan pendanaan sanitasi daerah

Kemampuan pendanaan sanitasi daerah meliputi perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi untuk lima (5) tahun kedepan. Pertumbuhan pendanaan APBD Kota Tasikmalaya untuk sanitasi sektor air limbah domestik rata rata sebesar 88% dan sektor persampahan rata rata sebesar 6%. serta untuk DAK sanitasi rata rata pertumbuhan pada 125%. Berikut kemampuan pendanaan sanitasi daerah Kota Tasikmalaya.

Tabel 3. 7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp).					Pertumbuhan Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2)						
1.1	Air Limbah Domestik	1,455,239,500	4,238,490,550	4,049,501,000	6,406,269,290	9,502,175,643	73%
1.2	Sampah Domestik	11,957,499,323	12,169,500,000	13,511,358,600	13,468,133,900	14,778,866,950	6%
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2)						
2.1	DAK Sanitasi	1,514,330,000	2,500,000,000	14,518,982,000	5,010,986,000	5,960,000,000	125%
2.2	DAK Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		11,898,408,801	13,907,990,528	3,041,877,578	14,863,417,168	18,321,042,571	88%
Total Belanja Langsung		1,545,632,541,908	2,006,571,531,692	2,604,971,882,145	3,381,827,360,544	2,003,436,764,110	12%
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		**0.8%**	**0.7%**	**0.1%**	**0.4%**	**0.9%**	**0.59%**
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Perkiraan besaran pendanaan sanitasi ke depan untuk perkiraan belanja langsung total pendanaan 312,94,000,000, untuk perkiraan APBD murni untuk sanitasi total pendanaan 120,589,000,000, serta untuk perkiraan komitmen pendanaan total pendanaan 100,000,000,000. Berikut perkiraan besaran pendanaan sanitasi ke depan Kota Tasikmalaya.

Tabel 3. 8 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

X Rp. 1 Juta

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Perkiraan Belanja Langsung	58,029	60,274	56,879	68,879	68,879	312,940
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	25,513	23,008	24,028	24,020	24,020	120,589
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000

Sumber : Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD kabupaten/kota untuk operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi untuk air limbah domestik biaya operasional / pemeliharaan (*justified*) rata rata pertumbuhan pada 5,26%, untuk sampah domestik domestik biaya operasional / pemeliharaan (*justified*) rata rata pertumbuhan pada 5,26%. Berikut perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD kabupaten/kota untuk operasional/ pemeliharaan dan investasi sanitasi Kota Tasikmalaya.

Tabel 3. 9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

X Rp. 1 Juta

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp).					Pertumbuhan Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi						
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan	287,846	302,996	318,943	335,730	353,400	5,26%
1.2	Sampah domestik						

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp).					Pertumbuhan Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan	658,487	693,144	729,626	768,027	808,450	5,26%

Sumber : Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Perkiraan besaran pendanaan APBD kota untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun untuk air limbah domestik biaya operasional / pemeliharaan (*justified*) total pendanaan 2,158,000,000, untuk sampah domestik domestik biaya operasional / pemeliharaan (*justified*) total pendanaan 4,937,000,000. Berikut perkiraan besaran pendanaan APBD kota untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun Kota Tasikmalaya.

Tabel 3. 10 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun

X Rp. 1 Juta

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Belanja Sanitasi						
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	391	410	431	452	475	2,158
1.2	Sampah domestik						
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	894	938	985	1,034	1,086	4,937

Sumber : Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Perkiraan kemampuan APBD kabupaten/kota dalam mendanai program/kegiatan SSK untuk perkiraan kebutuhan operasional/ pemeliharaan total pendanaan 7,096,000,000, untuk perkiraan APBD murni untuk sanitasi total pendanaan 120,589,000,000, untuk perkiraan komitmen

pendanaan sanitasi total pendanaan 100,000,000,000, untuk kemampuan mendanai SSK (APBD murni) total pendanaan 113,493,000,000, untuk kemampuan mendanai SSK (komitmen) total pendanaan 92,904,000,000. Berikut perkiraan kemampuan APBD kabupaten/kota dalam mendanai program/kegiatan SSK Kota Tasikmalaya.

Tabel 3. 11 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

X Rp. 1 Juta

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	1,284	1,348	1,416	1,487	1,561	7,096
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	25,513	23,008	24,028	24,020	24,020	120,589
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	24,229	21,660	22,612	22,533	22,459	113,493
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	18,716	18,652	18,584	18,513	18,439	92,904

Sumber : Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

BAB IV
STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Sesuai dengan arah kebijakan sanitasi dalam RPJMN 2020-2024 sistem layanan sanitasi berkelanjutan untuk Kota Tasikmalaya mengacu pada 5 (lima) arah kebijakan (sesuai lampiran Permendagri 87/2022 sebagai Pedoman) yaitu :

1. Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi;
2. Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi berkelanjutan;
3. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah;
4. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi;
5. Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan.

Hal ini sudah tercantum dalam RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Secara strategi meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi. Sesuai juga dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu penyediaan akses sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan.

Sesuai dengan penetapan visi dan misi terkait sanitasi maka untuk Kota Tasikmalaya visinya adalah :

“Kota Tasikmalaya Layak Sanitasi Tahun 2028”

Upaya dalam pencapaian visi ini dapat diterjemahkan ke misi sanitasi yang disesuaikan dengan arah kebijakan dengan dikembangkan ke beberapa strategi pengelolahan ALD dan Persampahan.

4.1 Air Limbah Domestik (ALD)

Misi Air Limbah Domestik : Meningkatnya akses Layak dan aman disektor air limbah domestik Kota Tasikmalaya. Dalam RPD 2023-2026 Kota Tasikmalaya strategi yang disampaikan adalah meningkatkan kualitas

infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi (air limbah), dengan arah kebijakan melalui peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama dan air limbah yang layak. Dan sudah disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMN 2020 - 2-24 yaitu Pembangunan Sistem Penyediaan Sanitasi di Perkotaan melalui peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi.

Maka dalam rangka mencapai misi tersebut, berikut ini adalah upaya beberapa strategi yang akan dilakukan :

Tabel 4.1 Strategi Penangangan Air Limbah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya akses Layak dan aman disektor air limbah domestik Kota Tasikmalaya	• Meningkatnya akses Layak air limbah domestik sebesar 100% dan akses aman air limbah domestik sebesar 24% pada Tahun 2028 • Meningkatnya kelurahan ODF 100% pada Tahun 2028	• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan akses air limbah domestik • Menghilangkan praktek BABS • Menyiapkan regulasi yang dapat mendukung pencapaian peningkatan akses air limbah • Penyiapan lembaga pengelola air limbah domestik dengan memisahkan fungsi regulator dan operator Penyiapan regulasi pengelolaan air limbah domestik • Promosi dan sosialisasi untuk menigkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelola air limbah domestik • Membentuk dan membina KSM/KPP pengelola air limbah domestik • Mengembangkan akses pendanaan dan kerja sama pengelolaan air limbah domestik

Sumber: Hasil analisis tim kecil Pokja PPKP Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Tabel 4.2 Matrik Kerangka Logis Pengelolaan Air Limbah

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
ASPEK TEKNIS • BABS : 34,1% (63.680 KK) • Akses terhadap jamban yang tidak layak: 37,7% (70.357 KK) • Sesuai data EHRA diperoleh tangki septik tidak aman diperoleh 90,4% dari • 2.760 kuisioner yang dijalankan • Akses layak 27,8% dan akses aman 4,7% • Kapasitas truk tinja terhadap total rumah tangga 7,64% dan 1,5% penyedotan ke rumah tangga • Kapasitas angkut terhadap IPLT 43,37% • Kapasitas penggunaan truk tinja 33,33% • Lumpur tinja diangkut ke IPLT sebesar 1,5% • Sarana dan prasarana pendukung IPLT belum memadai	Masih rendahnya capaian akses aman di Kota Tasikmalaya (akses aman 2023: 4,7%, akses layak 2023: 27,8% dan BABS 2023: 34,1%)	Terwujudnya akses Layak dan aman disektor air limbah domestik Kota Tasikmalaya	• Meningkatnya akses Layak air limbah domestik sebesar 100% dan akses aman air limbah domestik sebesar 24% pada Tahun 2028 • Meningkatnya kelurahan ODF 100% pada Tahun 2028	• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan akses air limbah domestik • Menghilangkan praktek BABS • Menyiapkan regulasi yang dapat mendukung pencapaian peningkatan akses air limbah • Penyiapan lembaga pengelola air limbah domestik dengan memisahkan fungsi regulator dan operator Penyiapan regulasi pengelolaan air limbah domestik • Promosi dan sosialisasi untuk menigkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelola air limbah domestik	Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Air Limbah Domestik Sesuai Dengan Karakteristik dan Kebutuhan Daerah	• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan	• Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota • Perencanaan dan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehtan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota • Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
• Terdapatnya sambungan rumah (SR) yang belum tersambung ke IPAL Komunal Skala Kawasan • Sulitnya mencari lahan untuk lokasi SPALD-T • Rusaknya beberapa bagian pada unit pengolah di beberapa IPAL eksisting **REGULASI** • Pelaksanaan Perda belum optimal • Belum ada Perwali tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal. • Belum peraturan turunan belum ada **KELEMBAGAAN** • Pengelolaan tangki septik komunal oleh KPP belum optimal karena belum ada kemandirian KPP. • Belum ada kerjasama dengan pihak swasta yang berusaha pada bidang penyedotan lumpur tinja				• Membentuk dan membina KSM/KPP pengelola air limbah domestik • Mengembangkan akses pendanaan dan kerja sama pengelolaan air limbah domestik		Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota • Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota • Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
PERAN SERTA MASYARAKAT • Peran serta masyarakat **dalam** pengolahan air limbah pada SPALD terpusat belum optimal dan berkelanjutan. • Persepsi, perilaku, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air **PENDANAAN** • Dukungan anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik masih terbatas • Penarikan retribusi air limbah belum optimal							

Sumber: Hasil analisis tim kecil Pokja PPKP Kota Tasikmalaya Tahun 2023

4.2 Pengelolahan Persampahan

Misi Persampahan : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan yang Berkelanjutan. Dalam RPD 2023-2026 Kota Tasikmalaya strategi yang disampaikan adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi (persampahan), dengan arah kebijakan melalui peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama persampahan. Dan sudah sesuai dengan arah kebijakan RPJMN 2020 - 2024 yaitu Pembangunan Sistem Penyediaan Sanitasi di Perkotaan melalui peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi.

Maka dalam rangka mencapai misi tersebut, upaya yang di lakukan adalah melalui beberapa strategi antara lain :

Tabel 4.3 Strategi Pengelolaan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya lingkungan bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan	• Meningkatnya pengurangan sampah • Optimalisasi penanganan sampah	• Meningkatkan sarana dan prasana pengelolaan sampah • Penyusunan dan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan • Pembinaan kelembagaan KSM pengelola TPS3R • Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta • Edukasi dan sosialisasi untuk menigkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelola sampah • Mengembangkan akses pendanaan dan kerja sama pengelolaan sampah

Sumber: Hasil analisis tim kecil Pokja PPKP Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Tabel 4.4 Matrik Kerangka Logis Pengelolaan Persampahan

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
ASPEK TEKNIS • Angka pengurangan sampah 16,66 % • Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah masih sedikit (0,52%) • Bank Sampah Unit seluruh kota sebanyak 24 unit dan bank sampah induk 2 unit dari 69 Kelurahan • Jumlah TPS 3R masih terbatas (2 unit) • Masih terbatasnya tempat sampah terpilah • Belum terpenuhinya sarana prasarana Bank Sampah Induk • Sulitnya memasarkan hasil produk 3R • Armada pengangkut sampah masih kurang dan beberapa mengalami kerusakan • Alat berat untuk operasional TPA Ciangir masih kurang	Masih rendahnya pengurangan sampah 16,5%, Adanya sampah yang tidak terkelola 34, 14%	Terwujudnya lingkungan bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan	• Meningkatnya pengurangan sampah • Optimalisasi penanganan sampah	• Meningkatkan sarana dan prasana pengelolaan sampah • Penyusunan dan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan • Pembinaan kelembagaan KSM pengelola TPS3R • Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta • Edukasi dan sosialisasi untuk menigkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelola sampah • Mengembangkan akses pendanaan dan	• Optimalisasi dan peremajaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah • Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	• Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	• Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
• TPA belum menerapkan sanitary landfill • Penerapan inovasi teknologi belum maksimal • Sisa umur TPA diperkirakan 3-5 tahun • Belum adanya TPST **REGULASI** • Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal • Pelaksanaan Perwalkot Nomor 22 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum optimal • Penerapan SOP belum optimal **KELEMBAGAAN** • Pengelolaan TPS3R oleh KSM belum optimal karena belum ada kemandirian KSM				kerja sama pengelolaan sampah			

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
• Belum optimalnya kerjasama dengan pihak swasta **PERAN SERTA MASYARAKAT** • Masih ada sebagian masyarakat yang belum tertib dalam membuang sampah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan • Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah **PENDANAAN** • Dukungan anggaran untuk pengelolaan persampahan masih terbatas • Penarikan retribusi persampahan belum optimal							

Sumber: Hasil analisis tim kecil Pokja PPKP Kota Tasikmalaya Tahun 2023

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1. Ringkasan

Kebutuhan anggaran sanitasi di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2028 adalah sebesar Rp. 1.461.000.700.000,- dengan rincian sektor air limbah sebesar Rp.1.394.425.700.000,- dan persampahan sebesar Rp.66.575.000.000,-. Adapun rincian kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan) lima (5) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	281.683.540	279.155.540	277.037.540	277.709.540	278.839.540	1.394.425.700
2	Persampahan	14.570	17.030	14.880	8.220	10.875	66.575.000
Jumlah		296.253.540	296.185.540	292.917.540	285.929.540	289.714.540	1.461.000.700

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitasi Dokumen SSK Pokja PKP Kota Tasikmalaya, 2023

Dari Kebutuhan anggaran sanitasi di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2028 sebesar Rp. 1.461.000.700.000,- kemampuan APBD Kota Tasikmalaya hanya dikisaran angka Rp. 30.534.300.000,-, sehingga ada selisih dengan kebutuhan total sebesar Rp. 1.430.466.400.000,- (97,91%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Kebutuhan Pendanaan	296.253.540	296.185.540	292.917.540	285.929.540	289.714.540	1.461.000.700
2	Kemampuan Pendanaan	5.264.860	8.644.860	5.994.860	5.994.860	5.134.860	30.534.300

No.	Uraian	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
3	Selisih (Rp)	(290.988.680)	(287.540.680)	(287.422.680)	(279.934.680)	(284.579.680)	(1.430.466.400)
4	Selisih (%)	98,22%	97,08%	98,12%	97,90%	98,23%	97,91%

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitasi Dokumen SSK Pokja PKP Kota Tasikmalaya, 2023

Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk sanitasi di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2028 sebesar Rp. 1.461.000.700.000,- diperoleh dari APBD Kota sebesar Rp. 30.534.300.000,-, APBD Provinsi sebesar Rp. 65.794.500.000,-, APBN sebesar Rp. 51.000.000.000,- DAK sebesar Rp. 21.500.000.000,- CSR sebesar Rp. 2.480.000.000,- dan Masyarakat sebesar Rp. 1.222.735.000.000,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

X Rp. 1 Juta

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kota	5.264.860	8.644.860	5.494.860	5.994.860	5.134.860	30.534.300
2	APBD Provinsi	16.772.900	15.082.900	15.382.900	7.572.900	10.982.900	65.794.500
3	APBN	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	51.000.000
4	DAK	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	21.500.000
Jumlah A		36.337.760	38.027.760	35.177.760	27.867.760	31.417.760	168.828.800
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	2.410.000				70	2.480
2	Masyarakat	244.540.000	244.540.000	244.540.000	244.540.000	244.575.000	1.222.735.000
Jumlah B		246.950.000	244.540.000	244.540.000	244.540.000	244.645.000	1.225.215.000
Total (A + B)		283.287.760	282.567.760	279.717.760	272.407.760	276.062.760	1.394.043.800
Daftar Tunggu (Kebutuhan - A - B)		12.965.780	13.617.780	13.199.780	13.521.780	13.651.780	66.956.900

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitasi Dokumen SSK Pokja PKP Kota Tasikmalaya, 2023

5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Kebutuhan anggaran sanitasi yang bersumber dari Pemerintah terdiri dari diperoleh dari. APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan DAK. Adapun anggaran yang bersumber dari APBD Kota sebesar Rp. 30.534.300.000,- terdiri dari Air Limbah sebesar Rp. 15.544.300.000,- dan

persampahan sebesar Rp. 14.990.000.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5.4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kota Tasikmalaya

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	3.244.860	3.274.860	2.774.860	3.124.860	3.124.860	15.544.300
2	Persampahan	2.020.000	5.370.000	2.720.000	2.870.000	2.010.000	14.990.000
Jumlah		5.264.860	8.644.860	5.494.860	5.994.860	5.134.860	30.534.300

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitasi Dokumen SSK Pokja PKP Kota Tasikmalaya, 2023

Kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi sebesar Rp. 30.534.300.000,- terdiri dari Air Limbah sebesar Rp. 15.544.300.000, dan Persampahan sebesar Rp. 14.990.000.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	6.222.900	5.422.900	4.222.900	4.222.900	4.222.900	24.314.500
2	Persampahan	10.550.000	9.660.000	11.160.000	3.350.000	6.760.000	41.480.000
Jumlah		16.772.900	15.082.900	15.382.900	7.572.900.	10.982.900	65.794.500

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitasi Dokumen SSK Pokja PKP Kota Tasikmalaya, 2023

Kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 51.000.000.000,- terdiri dari Air Limbah sebesar Rp. 41.000.000.000, dan Persampahan sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5.6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	9.000.000	41.000.000
2	Persampahan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
Jumlah		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	51.000.000

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitasi Dokumen SSK Pokja PKP Kota Tasikmalaya, 2023

Kebutuhan anggaran yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 21.500.000.000,- hanya untuk sektor air limbah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	21.500
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	21.500

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitasi Dokumen SSK Pokja PKP Kota Tasikmalaya, 2023

5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Kebutuhan anggaran pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah terdiri dari CSR/Swasta dan Masyarakat. Adapun besaran anggaran dari CSR/Swasta sejumlah Rp. 2.480.000.000,- yang terdiri dari Air Limbah Rp. 2.410.000.000,- dan Persampahan Rp. 70.000.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	2.410					2.410

2	Persampahan	0				70	70
Jumlah		2.410	-	-	-	70	2.480

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitasi Dokumen SSK Pokja PKP Kota Tasikmalaya, 2023

Kebutuhan anggaran pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah dari Masyarakat Rp. 1.222.735.000.000,-.Yang terdiri dari Air Limbah Rp. 1.222.700.000.000,- dan Persampahan Rp. 35.000.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.9 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	244.540.000	244.540.000	244.540.000	244.540.000	244.540.000	1.222.700.000
2	Persampahan	0	0	0	0	35	35
Jumlah		244.540.000	244.540.000	244.540.000	244.540.000	244.575.000	1.222.735.000

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitasi Dokumen SSK Pokja PKP Kota Tasikmalaya, 2023

5.4. Waiting List Pengembangan Sanitasi

Kebutuhan anggaran pengembangan sanitasi yang masuk ke dalam *waiting* list sejumlah Rp. 66.956.900.000,- yang keseluruhannya pembiayaan Air Limbah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.10 Rekapitulasi Waitng list

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	12.965.780	13.617.780	13.199.780	13.521.780	13.651.780	66.956.900
2	Persampahan						
Jumlah		12.965.780	13.617.780	13.199.780	13.521.780	13.651.780	66.956.900

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitasi Dokumen SSK Pokja PKP Kota Tasikmalaya, 2023

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA

Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan strategi sanitasi di Kota Tasikmalaya merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan, dampak, kendala pelaksanaan serta usulan rekomendasi perbaikan pembangunan yang diperlukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian SSK ini dilakukan berdasarkan prinsipprinsip antara lain sebagai berikut :

- ✓ dilakukan secara objektif dan transparan;
- ✓ melibatkan pihak-pihak terkait dan berkepentingan;
- ✓ dapat dipertanggungjawabkan;
- ✓ dilakukan tepat waktu dan berkesinambungan;
- ✓ berbasis indikator kinerja;
- ✓ efektif dan;
- ✓ efisien.

Dalam hal kegiatan yang bersifat monitoring dan evaluasi pada pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di daerah tahun 2022-2024 tugas dan peran kelompok kerja sangat strategis. Anggota kelompok kerja PKP Kota Tasikmalaya yang terdiri dari OPD/SKPD lintas sektor didorong untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan implementasi pembangunan sanitasi di daerahnya melalui perangkat monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi berbasis teknologi informasi, yaitu NAWASIS (National Water and Sanitation Information Services/Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional), melalui pelaporan pemantauan yang mencakup 3 (tiga) modul yaitu:

1) Modul Data Teknis yang memuat informasi capaian akses air limbah domestik dan capaian akses sampah perkotaan;
2) Modul Program dan Pendanaan yang memuat informasi rencana dan

pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam SSK dan nilai investasinya serta output dan outcome masing-masing program/kegiatan;

3) Modul Sarana dan Prasarana yang memuat informasi tentang sistem, jenis dan jumlah infrastruktur eksisting termasuk informasi mengenai keberfungsiannya.

Secara spesifik, informasi ini perlu dituangkan dalam bentuk tabel (minimum) berikut ini:

Tabel 6.1 Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Tahun 2024-2028

No	Objek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/Pemantau		Penerima Laporan (Dinas/Badan/Institusi)
1	Input Capaian Strategis													Tim Kecil Pokja PKP	Disperwaskim DLH,DPUTR	Disperwaskim DLH,DPUTR dan Dinkes	Triwulan pertama	Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan Pokja Provinsi Jawa Barat
2	Input menu investasi													Tim Kecil Pokja PKP	Disperwaskim DLH,DPUTR	Disperwaskim DLH,DPUTR dan Dinkes	Pert Triwulan	Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan Pokja Provinsi Jawa Bara
3	Input menu akses													Tim Kecil Pokja PKP	Disperwaskim DLH,DPUTR	Disperwaskim DLH,DPUTR dan Dinkes	Pert Triwulan	Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan Pokja Provinsi Jawa Bara
4	Input menu infrastruktur													Tim Kecil Pokja PKP	Disperwaskim DLH,DPUTR	Disperwaskim DLH,DPUTR dan Dinkes	Pert Triwulan	Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan Pokja Provinsi Jawa Bara
5	Input menu progres													Tim Kecil Pokja PKP	Disperwaskim DLH,DPUTR	Disperwaskim DLH,DPUTR dan Dinkes	Pert Triwulan	Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan Pokja Provinsi Jawa Bara
6	Pelatihan Nawasis													Tim Kecil Pokja PKP	Bappelitbangda	Disperwaskim DLH,DPUTR dan Dinkes	Awal Tahun	Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan Pokja Provinsi Jawa Bara
7	Evaluasi													Pokja PKP Bidang Sanitasi	Bappelitbangda	Disperwaskim DLH,DPUTR dan Dinkes	Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun	Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan Pokja Provinsi Jawa Bara

Sumber: Hasil Analisis Tim Kecil Pokja PPKP Kota Tasimalaya, 2023

Adapun tata cara pelaksanaan, prosedur dan mekanisme monev dalam kerangka koordinasi lintas perangkat daerah seperti pada tabel 6.1 adalah sebagai berikut :

1. Input Capaian Strategis : sesuai dengan rencana dilakukan pada awal tahun yaitu Januari hingga Maret dengan penanggung jawab utama adalah Tim Kecil Pokja PKP yang telah mengawal penyusunan Dokumen SSK 2023-2028, pengumpul data dan dokumentasi dilakukan oleh Disperwaskim, DLH,DPUTR, sedangkan pengolah data dan pemantau adalah Disperwaskim, DLH,DPUTR dan Dinkes, yang kemudian pelaporannya disampaikan ke Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan diteruskan ke Pokja Provinsi Jawa Barat.

2. Input Menu Investasi : sesuai dengan rencana dilakukan pada awal tahun yaitu Maret, Juni, September, dan Desember dengan penanggung jawab utama adalah Tim Kecil Pokja PKP yang telah mengawal penyusunan Dokumen SSK 2023-2028, pengumpul data dan dokumentasi dilakukan oleh Disperwaskim, DLH,DPUTR, sedangkan pengolah data dan pemantau adalah Disperwaskim, DLH,DPUTR dan Dinkes, yang kemudian pelaporannya disampaikan ke Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan diteruskan ke Pokja Provinsi Jawa Barat.
3. Input Menu Akses : sesuai dengan rencana dilakukan pada awal tahun yaitu Maret, Juni, September, dan Desember dengan penanggung jawab utama adalah Tim Kecil Pokja PKP yang telah mengawal penyusunan Dokumen SSK 2023-2028, pengumpul data dan dokumentasi dilakukan oleh Disperwaskim, DLH,DPUTR, sedangkan pengolah data dan pemantau adalah Disperwaskim, DLH,DPUTR dan Dinkes, yang kemudian pelaporannya disampaikan ke Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan diteruskan ke Pokja Provinsi Jawa Barat.
4. Input Menu Infrastruktur : sesuai dengan rencana dilakukan pada awal tahun yaitu Maret, Juni, September, dan Desember dengan penanggung jawab utama adalah Tim Kecil Pokja PKP yang telah mengawal penyusunan Dokumen SSK 2023-2028, pengumpul data dan dokumentasi dilakukan oleh Disperwaskim, DLH,DPUTR, sedangkan pengolah data dan pemantau adalah Disperwaskim, DLH,DPUTR dan Dinkes, yang kemudian pelaporannya disampaikan ke Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan diteruskan ke Pokja Provinsi Jawa Barat.
5. Input Progres : sesuai dengan rencana dilakukan pada awal tahun yaitu Maret, Juni, September, dan Desember dengan penanggung jawab utama adalah Tim Kecil Pokja PKP yang telah mengawal penyusunan Dokumen SSK 2023-2028, pengumpul data dan dokumentasi dilakukan oleh Disperwaskim, DLH,DPUTR, sedangkan pengolah data dan pemantau adalah Disperwaskim, DLH,DPUTR dan Dinkes, yang kemudian pelaporannya disampaikan ke Ketua Pokja Kota Tasimalaya

dan diteruskan ke Pokja Provinsi Jawa Barat.

6. Pelatihan Nawasis : dilakukan pada awal tahun dengan penanggung jawab utama tetap pada Tim Kecil Pokja PKP yang telah mengawal penyusunan Dokumen SSK 2023-2028, pengumpul data dan dokumentasi dilakukan oleh Bappelitbangda, sedangkan pengolah data dan pemantau adalah Disperwaskim, DLH,DPUTR dan Dinkes, yang kemudian pelaporannya disampaikan ke Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan diteruskan ke Pokja Provinsi Jawa Barat.
7. Evaluasi : pada tahap ini dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pertengahan tahun dan akhir tahun dengan penanggung jawab adalah Pokja PKP Bidang Sanitasi, yang kemudian pengumpul data dan dokumentasi dilakukan oleh Bappelitbangda, sedangkan pengolah data dan pemantau adalah Disperwaskim, DLH,DPUTR dan Dinkes, yang kemudian pelaporannya disampaikan ke Ketua Pokja Kota Tasimalaya dan diteruskan ke Pokja Provinsi Jawa Barat.

Lampiran 1

RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN EHRA

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Gambaran Umum

Kota Tasikmalaya terletak antara 108008’38” BT-108024’02” BT dan antara 7010’ LS-7026’32” LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang seluas 17.156,20 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan.

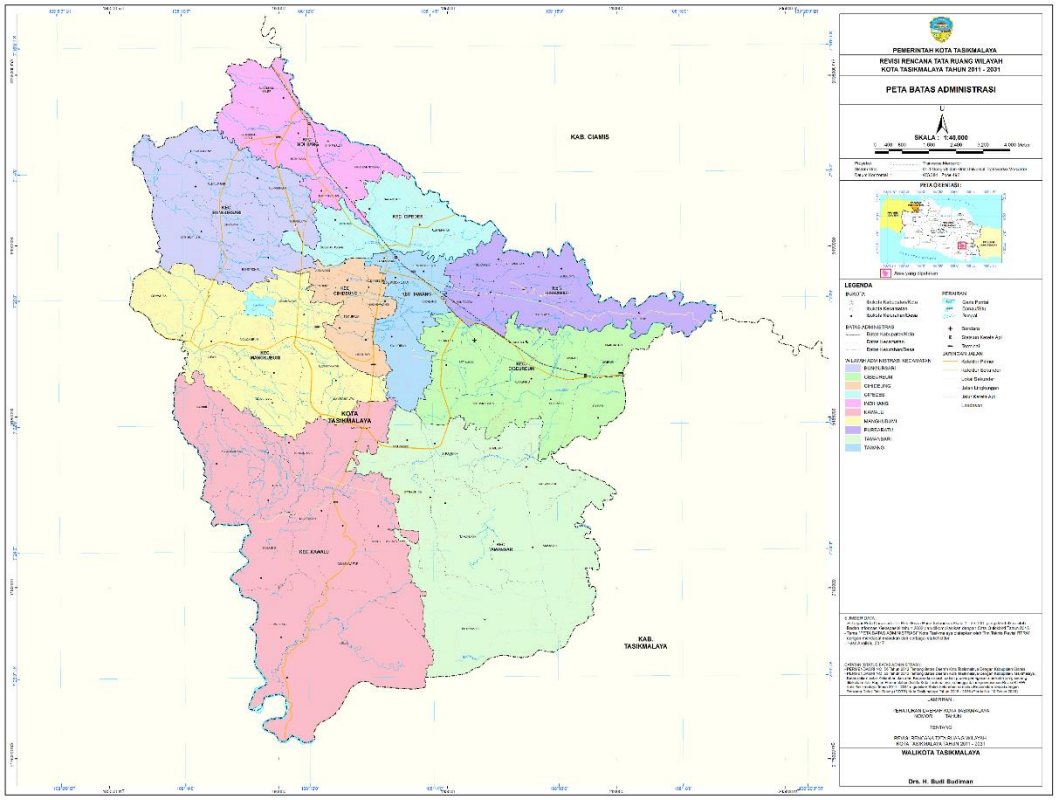

Gambar 1 Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah di Kota Tasikmalaya
Sumber : Data BIG (diolah), 2017

Pada tahun 2023, Kota Tasikmalaya memiliki penduduk sejumlah 746.710 jiwa dengan 186.703 rumah tangga. Luas daerah terbangun di Kota Tasikmalaya yaitu seluas 2.511,23 ha dengan kepadatan terbangun 2.989,44 jiwa/ha. Untuk data jumlah penduduk, jumlah kelurahan dan luas wilayah per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan Terbangun (jiwa/ha)
1	KAWALU	10	307,62	101.289	25.325	329,27
2	TAMANSARI	8	255,38	81.310	20.331	318,39
3	CIBEUREUM	9	280,26	71.974	17.998	256,81
4	PURBARATU	6	149,89	46.261	11.568	308,63
5	TAWANG	5	258,28	64.222	16.057	248,65
6	CIHIDEUNG	6	286,66	73.991	18.500	258,11
7	MANGKUBUMI	8	322,61	100.621	25.158	311,9
8	INDIHIANG	6	186,71	60.332	15.085	323,13
9	BUNGURSARI	7	194,72	62.957	15.741	323,32
10	CIPEDES	4	269,1	83.753	20.940	311,23
		69	**2511,23**	**746.710**	**186.703**	**2.989,44**

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

B. Profil sanitasi Kota Tasikmalaya

Sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sedangkan pengertian yang lebih teknis dari sanitasi adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan persampahan (Bappenas, 2003). Dari definisi tersebut ada tiga aspek yang terkait dengan sanitasi adalah pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan.

1. Air Limbah Domestik

Untuk capaian akses air limbah domestik di wilayah Kota Tasikmalaya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Deskripsi	Capaian	Jumlah (RT)
	Wilayah Perkotaan		
A	**Akses aman**	**4,7%**	**8.822**
B	**Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)**	**27,8%**	**51.816**
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	14,6%	27.300
	Akses Layak Bersama	8,4%	15.694
C	**Akses Belum Layak**	**37,7%**	**70.357**
D	**BABS Tertutup**	**0,0%**	**-**
E	**BABS di Tempat Terbuka**	**34,1%**	**63.680**

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Dapat terlihat dari tabel diatas bahwa angka BABS 34,1% untuk menjadi prioritas ditangani. Tingginya angka BABS menjadi prioritas dalam penanganan untuk penyelesaian sanitasi buruk di Kota Tasikmalaya. Untuk akses aman masih 4,7%, peningkatan akses aman dapat didorong dengan memanfaatkan idle kapasitas Truk Tinja, IPLT, dan IPAL. Angka capaian akses belum layak 37,7% menggambarkan penduduk yang belum memiliki infrastruktur user interface dan pengolahan yang layak. Ini dapat menjadi potensi sasaran penduduk untuk pembangunan infastruktur SPALD dan SPALDT tanpa perlu didahului dengan pemicuan.

Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat di Kota Tasikmalaya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan truk tinja sejumlah 3 unit dengan kapasitas 3 m3 dan volume 18 m3/hari. Jumlah rumah tangga yang terlayani adalah 4 rumah tangga/hari. Kondisi sarana pengangkutan air limbah seperti pada gambar dibawah ini menunjukkan ada tersedia truk tinja namun dalam opersionalnya dibutuhkan pemeliharaan.



Gambar 2 Sarana Pengangkutan Air Limbah

Sumber: Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, 2023

Sub-Sistem Pengolahan Lupur Tinja (SPALD-Setempat) di Kota Tasikmalaya melalui IPLT SIngkup yang dibangun tahun 2014 dengan kapasitas 38 m3/hari. Wilayah cakupan layanan IPLT Singkup terdekat radius 1 km dan terjauh radius 25 km. Sistem yang digunakan Bak penerima-saringan+grease trap - Anaerobic digester - Kolam anaerob-kolam fakultatif-kolam maturasi - Anaerobic digester-sludge drying bed-pengomposan-pemanfaatan padatan. Pada IPLT sudah terdapat fasilitas pendukung seperti sumber air, pagar, dan jalan akses dengan perkerasan aspal.





Gambar 3 Kondisi Sarana Pengolahan Air Limbah

Sumber: Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, 2023

IPLT Singkup berada di Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Lokasi IPLT dilihat dari Citra pada gambar berikut.



Gambar 4 Suasana lingkungan di area IPLT Singkup
Sumber: Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, 2023

Untuk infrastruktur IPALD yang terdata ada 86 (delapan puluh enam) yang terbangun dan tersebar di beberapa kelurahan dengan masing-masing kapasitas rata-rata 20 m3/hari. Kondisi bangunan saat ini baik, namun dalam pengoperasiannya masih belum semuanya optimal.

2. Persampahan

Capaian akses layanan sampah perkotaan meliputi, pengurangan sampah, penanganan sampah dan sampah yang tidak dikelola. Berikut capaian akses layanan sampah perkotaan Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	16,5%
2	Penanganan Sampah	65,1%
3	Sampah Tidak Terkelola	18,4%
Total		100%

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Timbulan Sampah

Timbulan sampah meliputi, timbulan sampah rumah tangga, perkotaan serta data komposisi sampah. Timbulan sampah di Kota Tasikmalaya

sebesar 560,04 ton/hari. Berdasarkan laporan akhir kajian timbulan sampah pada tahun 2017 untuk data timbulan sampah di daerah non permukiman diperoleh sampah organik sebesar 48% dan sampah anorganik 52%. Untuk tahun 2023 perkembangan terakhir sedang dalam kajian.

Pengumpulan

Pengumpulan sampah di Kota Tasikmalaya dilakukan dengan gerobak dan gerobak motor. Jumlah gerobak di Kota Tasikmalaya adalah 100 unit dengan kapasitas angkut 150 m3. Untuk jumlah gerobak motor adalah 28 unit dengan kapasitas angkut 42 m3. Jumlah ritasi dari gerobak dan gerobak motor adalah 3 ritasi per hari.



Gambar 5 Motor Roda Tiga

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023

Penampungan Sementara dan Pengangkutan

Penampungan sementara dan pengangkutan meliputi, jumlah TPS, kapasitas TPS, jumlah alat angkut, kapasitas alat angkut, ritasi pengangkutan. Berikut penampungan sementara dan pengangkutan Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	Unit	2
	TPS	Unit	22
	Kontainer	Unit	66

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	Tong Sampah Pejalan Kaki	Unit	500
2	KapasitasTPS		
	Transfer depo	M3	6
	TPS	M3	4
	Kontainer	M3	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	M3	1
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truck	Unit	0
	Arm Roll Truck	Unit	12
	Dump Truck	Unit	27
	Pick Up	Unit	3
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truck	M3	0
	Arm Roll Truck	M3	72
	Dump Truck	M3	162
	Pick Up	M3	12
5	Ritasi pengangkutan	Rit/hari	3

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023



Gambar 6 Dump Truck

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan data yang ada, untuk keberfungsian infrastruktur Sampah di setiap kecamatan Kota Tasikmalaya telah tersedia, namun sebagian perlu perawatan dan penanganan, karena kondisinya belum memenuhi standar pemeliharaan. Dan penempatannya masih berada di lingkungan yang mengganggu lingkungan setempat karena tidak baik dilihat langsung dan merusak pemandanga/ view sekitarnya. Penanganan pengangkutan masih belum sesuai dengan jam pengoperasian. Sehingga saat jam kerja, masih terlihat adanya pengangkutan sampah dan pembuangan sampah tidak pada

jam yang telah ditentukan. Masyarakat dalam membuang sampah belum memilah sesuai dengan jenis sampahnya.



Gambar 7 Kondisi Container Baik (kiri) dan Tidak Baik (kanan)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023

Pengolahan

Pengelolaan dilakukan pada TPST, TPS3R dan bank sampah. Untuk saat ini, Kota Tasikmalaya, belum memiliki tersedia TPST, yang ada hanyalah TPS 3R, Bank Sampah dan Sektor informal yang sudah bekerjasama dengan pemda dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.

Pemprosesan Akhir

Pemprosesan akhir di Kota Tasikmalaya terdapat di TPA Ciangir. TPA Ciangir terletak di Kecamatan Tamansari dengan luas lahan 11 ha dan luas sel terbangun 8,8 ha dengan sistem open dumping. TPA Ciangir dibangun tahun 2002 dengan usia pakai hingga 25 tahun. Terdapat 2 unit alat berat yang beroperasi yaitu bulldozer dan excavator. Jumlah sampah yang ditimbun di TPA adalah 253,18 ton dan sampah yang diolah sebesar 100 ton/hari.



Gambar 8 Kondisi dan situasi TPA Ciangir

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023

Pengurangan sampah

Pengurangan sampah merupakan pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan pada sumbernya oleh masyarakat. Pengurangan sampah di Kota Tasikmalaya dilakukan melalui TPS3R, Bank Sampah, serta sektor informal yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Untuk saat ini di Kota Tasikmalaya terdapat 2 TPS 3R, 26 bank sampah dan 27 sektor informal.



Gambar 9 Bank Sampah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kota Tasikmalaya, 2023

C. Gap pencapaian target akses sesuai RPJMN 2020-2024

Adapun gap pencapaian target akses air limbah domestic sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Provinsi Jawa Barat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2028(%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2023	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya			
1	**Akses Aman**	15 %	20 %	24 %	5,1 %	4,7 %	19,3 %	0,4 %
2	**Akses Layak**	90 %	90 %	100 %	38,8 %	27,8 %	72,2 %	11,0 %
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%	0%	52,3 %	22,2 %	14,6 %	37,7 %	7,5 %
	Akses Layak Bersama	0%	0%	23,7 %	11,5 %	8,4 %	15,3 %	3,1 %
3	**Akses Belum Layak***	0%	0 %	0 %	61,2 %	37,7 %	-37,7 %	23,5 %
4	**BABS Tertutup**							
5	**BABS di Tempat Terbuka**	0%	0 %	0 %	0.0%	34,1 %	-34,1 %	-34,1 %

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Adapun gap pencapaian target akses sampah perkotaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Provinsi Jawa Barat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2028 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2023	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya			
1	**Penanganan Sampah Perkotaan**	**80%**	83.0%	70.0%	71.0%	65,1%	4,9%	5,9%
2	**Penguranganan Sampah Perkotaan**	**20%**	17.0%	30.0%	28.0%	16,5%	13,5%	11,5%

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

D. Hasil analisis utilisasi infrastruktur eksisting dan analisis rantai layanan

Berdasarkan hasil analisis keberfungsian, untuk infrastruktur SPALD-S, prosentasenya masih dibawah 50%, dan SPALD-T permukiman mencapai 100%.

Tabel 7 Analisis Keberfungsian

Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	31,58 %
Kapasitas penggunaan truk	33,33 %
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	47,37 %
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	17,97 %
Kapasitas IPLT terhadap total RT	8,51 %
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	100 %
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	-
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	-

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Seperti terlihat pada hasil analisis gambar Rantai Layanan ALD yang menunjukkan bahwa yang harus ditangani oleh Dinas Kesehatan (STBM) adalah akses belum layak yang mencapai 37,7%,dan BABS yang masih 34,1%.

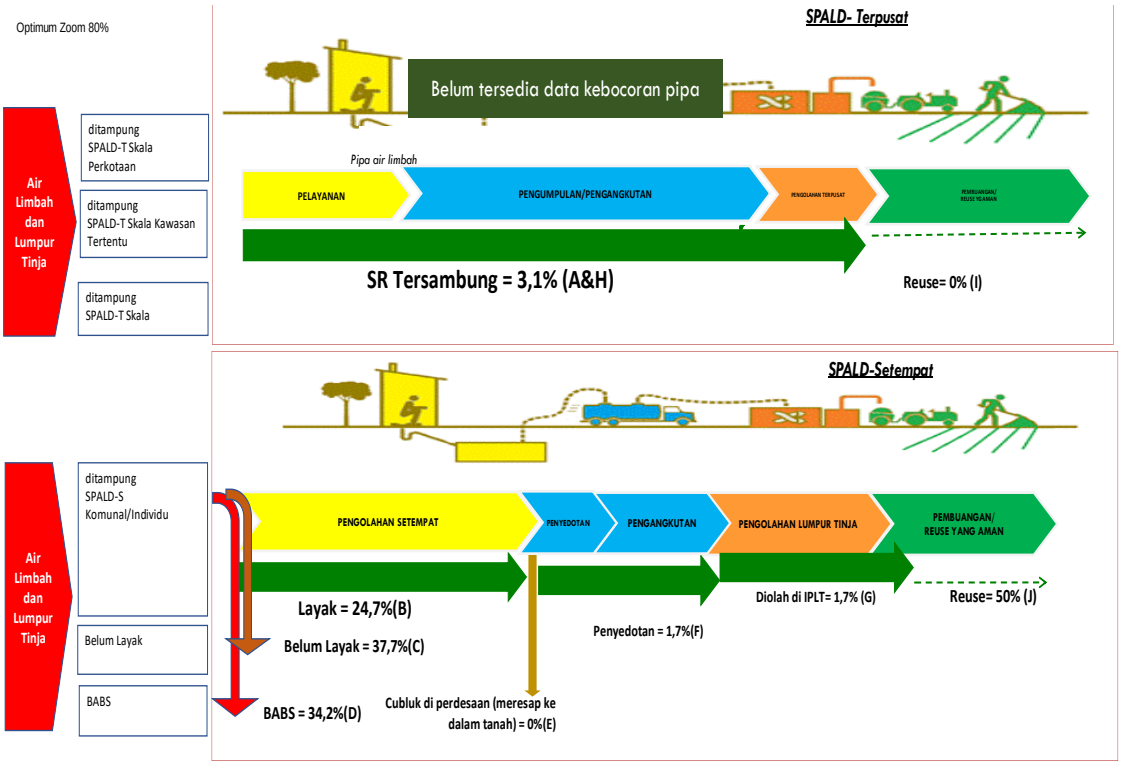

Gambar 10 Analisis Rantai Layanan ALD

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Keterangan:

A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PU	3,1%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	Dinas PU	3,1%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	0%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PU	27,7%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	37,7%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	0%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas LH	1,7%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT	Dinas LH	1,7%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UPT	50%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	34,2%

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Analisis rantai layanan persampahan meliputi, penanganan dan pengurangan di wilayah perkotaan. Berikut analisis rantai layanan sanitasi Kota Tasikmalaya, yang dilihat pada gambar berikut ini.

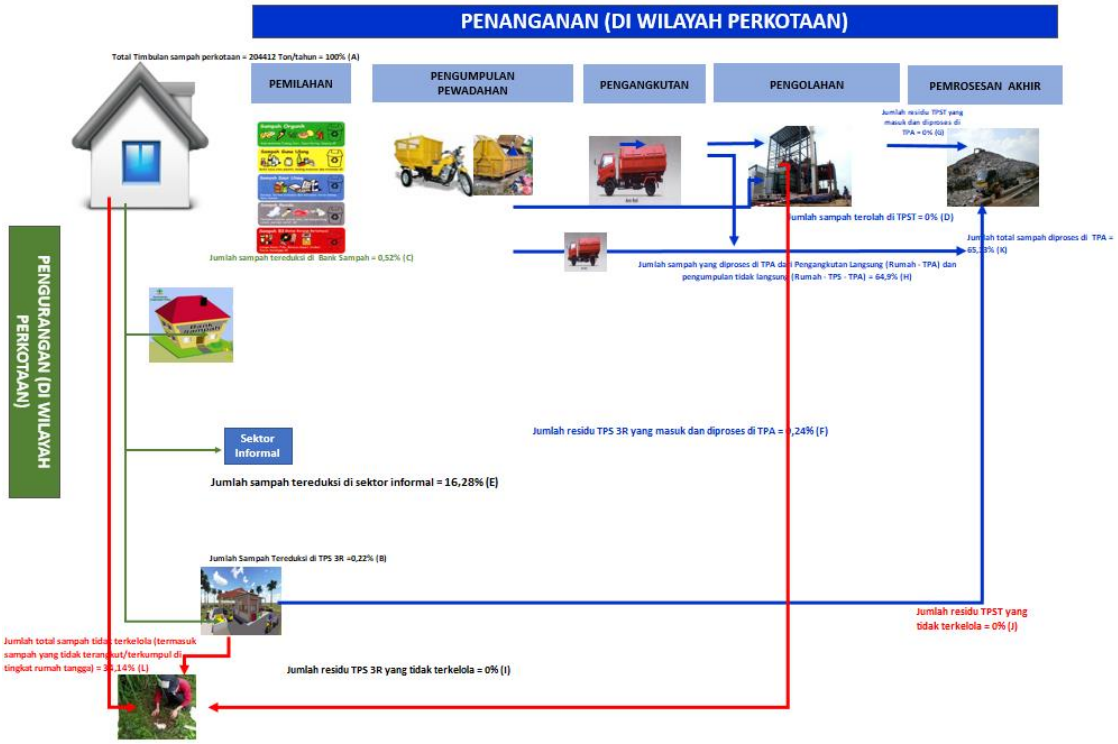

Gambar 11 Rantai Layanan Sanitasi Kota Tasikmalaya

Sumber: Instrumen SSK Kota Tasikmalaya, 2023

Keterangan :

		Ton/tahun	Persentase (%)
A	Total Timbulan sampah perkotaan	204.411,86	100,00%
B	Jumlah Sampah Tereduksi di TPS 3R	446,02	0,22%
C	Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah	1.055,95	0,52%
D	Jumlah sampah terolah di TPST	-	0,00%
E	Jumlah sampah tereduksi di sektor informal	33.260,63	16,27%
F	Jumlah residu TPS 3R yang masuk dan diproses di TPA	470,74	0,23%
G	Jumlah residu TPST yang masuk dan diproses di TPA	-	0,00%
H	Jumlah sampah yang diproses di TPA dari Pengangkutan Langsung (Rumah - TPA) dan pengumpulan tidak langsung (Rumah - TPS - TPA)	132.653,95	64,90%
I	Jumlah residu TPS 3R yang tidak terkelola	-	0,00%
J	Jumlah residu TPST yang tidak terkelola	-	0,00%
K	Jumlah total sampah diproses di TPA	133.124,69	65,13%
L	Jumlah total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di tingkat rumah tangga)	69.785,20	34,14%

E. Profil kelembagaan pengelola sanitasi

Aspek kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik, peran pemerintah masih sangat dominan. Beberapa perangkat daerah berkolaborasi dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Tasikmalaya. Secara kelembagaan dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, SKPD terkait pengelolaan air limbah domestik adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic saat ini terdata terdapat 18 lembaga atau pemerhati yang mengelola infrastruktur yang tersedia di kelurahan mereka. Beberapa kelompok masyarakat yang belum terdata, karena sebagian merupakan keinginan secara sukarela atau karena banyak faktor lain yang mempengaruhinya.

Tabel 8 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	- Bidang Permukiman, DPUTR - Bidang PIK, Bappelitbangda - Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes		
Menyusun rencana program dan anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target	Bidang Permukiman		
PENGADAAN SARANA			
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Bidang Permukiman	UPTD SPALD	
Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	Bidang Permukiman		
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Bidang Permukiman		
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	Bidang Permukiman		

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Bidang Permukiman		
PENGELOLAAN			
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja		UPTD SPALD	
Mengelola IPLT dan atau IPAL		UPTD SPALD	
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja		UPTD SPALD	
Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik		UPTD SPALD	
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB		UPTD SPALD	
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Permukiman	UPTD SPALD	
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	Bidang Permukiman	UPTD SPALD	
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestik	Bidang Permukiman	UPTD SPALD	
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	Bidang Permukiman		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Bidang Permukiman	UPTD SPALD	
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	Bidang Permukiman	UPTD SPALD	
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	Bidang Permukiman	UPTD SPALD	

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

Aspek kelembagaan dalam pengelolaan persampahan, peran pemerintah masih sangat dominan. Beberapa perangkat daerah

berkolaborasi dalam pengelolaan persampahan di Kota Tasikmalaya. Secara kelembagaan dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, SKPD terkait pengelolaan persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Untuk kelembagaan masyarakat, pengelolaan masyarakat dikelola oleh kelompok masyarakat yang saat ini aktif dan dalam pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. Lembaga kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan dilakukan untuk mengelola bank sampah yang berjumlah 25 unit, TPS3R berjumlah 2 unit dan 28 sektor informal yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Tabel 9 Pemetaan Tugas dan Fungsi terkait Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	**Pemerintah Daerah**		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	**UPTD/BLU**	**PD dan sebagainya**
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan, rencana program dan rencana anggaran program sampah skala kabupaten/kota,	Bidang Pengelolaan Sampah DLH, Bappelitbangda		
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Membangun sarana TPS, sarana pengangkutan dari TPS ke TPA	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Membangun sarana TPA	Bidang Pengelolaan Sampah DLH	UPTD TPA	
PENGELOLAAN			
• Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS • Mengelola sampah di TPS • Mengangkut sampah dari TPS ke TPA • Melakukan pemilahan sampah • Melakukan penarikan retribusi sampah • Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
• Mengelola TPA	Bidang Pengelolaan Sampah DLH	UPTD TPA	
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
• Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) • Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah • Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah • Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target, kapasitas infrastruktur sarana dan efektivitas layanan persampahan serta keluhan atas pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota	Bidang Pengelolaan Sampah DLH		

Sumber: Analisa Tim Teknis Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Pokja PPKP Kota Tasikmalaya, 2023

F. Profil komunikasi dan advokasi

Komunikasi dan media berisi kegiatan komunikasi terkait dengan promosi hygine dan sanitasi, peta media komunikasi dan kerjasama terkait sanitasi di Kota Tasikmalaya. Kegiatan komunikasi terkait sanitasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic dan persampahan serta pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun kegiatan komunikasi dan media komunikasi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 10 Kegiatan dan Media Komunikasi terkait Sanitasi

No.	Kegiatan Komunikasi	Media Komunikasi
Pengelolaan Air Limbah		
1	1. Pemicuan STBM 2. Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) 3. Deklarasi ODF 4. Kampanye Jahe Asik (Jamban Sehat) 5. Sosialisasi layanan penyedotan lumpur tinja 6. Jawara ODF 7. Hygine Sanitasi Sekolah	1. Sosialisasi langsung ke masyarakat 2. Radio 3. Sosial media Instagram: @kominfo_pemkot_tasik @dinkes.kota.tasikmalaya @dputr_tasik 4. Televisi lokal (Radar TV) 5. Koran Elektronik (Radar)
Pengelolaan Persampahan		

No.	Kegiatan Komunikasi	Media Komunikasi
2	1. Sosialisasi Pengelolaan Sampah 2. Gedong Resik 3. Gerakan Donasi Sampah dan Jelantah Ngarah Resik 4. GoSo Gerakan Olah Sampah Organilk 5. Satgas Tasik Resik	1. Sosialisasi langsung ke masyarakat 2. Radio 3. Sosial Media 4. Instagram: @kominfo_pemkot_tsm) @dlh_tasikkota 5. Website Goso 6. Youtube 7. Televisi 8. Koran Elektronik

Sumber: Hasil analisis tim kecil Pokja PPKP Kota Tasikmalaya Tahun 2023

G. Profil pendanaan dan keuangan

Kebutuhan anggaran sanitasi di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2028 adalah sebesar Rp. 307.706.000.000,- dengan rincian sektor air limbah sebesar Rp.221.076.000.000,- dan persampahan sebesar Rp.86.630.000.000,-. Adapun rincian kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan) lima (5) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran sebagai berikut :

Tabel 11 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	48.500	47.675	41.007	41.672	42.222	221.076
2	Persampahan	13.140	22.150	30.150	7.440	13.750	86.630
Jumlah		61.640	69.825	71.157	49.112	55.972	307.706

Sumber: Hasil analisis tim kecil Pokja PPKP Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Dari Kebutuhan anggaran sanitasi di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2028 sebesar Rp. 307.706.000.000,- kemampuan APBD Kota Tasikmalaya hanya dikisaran angka Rp. 72.571.000.000,-, sehingga ada selisih dengan kebutuhan total sebesar Rp. 235.135.000.000,- (76%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 12 Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Kebutuhan Pendanaan	61.640	69.825	71.157	49.112	55.972	307.706
2	Kemampuan Pendanaan	17.900	18.575	11.757	12.727	12.607	72.571
3	Selisih (Rp)	43.740	51.250	59.400	36.840	43.905	235.135
4	Selisih (%)	71%	73%	83%	75%	78%	76%

Sumber: Hasil analisis tim kecil Pokja PPKP Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk sanitasi di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2028 sebesar Rp. 307.706.000.000,- diperoleh dari. APBD Kota sebesar Rp. 72.571.000.000,-, APBD Provinsi sebesar Rp. 36.480.000.000,-, APBN sebesar Rp. 102.250.000.000,- DAK sebesar Rp. 15.000.000.000,- CSR sebesar Rp. 1.220.000.000,- dan Masyarakat sebesar Rp. 95.185.000.000,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 13 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

X Rp. 1 Juta

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kota	17.900	18.575	11.757	12.272	12.067	72.571
2	APBD Provinsi	5.790	8.100	7.040	8.100	7.450	36.480
3	APBN	18.750	24.350	32.450	9.850	16.850	102.250
4	DAK	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Jumlah A		45.440	54.025	54.247	33.222	39.367	226.301
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	200	200	200	200	420	1.220
2	Masyarakat	20.000	20.000	20.000	20.000	15.185	95.185
Jumlah B		20.200	20.200	20.200	20.200	15.605	96.805
Total (A + B)		61.640	69.825	71.157	49.112	55.972	307.706
Daftar Tunggu (Kebutuhan - A - B)		-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil analisis tim kecil Pokja PPKP Kota Tasikmalaya Tahun 2023

H. Identifikasi isu strategis dan rekomendasi untuk komponen air limbah domestik dan persampahan

Isu Strategis air limbah domestik Kota Tasikmalaya: dari aspek teknis yaitu Masih rendahnya capaian akses aman di Kota Tasikmalaya (akses aman 2023: 4,7%, akses layak 2023: 27,8% dan BABS 2023: 34,1%) serta aspek non teknis yaitu aspek kelembagaan yang belum optimal, peran serta masyarakat belum optimal dan berkelanjutan serta dukungan anggaran yang masih terbatas.

Tabel 14 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan ALD

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
ASPEK TEKNIS • BABS : 34,1% (63.680 KK) • Akses terhadap jamban yang tidak layak: 37,7% (70.357 KK) • Sesuai data EHRA diperoleh tangki septik tidak aman diperoleh 90,4% dari • 2.760 kuisioner yang dijalankan • Akses layak 27,8% dan akses aman 4,7% • Kapasitas truk tinja terhadap total rumah tangga 7,64% dan 1,5% penyedotan ke rumah tangga • Kapasitas angkut terhadap IPLT 43,37%	Masih rendahnya capaian akses aman di Kota Tasikmalaya (akses aman 2023: 4,7%, akses layak 2023: 27,8% dan BABS 2023: 34,1%)	Terwujudnya akses Layak dan aman disektor air limbah domestik Kota Tasikmalaya	• Meningkatnya akses Layak air limbah domestik sebesar 100% dan akses aman air limbah domestik sebesar 24% pada Tahun 2028 • Meningkatnya kelurahan ODF 100% pada Tahun 2028	• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan akses air limbah domestik • Menghilangkan praktek BABS • Menyiapkan regulasi yang dapat mendukung pencapaian peningkatan akses air limbah • Penyiapan lembaga pengelola air limbah domestik dengan memisahkan fungsi regulator dan operator Penyiapan	Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Air Limbah Domestik Sesuai Dengan Karakteristik dan Kebutuhan Daerah	• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pemberdayaan Masyarakat	• Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
• Kapasitas penggunaan truk tinja 33,33% • Lumpur tinja diangkut ke IPLT sebesar 1,5% • Sarana dan prasarana pendukung IPLT belum memadai • Terdapatnya sambungan rumah (SR) yang belum tersambung ke IPAL Komunal Skala Kawasan • Sulitnya mencari lahan untuk lokasi SPALD-T • Rusaknya beberapa bagian pada unit pengolah di beberapa IPAL eksisting **REGULASI** • Pelaksanaan Perda belum optimal • Belum ada Perwali tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal. • Belum peraturan turunan belum ada **KELEMBAGAAN** • Pengelolaan tangki septik komunal oleh KPP belum optimal				regulasi pengelolaan air limbah domestik • Promosi dan sosialisasi untuk menigkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelola air limbah domestik • Membentuk dan membina KSM/KPP pengelola air limbah domestik • Mengembangkan akses pendanaan dan kerja sama pengelolaan air limbah domestik		Bidang Kesehatan • Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	• Perencanaan dan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehtan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota • Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota • Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota • Pengelolaan

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
karena belum ada kemandirian KPP. • Belum ada kerjasama dengan pihak swasta yang berusaha pada bidang penyedotan lumpur tinja **PERAN SERTA MASYARAKAT** • Peran serta masyarakat **dalam** pengolahan air limbah pada SPALD terpusat belum optimal dan berkelanjutan. • Persepsi, perilaku, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air **PENDANAAN** • Dukungan anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik masih terbatas • Penarikan retribusi air limbah belum optimal							Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Sumber: Hasil analisis tim kecil Pokja PPKP Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Isu strategis pengelolaan persampahan Kota Tasikmalaya: aspek teknis yaitu Masih rendahnya pengurangan sampah 16,5%, Adanya sampah yang tidak terkelola 34, 14% dan aspek non teknis yaitu pengelola TPS3R dan bank sampah oleh KSM belum optimal, peran serta masyarakat yang belum tertib dalam pembuangan sampah dan pendanaan untuk pengelolaan sampah yang terbatas.

Tabel 15 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengelolaan Sampah

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
ASPEK TEKNIS • Angka pengurangan sampah 16,66 % • Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah masih sedikit (0,52%) • Bank Sampah Unit seluruh kota sebanyak 24 unit dan bank sampah induk 2 unit dari 69 Kelurahan • Jumlah TPS 3R masih terbatas (2 unit) • Masih terbatasnya tempat sampah terpilah • Belum terpenuhinya sarana prasarana Bank Sampah Induk • Sulitnya memasarkan hasil produk 3R • Armada pengangkut sampah masih kurang dan beberapa mengalami kerusakan	Masih rendahnya pengurangan sampah 16,5%, Adanya sampah yang tidak terkelola 34, 14%	Terwujudnya lingkungan bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan	• Meningkatnya pengurangan sampah • Optimalisasi penanganan sampah	• Meningkatkan sarana dan prasana pengelolaan sampah • Penyusunan dan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan • Pembinaan kelembagaan KSM pengelola TPS3R • Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta • Edukasi dan sosialisasi untuk menigkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelola sampah	• Optimalisasi dan peremajaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah • Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	• Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	• Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
• Alat berat untuk operasional TPA Ciangir masih kurang • TPA belum menerapkan sanitary landfill • Penerapan inovasi teknologi belum maksimal • Sisa umur TPA diperkirakan 3-5 tahun • Belum adanya TPST **REGULASI** • Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal • Pelaksanaan Perwalkot Nomor 22 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum optimal • Penerapan SOP belum optimal **KELEMBAGAAN** • Pengelolaan TPS3R oleh KSM belum optimal karena belum ada kemandirian KSM • Belum optimalnya kerjasama dengan pihak swasta				• Mengembangkan akses pendanaan dan kerja sama pengelolaan sampah			

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
PERAN SERTA MASYARAKAT • Masih ada sebagian masyarakat yang belum tertib dalam membuang sampah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan • Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah **PENDANAAN** • Dukungan anggaran untuk pengelolaan persampahan masih terbatas • Penarikan retribusi persampahan belum optimal							

Sumber: Hasil analisis tim kecil Pokja PPKP Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Lampiran 2

RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN KEUANGAN DAERAH DAN PEREKONOMIAN DAERAH

Lampiran 2:
Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah
(i) Keuangan dan Perekonomian Daerah 5 (lima) tahun terakhir

Tabel Rekapitulasi Realisasi APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022

No	Realisasi Anggaran	Tahun					Rata-Rata pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
A	**Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)**	1.837.915.314.476,09	1.930.263.244.423,47	1.760.912.721.698,25	2.031.399.322.745,92	1.902.443.766.698,35	0%
a.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	280.014.887.927,09	290.971.707.718,47	314.312.317.302,25	445.335.320.092,92	341.362.213.700,35	3%
a.1.1	Pajak daerah	120.013.770.765,00	143.552.632.283,00	122.595.847.691,00	139.830.453.627,00	159.043.569.254,00	6%
a.1.2	Retribusi daerah	11.665.110.328,00	11.153.194.801,00	10.008.826.528,00	9.302.738.040,00	11.877.941.377,00	0%
a.1.3	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.418.000.000,00	5.921.762.644,00	6.458.363.839,00	6.221.179.774,00	6.867.125.110,00	6%
a.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	142.918.006.834,09	130.344.117.990,47	175.249.279.244,25	289.980.948.651,92	163.573.577.959,35	-5%
a.2	**Dana Perimbangan (Transfer)**	1.145.172.887.845,00	1.140.745.750.458,00	1.083.301.230.424,00	1.515.866.047.653,00	1.475.175.680.746,00	5%
a.2.1	Dana bagi hasil	65.166.672.969,00	54.063.700.029,00	90.659.677.187,00	110.877.886.841,00	134.992.856.376,00	14%
a.2.2	Dana alokasi umum	780.073.445.000,00	829.431.434.000,00	753.316.752.000,00			
a.2.3	Dana alokasi khusus	299.932.769.876,00	257.250.616.429,00	239.324.801.237,00			
a.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	412.727.538.704,00	476.319.683.247,00	462.907.433.648,00	70.197.955.000,00	85.905.872.252,00	-133%
a.3.1	Hibah	65.437.800.000,00	65.901.560.000,00	107.126.150.296,00			
a.3.2	Dana darurat						
a.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada kab./kota	107.954.217.239,00	115.983.579.026,00	177.890.641.676,00			
a.3.4	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus						

No	Realisasi Anggaran	Tahun					Rata-Rata pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
a.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi/pemerintah daerah lainnya	239.335.521.465,00	294.434.544.221,00	177.890.641.676,00			
B	**Belanja (b1 + b.2)**						
b.1	**Belanja Tidak Langsung**	887.119.294.226,00	866.056.865.440,00	791.589.983.168,00	860.670.811.994,00	882.691.900.699,68	0%
b.1.1	Belanja pegawai	789.805.068.044,00	800.475.508.832,00	752.178.654.519,00	781.463.307.968,00	789.777.565.972,00	0%
b.1.2	Bunga	1.255.205.122,00	999.564.108,00	435.748.720,00	443.405.362,00	20.996.181,68	-541%
b.1.3	Subsidi	30.520.000,00	62.240.000,00	25.552.600,00	41.906.200,00	142.670.000,00	4%
b.1.4	Hibah	79.667.446.000,00	60.675.612.500,00	35.005.833.200,00	75.572.192.464,00	92.053.368.546,00	-8%
b.1.5	Bantuan sosial	15.355.650.000,00	2.838.539.000,00	2.701.881.599,00	3.150.000.000,00	697.300.000,00	-196%
b.1.6	Belanja bagi hasil						
b.1.7	Bantuan keuangan	1.005.405.060,00	1.005.401.000,00	1.242.312.530,00	0	0	
b.1.8	Belanja tidak terduga						
b.2	**Belanja Langsung**	374.596.059.058	445.498.342.145	321.922.174.799	381.030.698.046	378.644.240.783	-2%
b.2.1	Belanja pegawai						
b.2.2	Belanja barang dan jasa						
b.2.3	Belanja modal	374.596.059.058,00	445.498.342.145,00	321.922.174.799,00	381.030.698.046,00	378.644.240.783,00	-2%
C	**Pembiayaan**	122.133.376.048,67	133.527.624.013,76	140.789.365.175,23	119.929.294.291,48	83.596.824.749,40	-12%
Surplus/Defisit Anggaran		-77.000.065.411,91	9.855.865.534,47	17.750.207.608,25	17.909.360.126,92	-9.942.036.450,33	302%

Sumber : Realisasi APBD tahun 2018 - 2022, diolah 2023

Tabel Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi OPD Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022

No	OPD	Tahun					Rata2 pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**	1.747.557.370	4.439.520.300	4.326.987.210	6.614.954.290	9.779.167.643	
1.a	Investasi	1.455.239.500	4.238.490.550	4.049.501.000	6.406.269.290	9.502.175.643	73%
1.b	operasional/pemeliharaan (OM)	292.317.870	201.029.750	277.486.210	208.685.000	276.992.000	4%
2	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	18.764.646.823	19.378.063.600	21.448.928.700	21.531.139.950	21.958.189.270	
2.a	Investasi	11.957.499.323	12.169.500.000	13.511.358.600	13.468.133.900	14.778.866.950	**6%**
2.b	operasional/pemeliharaan (OM)	6.807.147.500	7.208.563.600	7.937.570.100	8.063.006.050	7.179.322.320	2%
3	**DINAS KESEHATAN**		290.163.254	242.362.500	173.228.000	141.715.000	
3.a	Investasi	-	290.163.254	242.362.500	173.228.000	141.715.000	-21%
3.b	operasional/pemeliharaan (OM)						
4	**Belanja Sanitasi (1+2+3)**	20.512.204.193	24.107.747.154	26.018.278.410	28.319.322.240	31.879.071.913	10%
5	**Pendanaan investasi sanitasi Total (1a+2a+3a)**	13.412.738.823	16.698.153.804	17.803.222.100	20.047.631.190	24.422.757.593	14%
6	**Pendanaan OM (1b+2b+3B)**	7.099.465.370	7.409.593.350	8.215.056.310	8.271.691.050	7.456.314.320	1%
7	**Belanja Langsung**	3.560.398.480	3.676.419.500	3.841.989.000	5.060.581.000	5.184.371.800	8%
8	**Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja Langsung(4/7)**	576%	656%	677%	560%	615%	1%
9	**Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (5/4)**	65%	69%	68%	71%	77%	4%
10	**Proporsi OM Sanitasi–Total Belanja Sanitasi (6/4)**	35%	31%	32%	29%	23%	-11%

Sumber : Realisasi APBD tahun 2018 - 2022, diolah 2023.

Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kab/Kota Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	**BelanjaSanitasi(1.1+1.2+1.3+1.4)**	13.412.738.823	16.698.153.804	17.803.222.100	20.047.631.190	24.422.757.593	16%
1.1	Air Limbah Domestik	1.455.239.500	4.238.490.550	4.049.501.000	6.406.269.290	9.502.175.643	73%
1.2	Sampah rumah tangga	11.957.499.323	12.169.500.000	13.511.358.600	13.468.133.900	14.778.866.950	6%
1.3	PHBS	-	290.163.254	242.362.500	173.228.000	141.715.000	- 21%
2	**DanaAlokasiKhusus(2.1+2.2+2.3)**	1.514.330.000	2.500.000.000	14.518.982.000	5.010.986.000	5.960.000.000	125%
2.1	DAK Sanitasi	1.514.330.000	2.500.000.000	14.518.982.000	5.010.986.000	5.960.000.000	125%
2.2	DAK Lingkungan Hidup						
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman						
3	**Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi**						
4	**Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi**						
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		22.616.877.886	32.251.808.182	7.313.643.378	27.251.300.015	36.643.322.970	68%
Total Belanja Langsung		1.545.632.541.908	2.006.571.531.692	2.604.971.882.145	3.381.827.360.544	2.003.436.764.110	12%
%APBDmurniterhadapBelanjaLangsung		1,5%	1,6%	0,3%	0,8%	1,8%	1,20%

Sumber : APBD tahun 2018 - 2022, diolah 2023.

Tabel Belanja Sanitasi Perkapita Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022

No	Deskripsi	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Total Belanja Sanitasi	20.512.204.193	24.107.747.154	26.018.278.410	28.319.322.240	31.879.071.913	10%
2	Jumlah Penduduk	662.723	663.517	716.155	723.920	737.244	3%
Belanja Sanitasi Perkapita (1 / 2)		30.951	36.333	36.331	39.119	43.241	8%

Sumber : APBD dan BPS, diolah 2023.

Tabel Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi per Kapita

No	OPD	Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)					Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	**Retribusi Air Limbah**						
1.a	Realisasi retribusi	63.310.000,00	106.175.000,00	232.783.000,00	178.802.000,00	211.440.000,00	20%
1.b	Potensi retribusi	19.885.000,00	119.885.000,00	239.770.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	14%
2	**Retribusi Sampah**						
2.a	Realisasi retribusi	1.410.177.000,00	1.559.612.000,00	1.691.077.500,00	1.702.452.500,00	1.479.548.000,00	1%
2.b	Potensi retribusi	1.500.000.000,00	1.897.500.000,00	1.750.000.000,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	19%

No	OPD	Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)					Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
3	Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a)	1.473.487.000,00	1.665.787.000,00	1.923.860.500,00	1.881.254.500,00	1.690.988.000,00	3%
4	Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)	1.619.885.000,00	2.017.385.000,00	1.989.770.000,00	2.250.000.000,00	4.250.000.000,00	19%
5	Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)	-146.398.000,00	-351.598.000,00	-65.909.500,00	-368.745.500,00	-2.559.012.000,00	-52%

Sumber : APBD dan BPS, diolah 2023.

Tabel Peta Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022

No	Deskripsi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB harga konstan (struktur perekonomian) (Rp.)	20,09	21,75	21,59	22,85	24,97
2	Pendapatan Perkapita Kota (Rp.)	30,14	32,78	32,51	31,56	34,05
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,94	5,97	-2,01	3,57	5,01

Sumber : APBD dan BPS, diolah 2023.

(ii) S**truktur Organisasi beserta tanggung jawabnya**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berikut ini OPD yang terlibat dalam Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaanpembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH

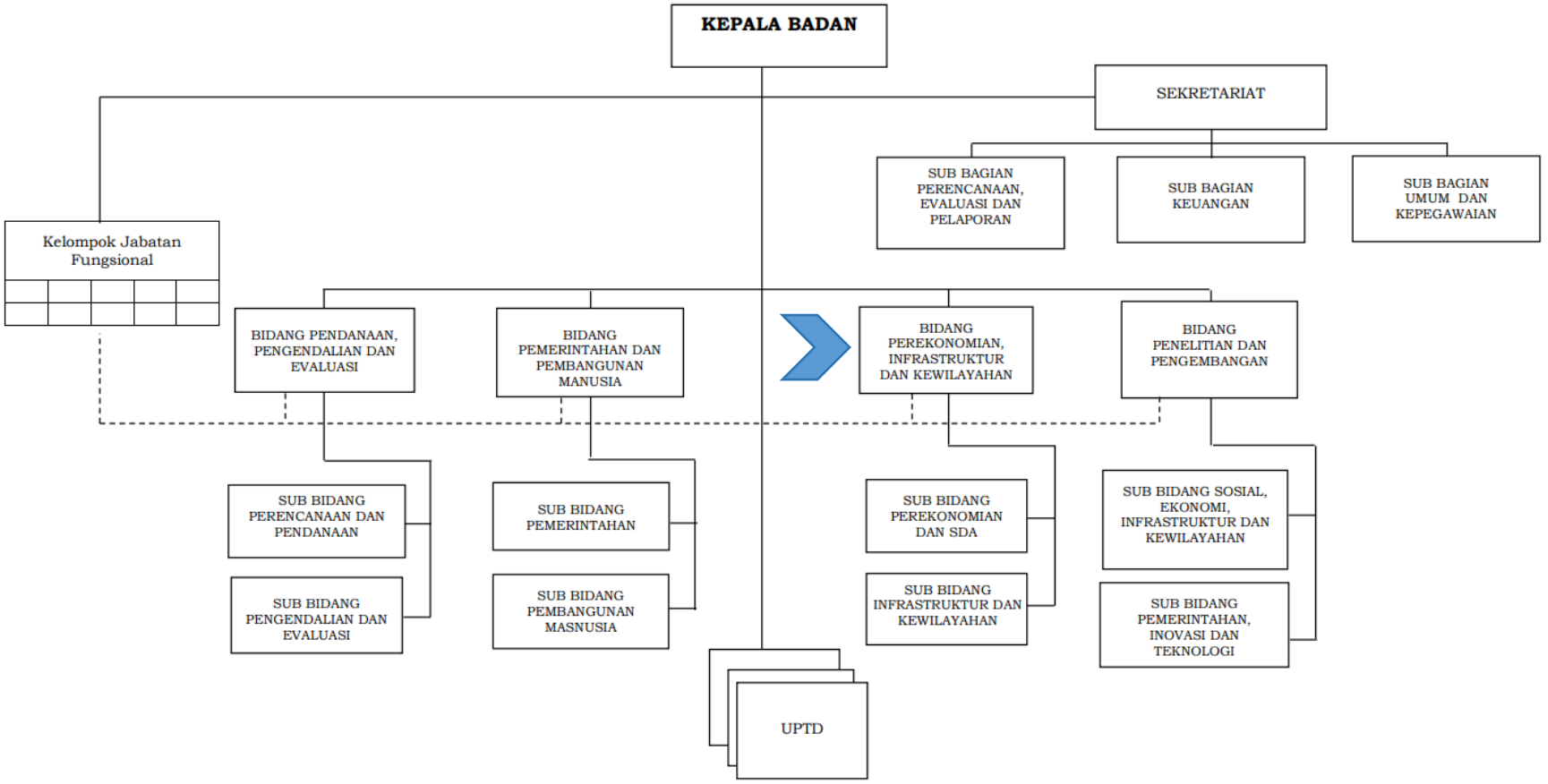

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

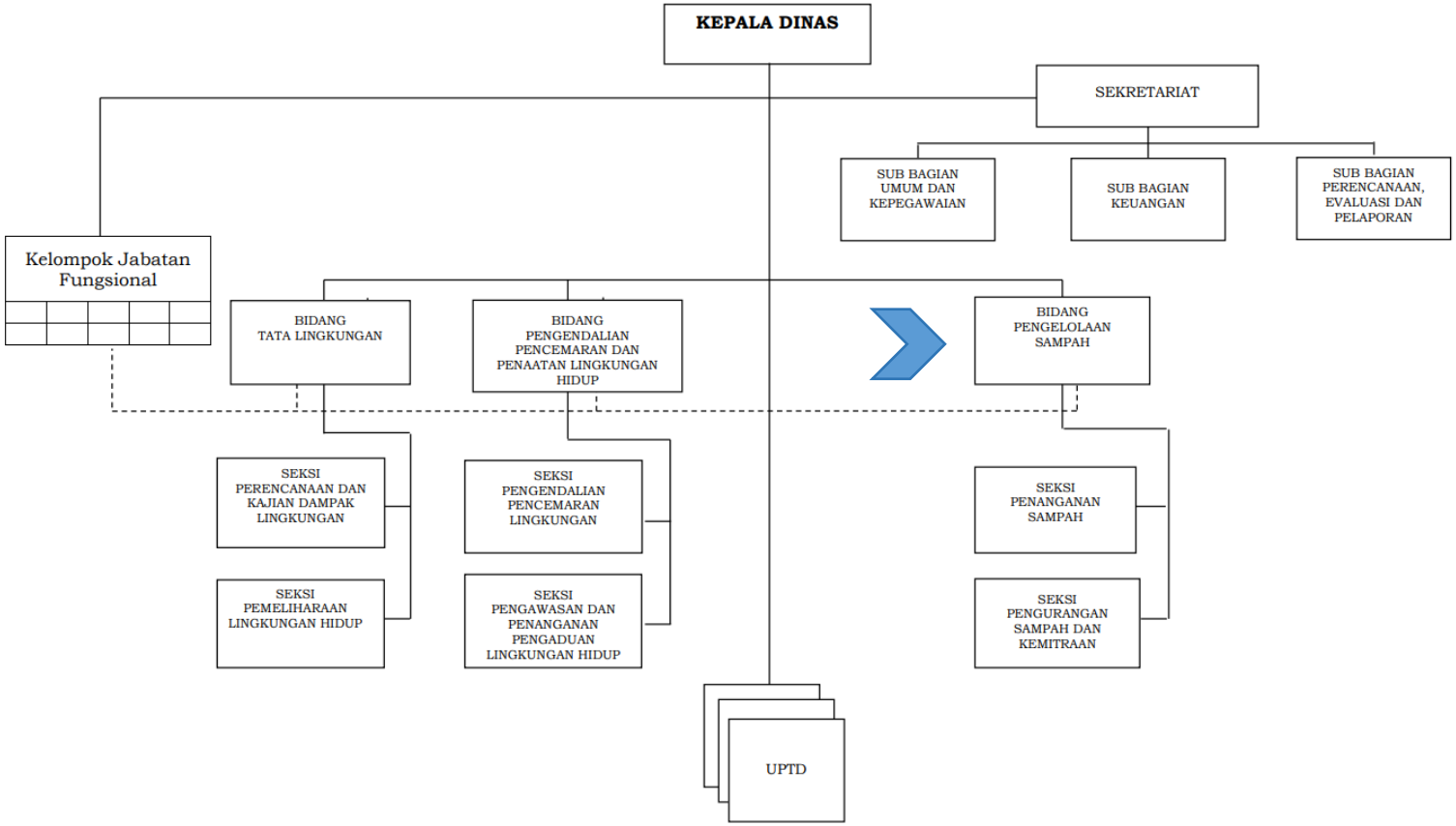

3. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

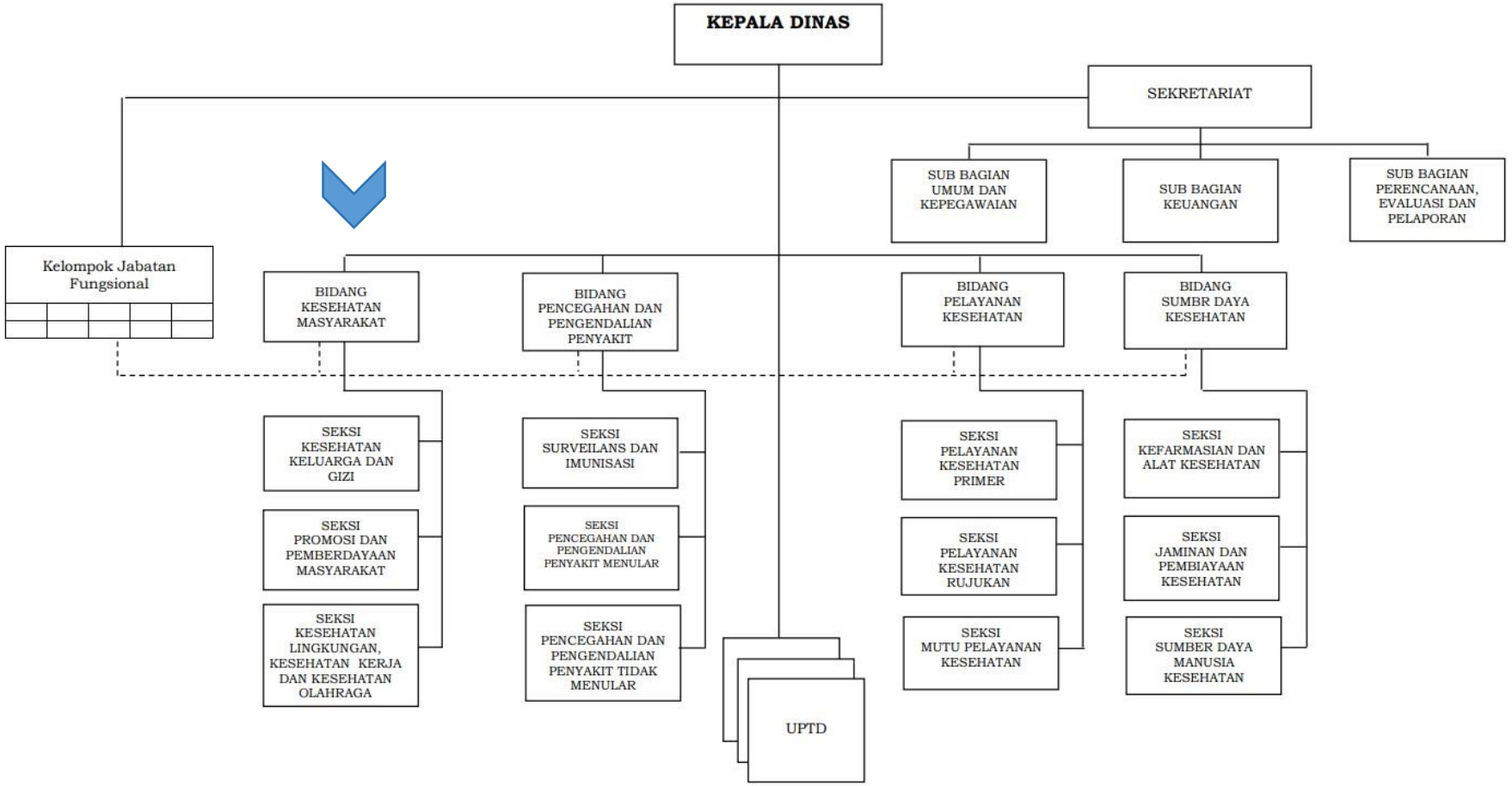
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Kelompok Jabatan Fungsional
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
BIDANG SUMBR DAYA KESEHATAN
SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
UPTD
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
SEKSI MUTU PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
SEKSI JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

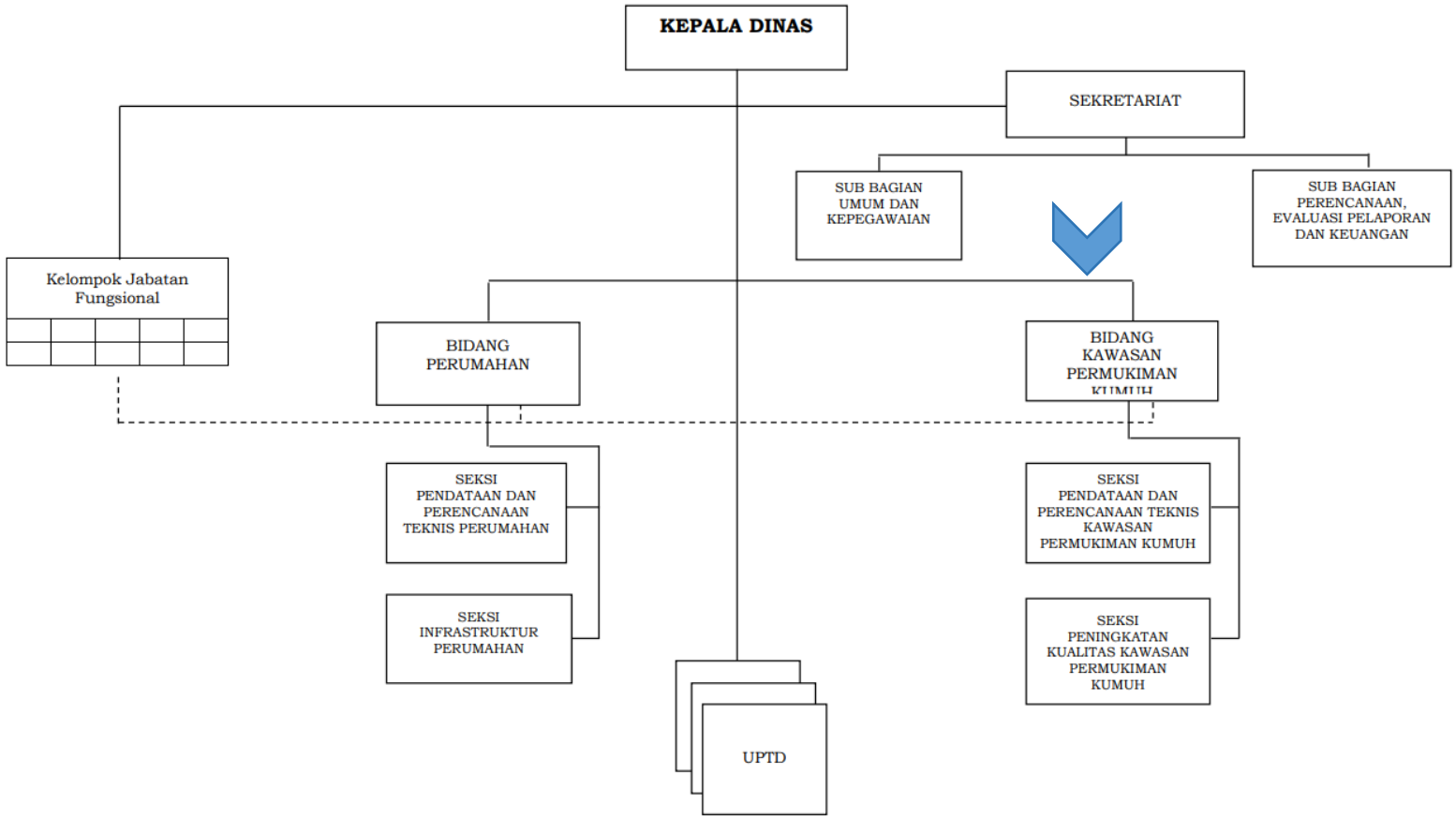

5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataaan ruang serta urusan pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataaan ruang serta urusan pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

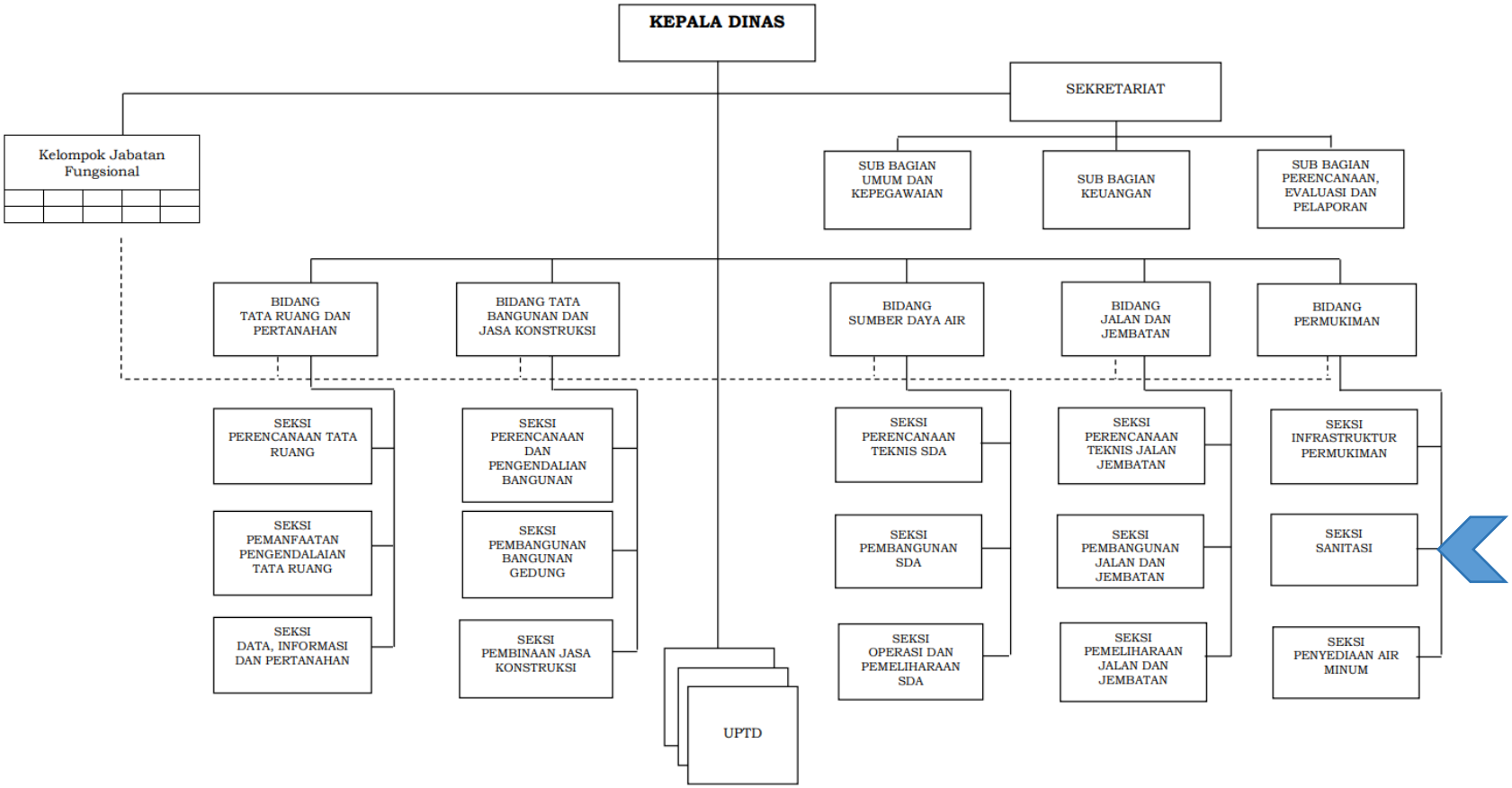

Lampiran 3

PETA RENCANA PENGEMBANGAN BERDASARKAN RENCANA INDUK

Lampiran 3: Peta Rencana Pengembangan Berdasarkan Rencana Induk

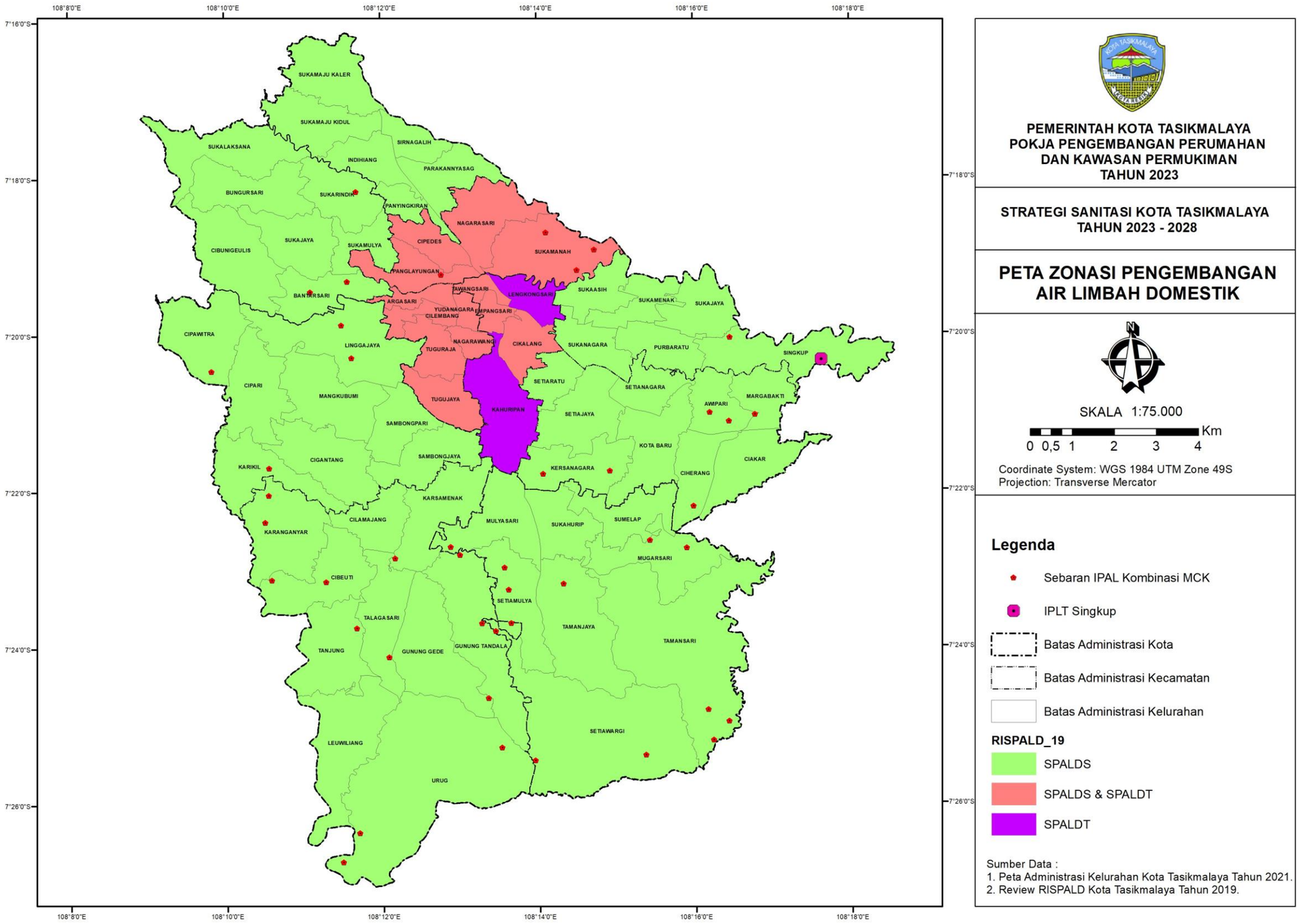

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

STRATEGI SANITASI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2028

PETA ZONASI PENGEMBANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK

N

SKALA 1:75.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator

Legenda

- Sebaran IPAL Kombinasi MCK
- IPLT Singkup
- Batas Administrasi Kota
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan

RISPALD_19

- SPALDS
- SPALDS & SPALDT
- SPALDT

Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kelurahan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
2. Review RISPALD Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

Lampiran 4

LEMBAR KERJA ANALISIS AREA BERESIKO INSTRUMEN
SSK KOTA TASIKMALAYA

Lampiran 4:

LEMBAR KERJA ANALISIS AREA BERESIKO INSTRUMEN SSK
KOTA TASIKMALAYA

	Pembobotan EXPOSURE (%)		
	Air Limbah	Sampah	Drainase
Data Sekunder	20%	30%	30%
Indeks Risiko Sanitasi - EHRA	40%	60%	60%
Persepsi SKPD	40%	10%	10%

	Pembobotan IMPACT (%)
Jumlah Penduduk	30%
Kepadatan Penduduk	25%
Angka Kemiskinan	25%
Fungsi Urban - Urban/rural	20%

				PENYESUAIAN		
	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi
Nama Kelurahan/Desa	Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase	Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
KECAMATAN KAWALU						
LEUWILIANG	3.0	3.0	1.0	3.0	4.0	1.0
URUG	3.0	3.0	1.0	3.0	4.0	1.0
GUNUNGTANDALA	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0
GUNUNGGEDE	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0
TALAGASARI	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0
TANJUNG	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0
CIBEUTI	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
KARANGANYAR	4.0	3.0	2.0	4.0	3.0	2.0
CILAMAJANG	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
KARSAMENAK	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0	1.0
KECAMATAN TAMANSARI						
SETIAMULYA	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0
SETIAWARGI	3.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0
TAMANSARI	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	1.0
TAMANJAYA	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
MULYASARI	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0	1.0

				PENYESUAIAN		
	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi
Nama Kelurahan/Desa	Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase	Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
SUKAHURIP	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
MUGARSARI	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0
SUMELAP	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0
KECAMATAN CIBEUREUM						
CIHERANG	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0
CIAKAR	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0
MARGABAKTI	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
AWIPARI	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
KOTABARU	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0
KERSANAGARA	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0
SETIAJAYA	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
SETIARATU	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
SETIANAGARA	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
KECAMATAN PURBARATU						
SUKANAGARA	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
SUKAMENAK	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0
PURBARATU	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
SUKAASIH	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
SUKAJAYA	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0
SINGKUP	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	1.0
KECAMATAN TAWANG						
KAHURIPAN	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	4.0
CIKALANG	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0
EMPANGSARI	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0
TAWANGSARI	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
LENGKONGSARI	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0
KECAMATAN CIHIDEUNG						
TUGUJAYA	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	4.0
TUGURAJA	3.0	2.0	2.0	4.0	3.0	3.0
NAGARAWANGI	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
YUDANAGARA	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
CILEMBANG	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0	3.0

				PENYESUAIAN		
	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi
Nama Kelurahan/Desa	Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase	Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
ARGASARI	3.0	1.0	1.0	4.0	2.0	1.0
KECAMATAN MANGKUBUMI						
KARIKIL	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0	1.0
CIGANTANG	3.0	2.0	1.0	4.0	1.0	1.0
SAMBONGJAYA	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
SAMBONGPARI	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
LINGGAJAYA	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0
MANGKUBUMI	3.0	1.0	3.0	4.0	1.0	4.0
CIPARI	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0
CIPAWITRA	2.0	3.0	1.0	3.0	4.0	1.0
KECAMATAN INDIHIANG						
PANYINGKIRAN	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0
PARAKANNYASAG	3.0	1.0	1.0	4.0	1.0	1.0
SIRNAGALIH	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0
INDIHIANG	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
SUKAMAJUKIDUL	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0
SUKAMAJUKALER	3.0	2.0	1.0	4.0	1.0	1.0
KECAMATAN BUNGURSARI						
SUKAMULYA	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0
SUKARINDIK	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
BUNGURSARI	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0
SUKAJAYA	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0
CIBUNIGEULIS	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0
BANTARSARI	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0
SUKALAKSANA	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0
KECAMATAN CIPEDES						
PANGLAYUNGAN	3.0	1.0	1.0	4.0	2.0	1.0
CIPEDES	3.0	2.0	1.0	4.0	2.0	1.0
NAGARASARI	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0
SUKAMANAH	3.0	2.0	1.0	4.0	2.0	3.0

Lampiran 5

HASIL PEMBAHASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN

Lampiran 5:

Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan

Berisi tabel-tabel mengenai “Kesepakatan Program dan Kegiatan Sanitasi Jangka Menengah Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2028” (7 tabel) yaitu:

1. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Jangka Menengah

X Rp. 1 Juta

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT	
						2024	2025	2026	2027	2028													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																						
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																						
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																						
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																						
	Penyusunan DED IPAL Komunal	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen	1	1	1	1	1	5	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	1.650.000	1.650.000					
	Pembangunan IPALD Komunal	Seluruh Kecamatan	737244	18422	SR	1100	1100	1100	1100	1100	5500	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	55.000.000	55.000.000					
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																						
	Monev Pemanfaatan IPAL Komunal	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	Monev Kinerja IPAL Komunal (Uji Efluen)	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Lokasi	40	40	40	40	40	200	222.900	222.900	222.900	222.900	222.900	1.114.500		1.114.500				
	Rehabilitasi IPAL Komunal	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Unit	9	9	9	9	9	45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000					450.000	
	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																						
	Penyusunan/Review DED Peningkatan IPLT Singkup	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen	1						50.000					50.000	50.000					
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Peningkatan IPLT Singkup	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen	1						50.000					50.000	50.000					
	Rehabilitasi IPLT Singkup (Pengadaan DAF untuk peningkatan IPLT Singkup (Kebutuhan 2 unit DAF, masing2 berkapasitas 5 m3/jam. Perhitungan 1 shift dianggap 8 jam per hari. Jadi totalnya adalah 2 x 40 m3/hari = 80 m3/hari)	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Unit	1					1	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000		2.000.000				

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT	
						2024	2025	2026	2027	2028													
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																						
	Penyusunan studi kelayakan/ justifikasi teknis IPAL Skala Perkotaan	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen				1		1				250.000		250.000	250.000					
	Penyusunan DED IPAL Skala Perkotaan	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen					1	1					1.000.000	1.000.000			1.000.000			
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																						
	Operasional UPTD SPALD	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Rumah Tangga	3800	3800	3800	3800	3800	19000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	7.315.000	7.315.000					
	Penyusunan kajian assesment LLTT	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen		1				1		50.000				50.000	50.000					
	Sensus Calon Pelanggan LLTT	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Rumah Tangga		1000				1000		50.000				50.000	50.000					
	Launching dan Promosi LLTT	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Kegiatan		1				1		50.000				50.000	50.000					
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																						
	Penyusunan kajian akademik pengembangan UPTD SPALD	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen		1				1		50.000				50.000	50.000					
	Penyusunan Bussiness Plan UPTD SPALD	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen		1				1		100.000				100.000	100.000					
	Penyusunan Review SOP UPTD SPALD	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen		1				1		50.000				50.000	50.000					
	Penilaian kinerja UPTD	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen		1				1		100.000.	-	-	-	100.000	100.000					
	Peningkatan kapasitas SDM (operator dan staff)	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Kegiatan		1				1		50.000	-	-	-	50.000	50.000					
	Penyusunan Kajian Review Tarif Layanan PALD	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen					1	1					50.000	50.000	50.000					
	Pemutakhiran SIPALDO (Sistem Informasi Pengelolaan ALD)	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Kegiatan			1			1			50.000			50.000	50.000					
	Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan BLUD PALD dan PAM	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen					1	1					200.000	200.000	200.000					
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																						
	Pengadaan Truk Pengangkut Tinja	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Unit		2				2	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000		1.200.000				
	Kerja sama dengan penyedot swasta	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Unit	4					4	2.400.000					2.400.000				2.400.000		
	Pengadaan Motor Penyedot tinja	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Unit		1				1		100.000				100.000	100.000					
	Penambahan pompa alkon dan aksesoris (selang, dudukan, dll)	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Unit	1	1				2	10.000	10.000	-	-	-	20.000	10.000			10.000		

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT	
						2024	2025	2026	2027	2028													
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																						
	O&P rutin IPLT	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Unit	1	1	1	1	1	5	596.960	596.960	596.960	596.960	596.960	2.984.800	2.984.800					
	O&P Rutin IPAL Permukiman Berbasis Masyarakat	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Unit	86	108	130	152	174	650	516.000	648.000	780.000	912.000	1.044.000	3.900.000	3.900.000					
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																						
	Pembangunan infrastruktur tangki septik individu dan komunal pada area beresiko sanitasi	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Rumah Tangga	1630	1630	1630	1630	1630	8150	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	81.500.000		20.000.000	61.500.000			
	Pembangunan infrastruktur tangki septik pada area beresiko sanitasi	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Rumah Tangga	24445	24445	24445	24445	24445	122225	244.450.000	244.450.000	244.450.000	244.450.000	244.450.000	1.222.250.000					1.222.250.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																						
	Pembinaan Operator Truk Tinja Swasta untuk layanan penyedotan - pengangkutan - pembuangan di IPLT berdasarkan SOP termasuk memerhatikan K3	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	5	5	5	5	5	25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	75.000					
	Peningkatan Kapasitas KSM dan AKSANSI Pengelola IPAL Komunal di kawasan permukiman tentang operasional dan pemeliharaan	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	35	35	35	35	35	175	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	350.000					
	Peningkatan Kapasitas Developer Perumahan untuk penyediaan Tangki Septik Aman	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	50					50	50.000	-	-	-	-	50.000	50.000					
	Organisasi kemasyarakatan (LPM, Satgas ODF, kader Posyandu)	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	14	14	14	14	13	69	28.000	28.000	28.000	28.000	26.000	138.000	138.000					
	Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha (hotel, rumah makan, nawasena)	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	30					30	30.000	-	-	-	-	30.000	30.000					
	Sosialisasi penegakan Perda 02/2021 tentang Pengelolaan ALD Kota Tasikmalaya	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	100		100			200	10.000	-	10.000	-	-	20.000	20.000					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																						
	Review RISPALD	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen	1					1	350.000	-	-	-	-	350.000	350.000					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																						
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																						

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT	
						2024	2025	2026	2027	2028													
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																						
	Pengadaan Buku Sanitasi Aman untuk Kalangan Siswa	Seluruh Sekolah Dasar	737244	18422	Paket	1	1	1	1	1	5	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																						
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Seluruh Sekolah Dasar	737244	18422	Paket	1	1	1	1	1	5	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000					
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																						
	Studi EHRA	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen				1		1				300.000		300.000	300.000					
	Bimtek Studi EHRA	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang				100		100				100.000		100.000	100.000					
	Penyelenggaraan program Jawara ODF (10 kelurahan dari 10 kecamatan per tahun) untuk 100% Stop BABS th 2030 (saat ini 12 kelurahan dari 69 kelurahan, tahun 2023 Jawara ODF di 11 kelurahan. Tersisa 46 kelurahan = 5 tahun).	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	10	9	9	9	9	46	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	920.000	920.000					
	Monitoring dan evaluasi pemicuan ODF dan sanitasi aman	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	Pemicuan STBM termasuk sosialisasi sanitasi aman dengan menggandeng kelompok masyarakat dan tokoh agama	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000					
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																						
	Penyelenggaraan kota sehat di kecamatan	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																						
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																						
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																						
	Pelatihan promosi/ pemicuan sanitasi aman untuk kader (Non-ASN)	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT	
						2024	2025	2026	2027	2028													
	Pelatihan komunikasi perubahan perilaku sanitasi aman untuk kader (Non-ASN)	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																						
	Sosialisasi perubahan perilaku dengan menggandeng kelompok masyarakat dan tokoh agama	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																						
	Sosialisasi PHBS	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Sosialisasi	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																						
	Pelatihan PHBS	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Pelatihan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																						
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																						
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																						
	Pengawasan kepatuhan Perda 02/2021 tentang Pengelolaan ALD Kota Tasikmalaya	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000					
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																						
	Penanganan pelanggaran Perda 02/2021 tentang Pengelolaan ALD Kota Tasikmalaya	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																						
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																						

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT	
						2024	2025	2026	2027	2028													
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																						
	Monitoring baku mutu air limbah domestik di IPLT, IPAL Komunal	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	55.107,5	55.107,5	55.107,5	55.107,5	55.107,5	275.537,5	275.537,5					
	Monitoring baku mutu air sungai	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	550.000	550.000					
	Monitoring baku mutu air limbah domestik di IPAL Fasilitas Umum dan Sosial (seperti Puskesmas dan sekolah)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	66.572,5	66.572,5	66.572,5	66.572,5	66.572,5	332.862,5	332.862,5					
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Kab/Kota																						
	Pengujian Kualitas Air Sungai	5 Sungai Di wilayah Kota Tasikmalaya 3 titik tiap sungai 3 periode pengujian	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	250.000	750.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000	1.600.000					
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																						
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																						
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																						
	Penyusunan rencana konten promosi/ sosialisasi sanitasi aman dan sedot tinja dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran publik.	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																						
	Diseminasi informasi dan promosi ODF, sanitasi aman, dan sedot tinja melalui kanal-kanal komunikasi publik	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	Monitoring diseminasi informasi dan promosi sanitasi aman melalui kanal-kanal komunikasi publik (perhitungan engagemen, laporan komunikasi publik).	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																						
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																						
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																						

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT	
						2024	2025	2026	2027	2028													
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																						
	Rapat Koordinasi Pokja PPKP (triwulan)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	Workshop Pembentukan Forum TJSL dan Pengembangan Pendanaan Sanitasi Berkelanjutan lewat Program TJSL	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000					
	Pemutakhiran SSK Tahun 2028 - 2033	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	0	0	0	0	1	1					300.000	300.000	300.000					
	Bimtek dan Workshop Penjamin Kualitas SSK	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	0	0	0	0	1	1					100.000	100.000	100.000					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																						
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																						
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																						
	Kajian Review Tarif Retribusi Layanan Air Limbah Domestik	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	0	0	1	0	0	1			50.000			50.000	50.000					
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											**281.683.540**	**279.155.540**	**277.037.540**	**277.709.540**	**278.839.540**	**1.394.425.700**	**82.501.200**	**24.314.500**	**62.500.000**	**2.410.000**	**1.222.700.000**	
B.	**PENGOLAHAN PERSAMPAHAN**																						
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																						
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																						
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																						
	Pengadaan Alat Berat di TPA (Landfill Compactor)	Tamansari, Tamansari	737244	18422	Unit	1	1				2	6,000.000	6,000.000				12,000.000		12,000.000				
	Pengadaan Alat Berat di TPA (Buldozer)	Tamansari, Tamansari	737244	18422	Unit		1	2			3		2,500.000	5,000.000			7,500.000	2.500.000	5.000.000				
	Pengadaan Alat Berat di TPA (Excavator)	Tamansari, Tamansari	737244	18422	Unit			1		1	2			2,500.000		2,500.000	5,000.000		5.000.000				
	Pengadaan Alat Angkut Sampah (Dumptruck)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	4	4	4	4	4	20	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	12,000.000	4,200.000	7,800.000				
	Pengadaan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit		2	2		2	6		310.000	310.000		310.000	930.000		930.000				
	Pengadaan Alat Angkut Sampah (Container)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	10	10	10	10	10	50	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2,500.000	1,250.000	1,250.000				

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT	
						2024	2025	2026	2027	2028													
	Pengadaan Alat Angkut Sampah (Arm Roll Truck)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	3	3	3	3	3	15	1,950.000	1,950.000	1,950.000	1,950.000	1,950.000	9,750.000	3,250.000	6,500.000				
	Pengadaan Gerobak Sampah	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	100	100	100	100	100	500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1,750.000	1,645.000			70.000	35.000	
	Pengadaan Tempat Sampah (Tong Sampah)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	1000	1000	1000	1000	1000	5000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1,000.000	1,000.000					
	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	4	5	4	5	4	25	600.000	700.000	600.000	700.000	600.000	3,200.000	300.000	3,000.000				
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																						
	Pembangunan TPS-3R	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	4	4	4	4	4	20	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	10,000.000			10,000.000			
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan																						
	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Sosialisasi	14	14	14	14	13	69	70.000	70.000	70.000	70.000	65.000	345.000	345.000					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																						
	Penyusunan Masterplan Persampahan	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Dokumen	1					1	500.000					500.000	500.000					
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											**14.570.000**	**17.030.000**	**15.880.000**	**8.220.000**	**10.875.000**	**66.575.000**	**14.990.000**	**41.480.000**	**10.000.000**	**70.000**	**35.000**	
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN											**296.253.540**	**296.185.540**	**292.917.540**	**285.929.540**	**289.714.540**	**1.461.000.700**	**97.491.200**	**65.794.500**	**72.500.000**	**2.480.000**	**1.222.735.000**	

2. Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sumber APBD Kota

X Rp. 1 Juta

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./ Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota					Jumlah		
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	**SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**																			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
		Penyusunan DED IPAL Komunal	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen	1	1	1	1	1	5	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	1.650.000	DPUTR	DPUTR
		Pembangunan IPALD Komunal	Seluruh Kecamatan	737244	18422	SR	1100	1100	1100	1100	1100	5500	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	55.000.000	DPUTR	DPUTR
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
		Monev Pemanfaatan IPAL Komunal	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	DPUTR	DPUTR
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
		Penyusunan/Review DED Peningkatan IPLT Singkup	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen	1						50.000					50.000	DPUTR	DPUTR
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Peningkatan IPLT Singkup	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen	1						50.000					50.000	DPUTR	DPUTR
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
		Operasional UPTD SPALD	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Rumah Tangga	1250	1250	1250	1250	1250	15.206	481.250	481.250	481.250	481.250	481.250	2.406.250	UPTD SPALD	UPTD SPALD
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
		O&P rutin IPLT	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Unit	1	1	1	1	1	5	111.930	111.930	111.930	111.930	111.930	559.650	UPTD SPALD	UPTD SPALD
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
		Review RISPALD	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen	1					1	350.000	-	-	-	-	350.000	DPUTR	DPUTR

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./ Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota					Jumlah		
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
		Pengadaan Buku Sanitasi Aman untuk Kalangan Siswa	Seluruh Sekolah Dasar	737244	18422	Paket	1	1	1	1	1	5	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	DISDIK	DISDIK
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Seluruh Sekolah Dasar	737244	18422	Paket	1	1	1	1	1	5	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	DISDIK	DISDIK
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
		Studi EHRA	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen				1		1				300.000		300.000	DINKES	DINKES
		Bimtek Studi EHRA	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang				100		100				100.000		100.000	DINKES	DINKES
		Penyelenggaraan program Jawara ODF (10 kelurahan dari 10 kecamatan per tahun) untuk 100% Stop BABS th 2030 (saat ini 12 kelurahan dari 69 kelurahan, tahun 2023 Jawara ODF di 11 kelurahan. Tersisa 46 kelurahan = 5 tahun).	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	10	9	9	9	9	46	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	920.000	DINKES	DINKES
		Monitoring dan evaluasi pemicuan ODF dan sanitasi aman	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	DINKES	DINKES
		Pemicuan STBM termasuk sosialisasi sanitasi aman dengan menggandeng kelompok masyarakat dan tokoh agama	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	DINKES	DINKES
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
		Penyelenggaraan kota sehat di kecamatan	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	DINKES	DINKES
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./ Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota					Jumlah		
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
		Pelatihan promosi/ pemicuan sanitasi aman untuk kader (Non-ASN)	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	DINKES	DINKES
		Pelatihan komunikasi perubahan perilaku sanitasi aman untuk kader (Non-ASN)	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	DINKES	DINKES
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
		Sosialisasi perubahan perilaku dengan mengganden kelompok masyarakat dan tokoh agama	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	DINKES	DINKES
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
		Sosialisasi PHBS	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Sosialisasi	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	DINKES	DINKES
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
		Pelatihan PHBS	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Pelatihan	1	1	1	1	1	5	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	DINKES	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																		
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																		
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
		Pengawasan kepatuhan Perda 02/2021 tentang Pengelolaan ALD Kota Tasikmalaya	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	SATPOL PP	SATPOL PP
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./ Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota					Jumlah		
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penanganan pelanggaran Perda 02/2021 tentang Pengelolaan ALD Kota Tasikmalaya	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	SATPOL PP	SATPOL PP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																		
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
		Monitoring baku mutu air limbah domestik di IPLT, IPAL Komunal	Tersebar di Seluruh Kelurahan (16 unit Ipal Komunal, 1 unit IPLT), 1 kali pengujian per tahun	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	55.107.5	55.107.5	55.107.5	55.107.5	55.107.5	275.537.5	DLH	DLH
		Monitoring baku mutu air sungai	5 Sungai Di wilayah Kota Tasikmalaya 3 titik tiap sungai 3 periode pengujian	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	550.000	DLH	DLH
		Monitoring baku mutu air limbah domestik di IPAL Fasilitas Umum dan Sosial (seperti Puskesmas dan sekolah)	22 puskesmas 1 kali pengujian per tahun	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	66.572.5	66.572.5	66.572.5	66.572.5	66.572.5	332.862.5	DLH	DLH
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Kab/Kota																		
		Pengujian Kualitas Air Sungai	5 Sungai Di wilayah Kota Tasikmalaya 3 titik tiap sungai 3 periode pengujian	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	250.000	750.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000	DLH	DLH
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																		
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
		Penyusunan rencana konten promosi/ sosialisasi sanitasi aman dan sedot tinja dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran publik.	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	DISKOMINFO	DISKOMINFO
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./ Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota					Jumlah		
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Diseminasi informasi dan promosi ODF, sanitasi aman, dan sedot tinja melalui kanal-kanal komunikasi publik	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	DISKOMINFO	DISKOMINFO
		Monitoring diseminasi informasi dan promosi sanitasi aman melalui kanal-kanal komunikasi publik (perhitungan engagemen, laporan komunikasi publik).	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	DISKOMINFO	DISKOMINFO
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
		Rapat Koordinasi Pokja PPKP (triwulan)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	BAPPELITBANGDA	BAPPELITBANGDA
		Workshop Pembentukan Forum TJSL dan Pengembangan Pendanaan Sanitasi Berkelanjutan lewat Program TJSL	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	BAPPELITBANGDA	BAPPELITBANGDA
		Pemutakhiran SSK Tahun 2027 - 2032	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	0	0	0	0	1	1					300.000	300.000	BAPPELITBANGDA	BAPPELITBANGDA
		Bimtek dan Workshop Penjamin Kualitas SSK	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	0	0	0	0	1	1					100.000	100.000	BAPPELITBANGDA	BAPPELITBANGDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																		
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																		
		Kajian Review Tarif Retribusi Layanan Air Limbah Domestik	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Kegiatan	0	0	1	0	0	1	0	0	50.000	0	0	50.000	BAPPELITBANGDA	BAPPELITBANGDA
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah												**3.244,860**	**3.274.860**	**2.774.860**	**3.124.860**	**3.124.860**	**15,544.300**		

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./ Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota					Jumlah		
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.	**PENGOLAHAN SAMPAH**																			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																		
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																		
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
		Pengadaan Alat Berat di TPA (Buldozer)	Ciangir, Tamansari	737244	18422	Unit		1				1		2.500.000				2.500.000		
		Pengadaan Alat Angkut Sampah (Dumptruck)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit		2	2	2	1	7		1.200.000	1.200.000	1.200.000	600.000	4.200.000		
		Pengadaan Alat Angkut Sampah (Container)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	5	5	5	5	5	25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000		
		Pengadaan Alat Angkut Sampah (Arm Roll Truck)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	1	1	1	1	1	5	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	3.250.000		
		Pengadaan Gerobak Sampah	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	100	100	100	100	70	470	350.000	350.000	350.000	350.000	245.000	1.645.000		
		Pengadaan Tempat Sampah (Tong Sampah)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	1000	1000	1000	1000	1000	5000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000		
		Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit		1		1		2		150.000		150.000		300.000		
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan																		
		Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Sosialisasi	14	14	14	14	13	69	70.000	70.000	70.000	70.000	65.000	345.000		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
		Penyusunan Masterplan Persampahan	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Dokumen	1					1	500.000					500.000		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan												**2.020,000**	**5,370.000**	**2,720.000**	**2,870.000**	**2,010.000**	**14,990.000**		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD KABUPATEN / KOTA												**5.264.860**	**8.644.860**	**5.494.860**	**5.994.860**	**5.134.860**	**30.534.300**		

3. Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sumber APBD Provinsi

X Rp. 1 Juta

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./ Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah / Badan Pengelola Pasca Konstruksi	Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Provinsi					Jumlah			
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																			
		Rehabilitasi IPLT Singkup (Pengadaan DAF untuk peningkatan IPLT Singkup (Kebutuhan 2 unit DAF, masing2 berkapasitas 5 m3/jam. Perhitungan 1 shift dianggap 8 jam per hari. Jadi totalnya adalah 2 x 40 m3/hari = 80 m3/hari)	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Unit	1					1	2.000.000					2.000.000	DISPERKIM	DPUTR	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
		Pembangunan infrastruktur tangki septik individu dan komunal pada area beresiko sanitasi	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Rumah Tangga	400	400	400	400	400	2000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	20.000.000	DISPERKIM	DPUTR	
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																			
		Pengadaan Truk Pengangkut Tinja	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Unit		2				2		1.200.000				1.200.000	DISPERKIM	DPUTR	
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																			
		Monev Kinerja IPAL Komunal (Uji Efluen)	Seluruh Kecamatan (diuji 2 titik 1 kali pengujian di inlet dan outlet)	737244	18422	Lokasi	40	40	40	40	40	200	222.900	222.900	222.900	222.900	222.900	1.114.500	DISPERKIM	DPUTR	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah												**6.222.900**	**5.422.900**	**4.222.900**	**4.222.900**	**4.222.900**	**24.314.500**			
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																				
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																			
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																			
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./ Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah / Badan Pengelola Pasca Konstruksi	Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Provinsi					Jumlah			
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Pengadaan Alat Berat di TPA (Landfill Compctor)	Tamansari, Tamansari	737244	18422	Unit	1	1				2	6.000.000	6.000.000				12.000.000	DISPERKIM	DLH	
		Pengadaan Alat Berat di TPA (Buldozer)	Tamansari, Tamansari	737244	18422	Unit			2			2			5.000.000			5.000.000	DISPERKIM	DLH	
		Pengadaan Alat Berat di TPA (Excavator)	Tamansari, Tamansari	737244	18422	Unit			1		1	2			2.500.000		2.500.000	5.000.000	DISPERKIM	DLH	
		Pengadaan Alat Angkut Sampah (Dumptruck)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	4	2	2	2	3	13	2.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.800.000	7.800.000	DISPERKIM	DLH	
		Pengadaan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit		2	2		2	6		310.000	310.000		310.000	930.000	DISPERKIM	DLH	
		Pengadaan Alat Angkut Sampah (Container)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	5	5	5	5	5	25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	DISPERKIM	DLH	
		Pengadaan Alat Angkut Sampah (Arm Roll Truck)	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	2	2	2	2	2	10	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	6.500.000	DISPERKIM	DLH	
		Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	4	4	4	4	4	20	600.000	600.000	600.000	600.000.	600.000	3.000.000	DISPERKIM	DLH	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan												**10.550.000**	**9.660.000**	**11.160.000**	**3.350.000**	**6.760.000**	**41.480.000**			
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD Provinsi												**16.772.900**	**15.082.900**	**15.382.900**	**7.572.900**	**10.982.900**	**65.794.500**			

4. Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sumber APBN

X Rp. 1 Juta

NO.	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel. /Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Jumlah Total	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBN								
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	**SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**																				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																			
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
		Pembangunan infrastruktur tangki septik individu dan komunal pada area beresiko sanitasi	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Rumah Tangga	800	800	800	800	800	4000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	40.000.000	KEMENPUPR	DPUTR	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																			
		Penyusunan DED IPAL Skala Perkotaan	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen					1	1					1,000.000	1,000.000	KEMENPUPR	DPUTR	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah												**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**9.000.000**	**41.000.000**			
B.	**PENGOLAHAN SAMPAH**																				
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																			
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																			
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
		Pembangunan TPS-3R	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	4	4	4	4	4	16	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	10,000.000	KEMENPUPR	DLH	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan												**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**10.000.000**			
Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN													**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**11.000.000**	**51.000.000**			

5. Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sumber DAK

X Rp. 1 Juta

NO.	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel. /Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Jumlah Total	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBN								
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
		Pembangunan infrastruktur tangki septik individu dan komunal pada area beresiko sanitasi	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Rumah Tangga	430	430	430	430	430	2150	4.300,000	4.300,000	4.300,000	4.300,000	4.300,000	21.500,000	KEMENPUPR	DPUTR	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah												4.300,000	4.300,000	4.300,000	4.300,000	4.300,000	21.500,000			
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																				
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan																				
Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN													4.300,000	4.300,000	4.300,000	4.300,000	4.300,000	21.500,000			

6. Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sumber CSR/Swasta

X Rp. 1 Juta

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR							Sumber Pembiayaan dari CS/Swasta (juta rupiah)						Nama Swasta / CSR	KSM/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	CSR					Jumlah		
						2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	**SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**																		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
	Kerja sama dengan penyedot swasta	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Unit	4					4	2.400.000.000					2.400.000.000		DPUTR
	Penambahan pompa alkon dan aksesoris (selang, dudukan, dll)	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Unit	1					1	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000		DPUTR
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											**2.410.000.000**	-	-	-	-	**2.410.000.000**		
B.	**PENGOLAHAN SAMPAH**																		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																		
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
	Pengadaan Gerobak Sampah	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	70.000	70.000		DLH
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber Swasta / CSR											**2.410.000.000**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**	**2.480.000.000**		

7. Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sumber Masyarakat/ Swasta non-CSR

X Rp. 1 Juta

NOMOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Masyarakat							Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Nama Masyarakat/KSM Penanggungjawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	Masyarakat					Jumlah		
						2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	**SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**																		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
	Rehabilitasi IPAL Kominal	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Unit	9	9	9	9	9	45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000		DPUTR
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
	Pembangunan infrastruktur tangki septik pada area beresiko sanitasi	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Rumah Tangga	24445	24445	24445	24445	24445	122225	244.450.000	244.450.000	244.450.000	244.450.000	244.450.000	1.222.250.000		DPUTR
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											**244.540.000.000**	**244.540.000.000**	**244.540.000.000**	**244.540.000.000**	**244.540.000.000**	**1.222.700.000.000**		
B.	**PENGOLAHAN SAMPAH**																		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																		
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
	Pengadaan Gerobak Sampah	Tersebar di Seluruh Kelurahan	737244	18422	Unit					10	10					35.000	35.000		DLH
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan															**35.000**	**35.000**		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber PARTISIPASI MASYARAKAT											**244.540.000.000**	**244.540.000.000**	**244.540.000.000**	**244.540.000.000**	**244.575.000.000**	**1.222.735.000.000**		

8. Program dan Kegiatan dalam Daftar Tunggu

X Rp. 1 Juta

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Indikasi Sumber Pendanaan Potensial	Ketersediaan Proposal / Project Digest	Pengelola Paska Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	Daftar Tunggu					Jumlah			
						2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
	Penyusunan DED IPAL Komunal	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen	1	1	1	1	1	5	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	1.400.000	APBN		DPUTR
	Pembangunan IPALD Komunal	Seluruh Kecamatan	737244	18422	SR	1050	1050	1050	1050	1050	5250	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	52.500.000	APBN		DPUTR
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																			
	Penyusunan studi kelayakan/ justifikasi teknis IPAL Skala Perkotaan	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen				1		1				250.000		250.000	APBD KOTA		DPUTR
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																			
	Operasional UPTD SPALD	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Rumah	2550	2550	2550	2550	2550	15206	981.750	981.750	981.750	981.750	981.750	4.908.750	APBN		DPUTR
	Penyusunan kajian assesment LLTT	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Dokumen		1				1		50.000				50.000	APBD KOTA		DPUTR
	Sensus Calon Pelanggan LLTT	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Rumah Tangga		1000				1000		50.000				50.000	APBD KOTA		DPUTR
	Launching dan Promosi LLTT	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Kegiatan		1				1		50.000				50.000	APBD KOTA		DPUTR
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
	Penyusunan kajian akademik pengembangan UPTD SPALD	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen		1				1		50.000				50.000	APBD KOTA		DPUTR
	Penyusunan Bussiness Plan UPTD SPALD	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen		1				1		100.000				100.000	APBD KOTA		DPUTR
	Penyusunan Review SOP UPTD SPALD	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen		1				1		50.000				50.000	APBD KOTA		DPUTR
	Penilaian kinerja UPTD	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen		1				1	-	100.000	-	-	-	100.000	APBD KOTA		DPUTR
	Peningkatan kapasitas SDM (operator dan staff)	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Kegiatan		1				1	-	50.000	-	-	-	50.000	APBD KOTA		DPUTR
	Penyusunan Kajian Review Tarif Layanan PALD	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen					1	1					50.000	50.000	APBD KOTA		DPUTR
	Pemutakhiran SIPALDO (Sistem Informasi Pengelolaan ALD)	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Kegiatan			1			1			50.000			50.000	APBD KOTA		DPUTR
	Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan BLUD PALD dan PAM	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Dokumen					1	1					200.000	200.000	APBD KOTA		DPUTR
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																			
	Pengadaan Motor Penyedot tinja	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Unit		1				1		100.000				100.000	APBD KOTA		DPUTR
	Penambahan pompa alkon dan aksesoris (selang, dudukan, dll)	Singkup, Purbaratu	737244	18422	Unit		1				1	-	10.000	-	-	-	10.000	APBD KOTA		DPUTR
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
	O&P rutin IPLT	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Unit	1	1	1	1	1	5	485.030	485.030	485.030	485.030	485.030	2.425.150.000	APBN		DPUTR
	O&P Rutin IPAL Permukiman Berbasis Masyarakat	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Unit	86	108	130	152	174	650	516.000	648.000	780.000	912.000	1.044.000	3.900.000	APBN		DPUTR
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
	Pembinaan Operator Truk Tinja Swasta untuk layanan penyedotan - pengangkutan - pembuangan di IPLT berdasarkan SOP termasuk memerhatikan K3	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	5	5	5	5	5	25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	APBD KOTA		DPUTR
	Peningkatan Kapasitas KSM dan AKSANSI Pengelola IPAL Komunal di kawasan permukiman tentang operasional dan pemeliharaan	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	35	35	35	35	35	175	70.000	70.000	70.000	70.000.	70.000	350.000	APBD KOTA		DPUTR
	Peningkatan Kapasitas Developer Perumahan untuk penyediaan Tangki Septik Aman	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	50					50	50.000	-	-	-	-	50.000	APBD KOTA		DPUTR

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Indikasi Sumber Pendanaan Potensial	Ketersediaan Proposal / Project Digest	Pengelola Paska Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	Daftar Tunggu					Jumlah			
						2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028				
	Organisasi kemasyarakatan (LPM, Satgas ODF, kader Posyandu)	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	14	14	14	14	13	69	28.000	28.000	28.000	28.000	26.000.	138.000	APBD KOTA		DPUTR
	Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha (hotel, rumah makan, nawasena)	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	30					30	30.000	-	-	-	-	30.000	APBD KOTA		DPUTR
	Sosialisasi penegakan Perda 02/2021 tentang Pengelolaan ALD Kota Tasikmalaya	Seluruh Kecamatan	737244	18422	Orang	100		100			200	10.000	-	10.000	-	-	20.000	APBD KOTA		DPUTR
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											**12.965.780**	**13.617.780**	**13.199.780**	**13.521.780**	**13.651.780**	**66.956.900**			
B.	**PENGOLAHAN SAMPAH**																			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan																			
	Total Kebutuhan Pembiayaan / Pendanaan YANG BELUM ADA SUMBER PENDANAAN											**12.965.780**	**13.617.780**	**13.199.780**	**13.521.780**	**13.651.780**	**66.956.900**			

Lampiran 6

KERANGKA KERJA LOGIS PEMBANGUNAN SANITASI
KOTA TASIKMALAYA

Lampiran 6:

KERANGKA KERJA LOGIS PEMBANGUNAN SANITASI KOTA TASIKMALAYA

(i) Air Limbah Domestik (ALD)

Visi : **"Kota Tasikmalaya Layak Sanitasi Tahun 2028"**

Misi Air Limbah Domestik : Mewujudkan pengelolaan air limbah domestik sesuai standar teknis

Permasalahan	Akar Permasalahan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Rekomendasi Strategis	Kebijakan	Indikasi Program dan Kegiatan
Masih rendahnya capaian akses aman di Kota Tasikmalaya (akses aman 2023: 4,7%, akses layak 2023: 27,8% dan BABS 2023: 34,1%)	***Aspek Teknis :*** <u>SPALD Setempat</u> ✓ Akses Belum Layak 37,7% ✓ Akses Layak 27,8% ✓ Akses Aman 4,7% ✓ Kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan baru 31,58%, Idle kapasitas IPLT masih sangat tinggi (68,42%). ✓ Truk tinja belum melakukan pelayanan penyedotan dan ✓ pengangkutan lumpur tinja secara optimal, kapasitas penggunaan truk tinja baru 33,33%. ✓ Kapasitas angkut terhadap kapasitas desain IPLT baru mencapai 47,37%. ✓ IPLT yang ada saat ini hanya memenuhi 17,97% dari potensi ✓ lumpur tinja di seluruh kab/kota. ✓ Jumlah truk tinja yang ada saat ini hanya memenuhi 8,51% ✓ dari kebutuhan total (potensi) pengangkutan lumpur tinja. <u>SPALD Terpusat</u> ✓ Terdapatnya sambungan rumah (SR) yang belum tersambung ke IPAL Komunal Skala Kawasan ✓ Sulitnya mencari lahan untuk lokasi SPALD-T ✓ Rusaknya beberapa bagian pada unit pengolah di	Terwujudnya akses Layak dan aman disektor air limbah domestik Kota Tasikmalaya	Meningkatnya akses Layak air limbah domestik sebesar 100% dan akses aman air limbah domestik sebesar 24% pada Tahun 2028 Meningkatnya kelurahan ODF 100% pada Tahun 2028	Persentase KK/RT yang berakses layak Persentase KK/RT yang berakses aman Persentase Kelurahan ODF	***Aspek Teknis :*** Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan akses air limbah domestik; Menghilangkan praktek BABS; ***Aspek Regulasi dan Kelembagaan :*** Penyiapan lembaga pengelola air limbah domestik dengan memisahkan fungsi regulator dan operator Penyiapan regulasi pengelolaan air limbah domestik; ***Aspek Peran serta Masyarakat :*** Promosi dan sosialisasi untuk menigkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelola air limbah domestik; Membentuk dan membina KSM/KPP pengelola air limbah domestik; ***Aspek Pendanaan :*** Mengembangkan akses pendanaan dan kerja sama pengelolaan air limbah domestik;	Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Air Limbah Domestik Sesuai Dengan Karakteristik dan Kebutuhan Daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota* ✓ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman ✓ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman ✓ Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja ✓ Pengadaan Truk Pengangkut Tinja ✓ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ✓ Penyusunan/Review Dokumen Masterplan Air Limbah Kota Tasikmalaya ✓ Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ✓ Operasional dan

Visi : **"Kota Tasikmalaya Layak Sanitasi Tahun 2028"**

Misi Air Limbah Domestik : Mewujudkan pengelolaan air limbah domestik sesuai standar teknis

Permasalahan	Akar Permasalahan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Rekomendasi Strategis	Kebijakan	Indikasi Program dan Kegiatan
	beberapa IPAL eksisting ***Aspek Regulasi :*** ✓ Pelaksanaan Perda belum optimal ✓ Belum ada Perwali tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal. ✓ Belum peraturan turunan belum ada ***Aspek Kelembagaan :*** ✓ Pengelolaan tangki septik komunal oleh KPP belum optimal karena belum ada kemandirian KPP. ✓ Belum ada kerjasama dengan pihak swasta yang berusaha pada bidang penyedotan lumpur tinja. ***Aspek Peran serta Masyarakat :*** ✓ Peran serta masyarakat dalam pengolahan air limbah pada SPALD terpusat belum optimal dan berkelanjutan. ✓ Persepsi, perilaku, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik masih minim. ***Aspek Pendanaan :*** ✓ Dukungan anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik masih terbatas ✓ Penarikan retribusi air limbah belum optimal						Pemeliharaan IPLT Singkup ✓ Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ✓ Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Air Limbah ✓ Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Air Limbah ✓ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ✓ Penyusunan/Review Dokumen Masterplan Air Limbah Kota Tasikmalaya

(ii) Pengelolahan Sampah

Visi : **"Kota Tasikmalaya Layak Sanitasi Tahun 2028"**							
Misi Persampahan : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan yang Berkelanjutan							
Permasalahan	**Akar Permasalahan**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Rekomendasi Strategis**	**Kebijakan**	**Indikasi Program dan Kegiatan**
Masih rendahnya pengurangan sampah 16,5%, Adanya sampah yang tidak terkelola 34, 14%	***Aspek Teknis :*** <u>Pengurangan Sampah</u> ✓ Pengurangan sampah 16,5% ✓ Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampahmasih sedikit (0,52%) ✓ Bank Sampah Unit seluruh kota sebanyak 24 unit ✓ Jumlah TPS 3R masih terbatas (2 unit) ✓ Masih terbatasnya tempat sampah terpilah ✓ Belum terpenuhinya sarana prasarana Bank Sampah Induk ✓ Sulitnya memasarkan hasil produk 3R <u>Penanganan Sampah</u> ✓ Penanganan Sampah sebesar 65,1% ✓ Armada pengangkut sampah masih kurang dan beberapa mengalami kerusakan ✓ Alat berat untuk operasional TPA Ciangir masih kurang ✓ TPA belum menerapkan sanitary landfill ✓ Penerapan inovasi teknologi belum maksimal ✓ Sisa umur TPA diperkirakan 3-5 tahun ✓ Belum adanya TPST ***Aspek Regulasi :*** ✓ Pelaksanaan Perda Nomor 7	Terwujudnya lingkungan bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan	Meningkatnya pengurangan sampah Optimalisasi penanganan sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase penanganan sampah	***Aspek Teknis :*** Meningkatkan sarana dan prasana pengelolaan sampah ***Aspek Regulasi :*** Penyusunan dan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan ***Aspek Kelembagaan :*** ✓ Pembinaan kelembagaan KSM pengelola TPS3R ✓ Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta ***Aspek Peran serta Masyarakat :*** Edukasi dan sosialisasi untuk menigkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelola sampah; ***Aspek Pendanaan :*** Mengembangkan akses pendanaan dan kerja sama pengelolaan sampah	Optimalisasi dan peremajaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Peningkatan komitmen Daerah dalam pengelolaan persampahan Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan persampahan Peningkatan Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam pengelolaan sampah Pengembangan Kerja Sama dan Pola Pendanaan	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** ✓ Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota ✓ Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS ✓ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan ✓ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan ✓ Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan ✓ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

Visi : **"Kota Tasikmalaya Layak Sanitasi Tahun 2028"**							
Misi Persampahan : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan yang Berkelanjutan							
Permasalahan	**Akar Permasalahan**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Rekomendasi Strategis**	**Kebijakan**	**Indikasi Program dan Kegiatan**
	Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal ✓ Pelaksanaan Perwalkot Nomor 22 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum optimal ✓ Penerapan SOP belum optimal ***Aspek Kelembagaan :*** ✓ Pengelolaan TPS3R oleh KSM belum optimal karena belum ada kemandirian KSM ✓ Belum optimalnya kerjasama dengan pihak swasta ***Aspek Peran serta Masyarakat :*** ✓ Masih ada sebagian masyarakat yang belum tertib dalam membuang sampah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan ✓ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah ***Aspek Pendanaan :*** ✓ Dukungan anggaran untuk pengelolaan persampahan masih terbatas ✓ Penarikan retribusi persampahan belum optimal						

